



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN

Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

LKPPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2022



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPj)

Bupati Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
TAHUN 2022



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN





Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN





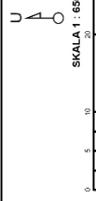
MAWARDI ROSKA, S.IP
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010-2030

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 84 Zone 47 S

INDEKS LOKASI



- KETERANGAN :**
- ⊙ Ibukota Kabupaten
 - ⊙ Ibukota Kecamatan
 - BATAS ADMINISTRASI**
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - JARINGAN JALAN**
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - PERAIRAN**
 - Genis Pantai
 - Pancung Soal
 - Sungai
 - UNSUR ALAM**
 - ▲ Pegunungan
- ADMINISTRASI KECAMATAN**
- Airpura
 - Basa Amppek Balai Tapan
 - Batang Kapas
 - Bayang
 - IV Jurai
 - IV Nagari Bayang Utara
 - Koto XI Tarusan
 - Lengayang
 - Linggo Sari Baganti
 - Lumang
 - Pancung Soal
 - Ranah Amppek Hulu Tapan
 - Ranah Amppek
 - Silaut
 - Sutera

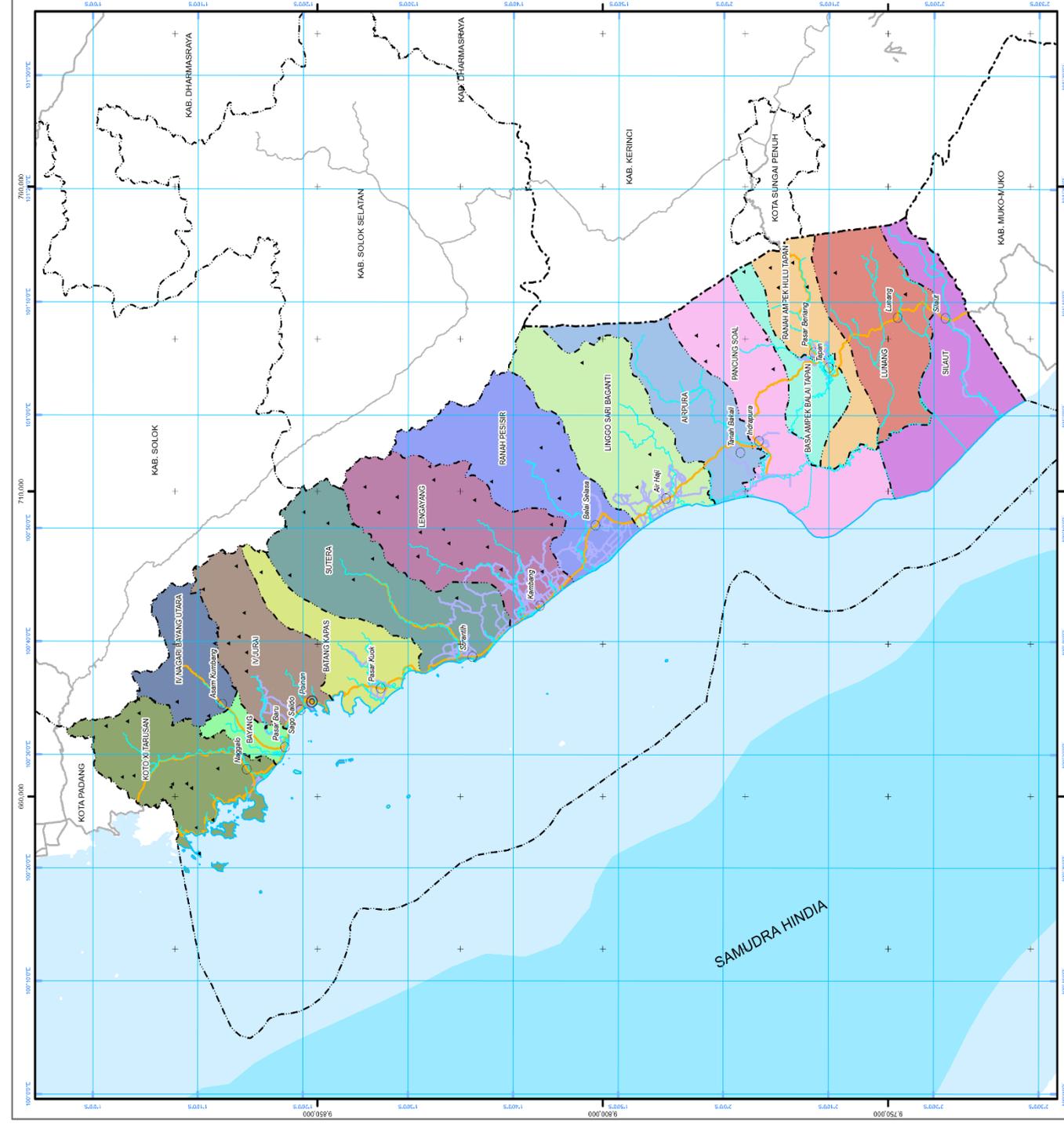
SUMBER DATA :

- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2010
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2011
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2012
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2013
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2014
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2015
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2016
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2017
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2018
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2019
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2020
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2021
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2022
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2026
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2027
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2028
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2029
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2030

CATATAN :

- Batas Administrasi (batas provinsi) masih berupa batas indikator yang bukan referensi resmi garis batas administrasi.

BUPATI PESISIR SELATAN
 Ttd
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.





LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2022 meliputi hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, di samping sebagai tugas dan kewajiban menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, juga mencerminkan tekad, semangat dan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas pelaksanaan pembangunan di Daerah ini.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun 2022, telah banyak target kinerja yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam memantapkan strategi kebijaksanaan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan moril dan materil kepada masyarakat dan seluruh anggota DPRD sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat berjalan dengan baik. Semoga pengabdian kita untuk Pesisir Selatan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. *Amin Ya Rabbillalamin.*

Painan, 30 Maret 2023


BUPATI PESISIR SELATAN
[Handwritten signature in blue ink]
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	3
1.2.1 Visi	3
1.2.2 Misi	4
1.3 Data Umum Daerah	13
1.3.1 Data Geografis Wilayah	13
1.3.2 Jumlah Penduduk	15
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	21
1.3.4 Jumlah PNS	21
1.3.5 Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan	24
1.3.6 Realisasi belanja menurut jenis belanja	26
1.3.7 Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan	29
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	31
I PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	30
1.1 Latar Belakang	30
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022	32
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022	32
II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	34
2.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD	34
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	44
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	44
1. Urusan Pendidikan	44
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2. Urusan Kesehatan	52
Dinas Kesehatan	
3. Urusan Kesehatan	57
RSUD M. Zein Painan	
4. Urusan Pekerjaan Umum	61
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5. Urusan Pemukiman Dan Pertanahan	69
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	
6. Urusan Trantibum Linmas	75
Satpol PP Dan Damkar	
7. Urusan Trantibum Linmas	78
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



8.	Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	79
9.	Urusan Perdagangan dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	84
10.	UrusanPemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92
11.	Urusan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100
12.	Urusan Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika	105
13.	Urusan Perikanan dan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan	110
14.	Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	116
15.	Urusan Koperasi, UKM danTenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja	122
16.	Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan	128
17.	Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	133
18.	Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	138
19.	Urusan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	143
20.	Urusan Penunjang Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	167
21.	Urusan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	170
22.	Urusan Penunjang Perencanaan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	174
23.	Urusan Penunjang Inspektorat Inspektorat Daerah	178
24.	Urusan Pendukung Sekretariat Daerah	184
25.	Urusan Pendukung Sekretariat DPRD	185
26.	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan bangsa dan Politik	189
	Urusan Kewilayahan	194
27.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan	194
28.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Bayang	195
29.	Urusanm Kewilayahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	199
30.	Urusan Kewilayahan Kecamatan IV Jurai	201



	31. Urusan Kewilayahan Kecamatan Batang Kapas	202
	32. Urusan Kewilayahan Kecamatan Sutera	204
	33. Urusan Kewilayahan Kecamatan Lengayang	205
	34. Urusan Kewilayahan Kecamatan Ranah Pesisir	209
	35. Urusan Kewilayahan Kecamatan Linggo Sari Baganti	213
	36. Urusan Kewilayahan Kecamatan Airpura	217
	37. Urusan Kewilayahan Kecamatan Pancung Soal	219
	38. Urusan Kewilayahan Basa Ampek Balai Tapan	223
	39. Urusan Kewilayahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	226
	40. Urusan Kewilayahan Kecamatan Lunang	230
	41. Urusan Kewilayahan Kecamatan Silaut	233
	3.2 Kebijakan Strategis	239
	3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	249
BAB	IV. TUGAS PEMBANTUAN	276
BAB	IV. PENUTUP	278



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berkewajiban untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan yang merupakan laporan kinerja kepada rakyat melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah secara transparan dan terukur, dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ.

Adapun peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagai bahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026,
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perubahan Penjabaran APBD

BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

BAB V Penutup

1.2. VISI dan MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. VISI

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026 dan merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU,
DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur,



mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

1.2.2. MISI

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2022 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur. Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.



3. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya unkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan production cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektivitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan



Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab,



kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama yang telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan lembaga-lembaga



keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Mushalla), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan.

2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan, menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mewujudkan pendidikan berkarakter.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, melalui peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, dan meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal. Namun potensi ini belum semuanya tergali secara optimal. Pengembangan potensi ekonomi pangan berbasis komoditi lokal akan meningkatkan daya saing produk industri pangan, berkembangnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat,



menumbuh kembangkan objek-objek wisata yang potensial, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, meningkatkan pemasaran objek-objek wisata pesisir selatan baik didalam maupun diluar negeri

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour de Singkarak, serta pelaksanaan olahraga mancing sebagai agenda tahunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan.

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur publik, adanya akses air bersih dan sanitasi, munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengembangan kawasan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan produksi (agropolitan, minapolitan) dan sentra industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, seperti:

- a. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti.
- b. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
- c. Pengembangan sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- d. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
- e. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.



- f. Sentra industri sulaman bayangan Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kampung Batik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- g. Sentra industri anyaman pandan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- h. Sentra industri makanan tradisional di Painan Kecamatan IV Jurai.

Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan Transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung pelabuhan Teluk Bayur.

Untuk pengembangan kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu kawasan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pengembangan Kawasan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Sutera, Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Peternakan Sapi di Kecamatan Silaut, Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sentra Peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

7) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan



sehingga potensi sumber daya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, terwujud konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan, dan terpeliharanya kearifan lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk prasarana lingkungan tersebut antara lain :

- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Alam.

8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran

Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terlaksananya program perlindungan sosial, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat



terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dan munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH

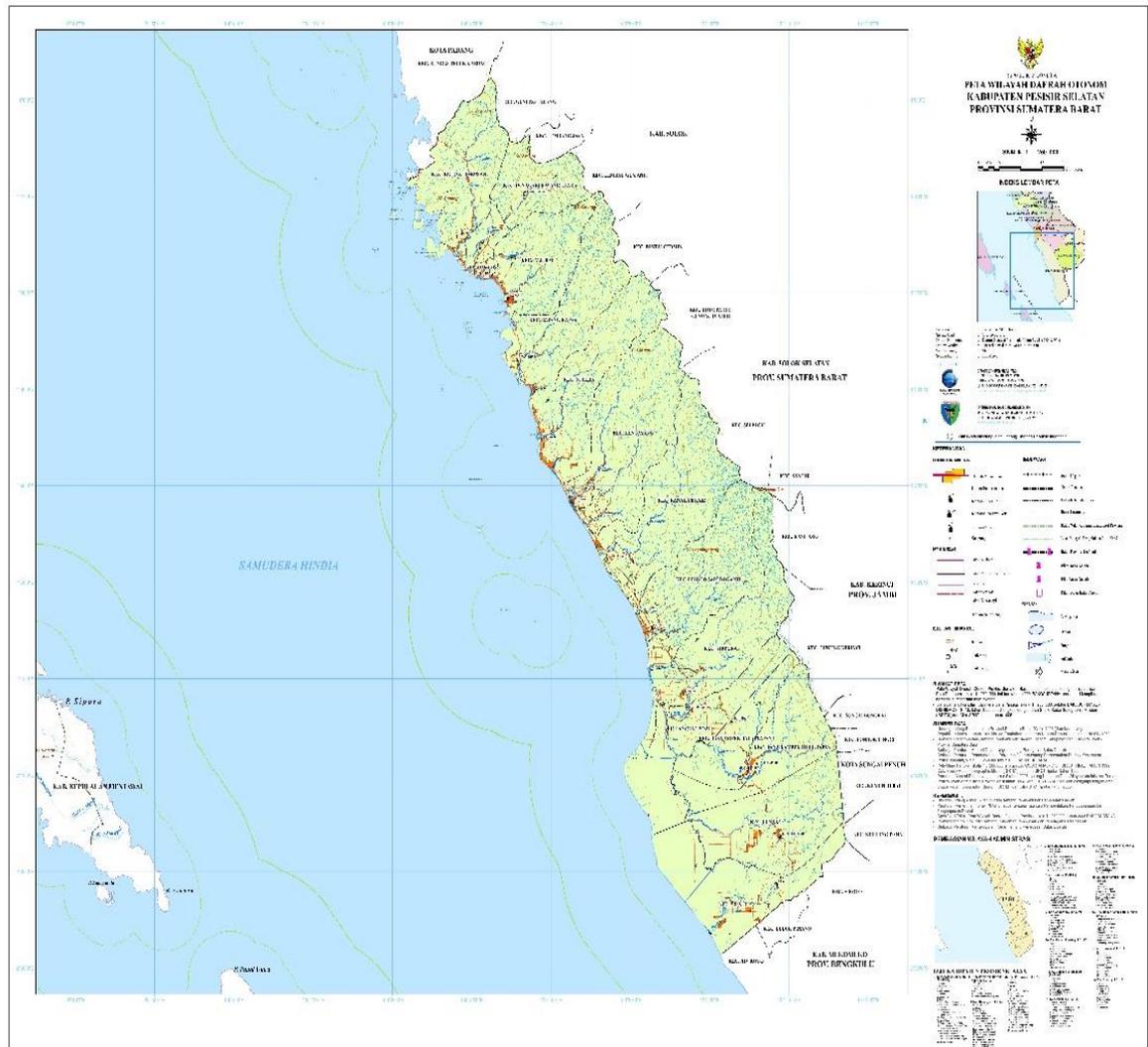
Kabupaten Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik 0o 57' 31, 21" LS - 20 28' 42, 32" LS dan 100o 17' 48, 64 BT - 101o 17' 34, 3 BT, dengan luas ± 6.049.34 km², atau 14, 22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai ke perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan.

Letak Kabupaten Pesisir Selatan ditandai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Padang.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.



Gambar 1.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 23 sungai besar dengan 14 anak sungai. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 23° C hingga 32° C disiang hari dan 20° C 28° C di malam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.1
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Nama Tempat	Ketinggian
1	2	3
1	Silaut	14 meter
2	Lunang	30 meter
3	Basa Ampek Balai Tapan	25 meter
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	28 meter
5	Pancung Soal	15 meter
6	Airpura	39 meter
7	Linggo Sari Baganti	7 meter
8	Ranah Pesisir	4 meter
9	Lengayang	2 meter
10	Sutera	3 meter
11	Batang Kapas	5 meter
12	IV Jurai	3 meter
13	Bayang	4 meter
14	IV Nagari Bayang Utara	60 meter
15	Koto XI Tarusan	3 meter

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

1.3.2 JUMLAH PENDUDUK

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk tahun 2022 tercatat 520.293 jiwa yang terdiri dari 260.489 laki-laki dan 259.804 perempuan. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 tercatat 516.518 jiwa yang terdiri dari 260.118 laki-laki dan 256.400 perempuan. Dari dua sumber data tersebut terdapat perbedaan sebanyak 3.775 jiwa. Perbedaan data tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam pendataan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut:



Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pancung Soal	13.745	13.596	27.341
2	Ranah Pesisir	17.054	17.625	34.679
3	Lengayang	31.206	31.266	62.472
4	Batang Kapas	18.527	18.702	37.229
5	IV Jurai	26.316	26.244	52.560
6	Bayang	21.743	21.973	43.716
7	Koto XI Tarusan	27.289	27.236	54.525
8	Sutera	29.368	28.963	58.331
9	Linggo Sari Baganti	25.497	25.384	50.881
10	Lunang	11.528	11.143	22.671
11	Basa Ampek Balai Tapan	8.112	8.117	16.229
12	IV Nagari Bayang Utara	4.189	4.358	8.547
13	Airpura	9.798	9.612	19.410
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	7.972	7.808	15.780
15	Silaut	8.145	7.777	15.922
Total Kabupaten		260.489	259.804	520.293

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	29 128	13 375	42 503
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	29 107	18 487	47 594
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	6 793	640	7 433
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	34 286	21 953	56 239
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	22 745	8 828	31 573
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	14 733	19 317	34 050
Jumlah/Total	136 792	82 600	219 392

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumber : BPS, Buku Pesisir dalam Angka, 2023



Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik yaitu wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bayang dengan kepadatan rata-rata 531,43 jiwa/Km² dan Kecamatan Silaut 34,63 jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk paling rendah. Hal Ini dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Silaut	34,63
2	Lunang	50,86
3	Basa Ampek Balai Tapan	56,50
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	85,05
5	Pancung Soal	49,97
6	Airpura	49,24
7	Linggo Sari Baganti	90,07
8	Ranah Pesisir	60,91
9	Lengayang	98,77
10	Sutera	101,50
11	Batang Kapas	134,50
12	IV Jurai	141,53
13	Bayang	531,43
14	IV Nagari Bayang Utara	34,80
15	Koto XI Tarusan	122,27
Rata-Rata		85,38

Sumber : BPS Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan struktur usia, menurut Badan Pusat Statistik komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 254.212 jiwa (49,88 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 255.406 jiwa (50,12 persen). Dan Menurut Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 255.479 jiwa (48,55 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 260.070 jiwa (51,45) persen), untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1,6 berikut:



Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
		N (jiwa)	N (jiwa)	
1	00-04	22.197	21.057	43.236
2	05-09	21.414	20.384	41.798
3	10-14	22.862	21.748	44.610
4	15-19	23.950	22.001	45.951
5	20-24	22.276	20.970	43.246
6	25-29	20.714	19.105	39.819
7	30-34	20.137	19.032	39.169
8	35-39	18.775	18.731	37.506
9	40-44	18.169	18.276	36.445
10	45-49	16.115	15.990	32.105
11	50-54	14.587	14.869	29.456
12	55-59	11.593	12.808	24.401
13	60-64	10.357	11.674	22.031
14	65-69	8.143	8.530	16.673
15	70-74	5.280	5.850	11.130
16	> 75	3.567	5.375	8.942
Total Kabupaten		260.118	256.400	516.518

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2023

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil adalah 152.953 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 18.903 KK, dan yang paling sedikit berada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.672 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut.



Tabel 1.6
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Keluarga	
		N (KK)	(%)
1	Pancung Soal	7.760	4,9
2	Ranah Pesisir	11.340	7,1
3	Lengayang	19.680	12,3
4	Batang Kapas	11.666	7,3
5	IV Jurai	16.209	10,2
6	Bayang	13.685	8,6
7	Koto XI Tarusan	16.289	10,2
8	Sutera	17.237	10,8
9	Linggo Sari Baganti	15.901	10,0
10	Lunang	7.002	4,4
11	Basa Ampek Balai Tapan	4.763	3,0
12	IV Nagari Bayang Utara	2.789	1,7
13	Airpura	5.738	3,6
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	4.638	2,9
15	Silaut	4.976	3,1
Total Kabupaten		159.673	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan (pemekaran 3 Kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 Nagari (pemekaran Nagari tahun 2011), dan 480 Kampung dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lengayang 632,96 km dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bayang 80,92 km. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.8 dan 1.9 berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km)
1	Silaut	Silaut	466,45
2	Lunang	Lunang	456,73
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	281,96
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	187,46
5	Pancung Soal	Inderapura	547,41



6	Airpura	Tamuan	380,10
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	557,66
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44
9	Lengayang	Kambang	632,96
10	Sutera	Surantih	569,81
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	277,54
12	IV Jurai	Salido	368,19
13	Bayang	Pasar Baru	80,32
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242,33
15	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37
Total Kabupaten			6.049,33

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Tabel 1.8
Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari dari tahun 2018 - 2022
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Silaut	10	10	10	10	10
2	Lunang	10	10	10	10	10
3	Basa Ampek Balai Tapan	10	10	10	10	10
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	10	10	10	10
5	Pancung Soal	10	10	10	10	10
6	Airpura	10	10	10	10	10
7	Linggo Sari Baganti	16	16	16	16	16
8	Ranah Pesisir	10	10	10	10	10
9	Lengayang	9	9	9	9	9
10	Sutera	12	12	12	12	12
11	Batang Kapas	9	9	9	9	9
12	IV Jurai	20	20	20	20	20
13	Bayang	17	17	17	17	17
14	IV Nagari Bayang Utara	6	6	6	6	6
15	Koto XI Tarusan	23	23	23	23	23
Pesisir Selatan		182	182	182	182	182

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023



1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

Tabel 1.10
Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021 - 2022
di Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2022 (%) Annual Population Growth Rate 2021-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
1 Sifatut	16.152	1,94
2 Lunang	23.228	1,94
3 Basa Ampek Balai Tapan	15.930	1,58
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	15.943	1,59
5 Pancung Soal	27.355	1,63
6 Airpara	18.718	1,63
7 Linggo Sari Baganti	50.231	1,24
8 Ranah Pesisir	34.257	0,89
9 Lengayang	62.515	1,40
10 Sutera	57.836	1,71
11 Batang Kapas	37.329	1,40
12 IV Jurai	52.110	1,35
13 Bayang	43.003	1,13
14 IV Nagari Bayang Utara	8.432	1,03
15 Koto XI Tansan	53.479	0,73
Pesisir Selatan	516.518	1,35

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2022

Berdasarkan pada tabel di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 1,35% per tahunnya.

1.3.4 JUMLAH PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 menurut jabatan, jenis kelamin sebanyak 3.952 Perempuan dan 1.870 laki-laki dan tingkat pendidikan Sarjana 4.003 orang, tamat SD sebanyak 8 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.11 dan Tabel 1.12 berikut.

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jabatan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-



2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	-	1
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	28	3	31
4	Administrator	112	46	158
5	Pengawas	90	109	199
6	Eselon V/5	-	-	-
7	Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
8	Jabatan Fungsional Guru	848	2.265	3.113
9	Jabatan Fungsional Medis	96	920	1.016
10	Jabatan Fungsional Teknis	208	202	410
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	489	407	896
Jumlah		1.870	3.952	5.822

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Tabel 1.12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	7	1	8
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27	4	31
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	380	312	692
4	Diploma I/ Akta I	1	10	11
5	Diploma II/ Akta II	84	190	274
6	Diploma III/ Akta III	82	768	850
7	Diploma IV/ Akta IV	3	49	52
8	S 1/ Sarjana	1.225	2.778	4.003
9	S 2/ Pasca Sarjana	246	167	413
10	S 3/ Doktor/ Ph.D	-	-	-
Jumlah		2.055	4.279	6.334

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom dalam hal ini Bupati, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan



pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah (OPD), lembaga teknis daerah, kecamatan. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.15 berikut:

Tabel 1.13
Jumlah dan Nama Perangkat Daerah
di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Alamat	Ket
1.	Sekretariat Daerah	Painan	
2.	Sekretariat DPRD	Painan	
3.	Inspektorat	Painan	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Painan	
5.	Dinas Kesehatan	Painan	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sago	
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Painan	
8.	Dinas Pertanian	Painan	
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	Painan	
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Painan	
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Painan	
12.	Dinas Perhubungan	Sago	
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Painan	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Painan	
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Painan	
16.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Painan	
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Painan	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Painan	
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Salido	
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Painan	
21.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sago	
22.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Painan	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Painan	



	Daya Manusia		
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Painan	
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Painan	
26.	RSUD Dr.M.Zein Painan	Painan	
27.	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Nanggalo	
28.	Kantor Camat Bayang	Ps.Baru Bayang	
29.	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	
30.	Kantor Camat IV Jurai	Salido	
31.	Kantor Camat Batang Kapas	Psr Kuok	
32.	Kantor Camat Sutera	Surantih	
33.	Kantor Camat lengayang	Kambang	
34.	Kantor Camat Ranah Pesisir	Balai Selasa	
35.	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Air Haji	
36.	Kantor Camat Pancung Soal	Indrapura	
37.	Kantor Camat Airpura	Tamuan	
38.	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Psr Beriang	
39.	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	Tapan	
40.	Kantor Camat Lunang	Lunang	
41.	Kantor Camat silaut	Silaut	

1.3.5 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Target pendapatan daerah kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.662.717.929.358,00** dengan Realisasi **Rp. 1.633.057.724.701,01** atau **98,22%**. Terdiri sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar **Rp139.571.499.732,00** dengan realisasi **Rp. 145.637.815.190,01** atau **104,35%**.
2. Pendapatan Transfer dengan target **Rp. 1.478.227.245.818,00** dan Realisasi sebesar **Rp1.442.770.582.697,00** atau **97,60%**.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target **Rp. 44.919.183.808,00** dan Realisasi **Rp. 44.649.326.814,00** atau **99,40%**. Lebih lanjut target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.16 berikut:



Tabel 1.16
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

NO	URAIAN		TARGET	REALISASI	%
1	2		3	4	5
		PENDAPATAN DAERAH	1.662.717.929.358,00	1.633.057.724.701,01	98,22
1		<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	139.571.499.732,00	145.637.815.190,01	104,35
	a	Pajak Daerah	27.570.180.014,00	27.788.857.519,00	100,79
		1 Pajak Hotel	300.000.000,00	253.862.065,00	84,62
		2 Pajak Restoran	1.740.334.696,00	2.245.408.258,00	129,02
		3 Pajak Hiburan	40.645.000,00	35.553.000,00	87,47
		4 Pajak Reklame	440.000.000,00	467.204.950,00	106,18
		5 Pajak Penerangan Jalan	15.940.000.000,00	16.444.463.006,00	103,16
		6 Pajak Sarang Burung Walet	-	125.000,00	-
		7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.907.148.547,00	96,90
		8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.359.200.318,00	2.519.278.067,00	106,79
		9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.750.000.000,00	2.915.814.626,00	77,76
	b	Retribusi Daerah	4.537.044.250,00	3.990.134.633,00	87,95
		1 Retribusi Jasa Umum	2.176.946.250,00	2.406.042.150,00	110,52
		2 Retribusi Jasa Usaha	2.010.098.000,00	1.430.471.500,00	71,16
		3 Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	153.620.983,00	43,89
	c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.766.118.702,00	9.928.421.974,00	101,66
		1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.766.118.702,00	9.928.421.974,00	101,66
	d	Lain-lain PAD yang Sah	97.698.156.766,00	103.930.401.064,01	106,38
		1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	252.303.280,00	126,15
		2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		5.220.783,53	-
		3 Jasa Giro	1.050.000.000,00	1.410.561.923,00	134,34
		4 Pendapatan Bunga	4.750.000.000,00	5.714.861.130,00	120,31



	5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		184.076.000,46	-
	6	Pendapatan dari Pengembalian		2.046.864.886,21	-
	7	Pendapatan BLUD	91.698.156.766,00	94.034.205.860,81	102,55
	8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		259.794.700,00	-
	9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		22.512.500,00	-
2		PENDAPATAN TRANSFER	1.478.227.245.818,00	1.442.770.582.697,00	97,60
	a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.381.617.701.514,00	1.350.825.408.000,00	97,77
	1	Dana Perimbangan	1.220.596.136.514,00	1.189.803.844.000,00	97,48
	2	Dana Desa	161.021.565.000,00	161.021.564.000,00	100,00
	b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.609.544.304,00	91.945.174.697,00	95,17
	1	Pendapatan Bagi Hasil	96.609.544.304,00	91.945.174.697,00	95,17
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.919.183.808,00	44.649.326.814,00	99,40
	a	Pendapatan Hibah	44.219.183.808,00	44.530.897.014,00	100,70
	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	44.219.183.808,00	44.530.897.014,00	100,70
	b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	700.000.000,00	118.429.800,00	16,92
	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	700.000.000,00	118.429.800,00	16,92

*) Realisasi sementara sebelum audit BPK

1.3.6 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Pada tahun 2022 di anggarakan sebesar **Rp. 1.763.605.092.125,00** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp.1.629.132.948.487,50** atau **92,38%**, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi **Rp. 1.206.766.763.146,00** dengan realisasi sebesar **Rp.1.119.345.707.675,50** atau **92,76 %**
2. Belanja Modal **Rp. 273.299.477.867,00** dengan realisasi sebesar **Rp.263.195.433.274,00** atau **96,30 %**.
3. Belanja Tidak Terduga **Rp. 37.647.797.307,00** dengan realisasi sebesar **Rp.1.515.568.300,00** atau **4,03 %**
4. Belanja Transfer **Rp. 245.891.053.805,00** dengan realisasi sebesar **Rp.245.076.239.238,00** atau **99,67 %**



Selanjutnya dapat dilihat lebih lanjut berdasarkan komponen belanja dan realisasi belanja tersebut pada tabel 1.17 berikut ini.

Tabel 1.17
LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH
Realisasi Belanja periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

NO	Uraian		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	BELANJA DAERAH		1.763.605.092.125,00	1.629.132.948.487,50	92,38
1		BELANJA OPERASI	1.206.766.763.146,00	1.119.345.707.675,50	92,76
	A	Belanja Pegawai	748.588.025.998,00	689.434.142.713,50	92,10
		1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	484.191.388.652,00	448.660.643.080,00	92,66
		2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	74.987.052.324,00	67.939.811.691,50	90,60
		3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	154.655.208.839,00	141.007.801.959,00	91,18
		4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.063.253.319,00	17.901.369.810,00	99,10
		5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	513.676.672,00	472.299.373,00	91,94
		6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	823.809.501,00	803.350.000,00	97,52
		7 Belanja Pegawai BLUD	15.353.636.691,00	12.648.866.800,00	82,38
	B	Belanja Barang dan Jasa	397.758.132.382,00	371.823.293.418,00	93,48
		1 Belanja Barang	50.743.091.179,00	45.894.415.514,00	90,44
		2 Belanja Jasa	110.776.950.866,00	104.055.088.738,00	93,93
		3 Belanja Pemeliharaan	13.409.245.147,00	13.009.982.346,00	97,02
		4 Belana Perjalanan Dinas	61.458.896.716,00	55.161.091.886,00	89,75
		5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.695.837.778,00	14.136.073.983,00	96,19
		6 Belanja Barang dan Jasa BOS	58.104.806.009,00	54.656.252.435,00	94,06
		7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.569.304.687,00	84.910.388.516,00	95,87
	C	Belanja Hibah	57.225.604.766,00	55.453.182.969,00	96,90
		1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.133.577.000,00	898.577.000,00	79,27
		2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.055.674.915,00	53.518.253.118,00	97,21
		3 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.036.352.851,00	1.036.352.851,00	100,00
	D	Belanja Bantuan Sosial	3.195.000.000,00	2.635.088.575,00	82,48
		1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	45.000.000,00	44.888.575,00	99,75
		2 Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	3.150.000.000,00	2.590.200.000,00	82,23



2		BELANJA MODAL	273.299.477.867,00	263.195.433.274,00	96,30
	A	Belanja Modal Tanah	2.674.712.693,00	506.538.418,00	18,94
	1	Belanja Modal Tanah	2.674.712.693,00	506.538.418,00	18,94
	B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.739.865.764,00	70.113.670.812,00	93,81
	1	Belanja Modal Alat Besar	1.481.936.900,00	256.384.318,00	17,30
	2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.119.688.300,00	3.923.242.720,00	95,23
	3	Belanja Modal Alat Pertanian	817.084.800,00	786.955.300,00	96,31
	4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.278.349.315,00	13.973.473.053,00	97,86
	5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	130.413.450,00	125.272.568,00	96,06
	6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.312.198.619,00	10.071.484.788,00	97,67
	7	Belanja Modal Alat Laboratorium	27.075.723.990,00	27.014.478.238,00	99,77
	8	Belanja Modal Komputer	3.188.053.540,00	2.923.484.405,00	91,70
	9	Belanja Modal Alat Pengeboran	101.392.253,00	99.012.000,00	97,65
	10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.080.000,00	-	-
	11	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.149.185.314,00	1.947.386.000,00	90,61
	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.786.798.100,00	7.493.644.007,00	85,28
	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.284.961.183,00	1.498.853.415,00	65,60
	C	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.313.258.090,00	37.752.377.626,00	98,54
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung	37.808.254.260,00	37.308.170.626,00	98,68
	2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	399.003.830,00	398.493.000,00	99,87
	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	106.000.000,00	45.714.000,00	43,13
	D	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.238.501.489,00	149.489.587.144,00	98,84
	1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	131.662.242.066,00	130.455.409.782,00	99,08
	2	Belanja Modal Bangunan Air	17.582.242.499,00	17.127.812.062,00	97,42
	3	Belanja Modal Instalasi	1.885.683.224,00	1.798.031.600,00	95,35
	4	Belanja Jaringan	108.333.700,00	108.333.700,00	100,00
	E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.333.139.831,00	5.333.259.274,00	84,21
	1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	90.993.940,00	75.516.448,00	82,99
	2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	199.850.000,00	199.500.000,00	99,82
	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.042.295.891,00	5.058.242.826,00	83,71
3		BELANJA TIDAK TERDUGA	37.647.797.307,00	1.515.568.300,00	4,03
	A	Belanja Tidak Terduga	37.647.797.307,00	1.515.568.300,00	4,03
	1	Belanja Tidak Terduga	37.647.797.307,00	1.515.568.300,00	4,03
4		BELANJA TRANSFER	245.891.053.805,00	245.076.239.238,00	99,67



A		Belanja Bagi Hasil	4.536.097.205,00	3.721.283.638,00	82,04
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.086.727.330,00	3.377.564.849,00	82,65
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	449.369.875,00	343.718.789,00	76,49
B		Belanja Bantuan Keuangan	241.354.956.600,00	241.354.955.600,00	100,00
	1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	241.354.956.600,00	241.354.955.600,00	100,00

*) Realisasi sementara sebelum audit BPK

1.3.7 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pada Tahun 2022 Penerimaan daerah dari pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp. 107.754.162.767,00** terealisasi **Rp. 107.754.162.767,06** atau **100 %**. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp. 6.867.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.3.032.000.000,00** atau **44,15 %**. Kemudian Pembiayaan Netto ditargetkan sebesar **Rp. 100.887.162.767,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 104.722.162.767,06** atau **103,80 %** dengan uraian dalam Tabel 1.18 berikut ini.

Tabel 1.18
LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH
Realisasi Pembiayaan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

NO	Uraian		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	PEMBIAYAAN DAERAH		100.887.162.767,00	104.722.162.767,06	103,80
1	<u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>		107.754.162.767,00	107.754.162.767,06	100,00
	A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.754.162.767,00	107.754.162.767,06	100,00
	1	Penghematan Belanja	107.754.162.767,00	107.754.162.767,06	100,00
2	<u>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</u>		6.867.000.000,00	3.032.000.000,00	44,15
	A	Penyertaan Modal Daerah	6.867.000.000,00	3.032.000.000,00	44,15
	1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.867.000.000,00	3.032.000.000,00	44,15
3	PEMBIAYAAN NETTO		100.887.162.767,00	104.722.162.767,06	103,80

*) Realisasi sementara sebelum audit BPK





BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 kemudian dijadikan dasar dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan amanat dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun sebelumnya. Dokumen Perubahan KUA ini selanjutnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161, disebutkan bahwa dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya adalah:

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
4. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran



- antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadikan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2022 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2022. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :

- Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
- Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomidaerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
- Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
- Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
- Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
- Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
- Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
- Penutup



1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA TAHUN 2022

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022;
- 2) Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- 3) Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- 4) Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
- 5) Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
- 6) Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA TAHUN 2022

Dasar regulasi yang menjadi landasan hukum dari penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

II. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu: **“Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah”**. Hal ini telah sesuai dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada serentak tahun 2020. Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
3. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berda saing kepariwisataan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.



5. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing
6. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat BasandiSyara' – Syara Basandi Kitabullah.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,akuntabel serta berkualitas.

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022. Perubahan Kebijakan KUA APBD ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif dalam melakukan penyesuaian karena adanya tuntunan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Berpedoman kepada Rancangan RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka RKPD Kabupaten Tahun 2022 disusun dengan tema : **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Lebih Bermartabat”**.

Berdasarkan tema yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2022, maka fokus pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan menjadi 4 (empat) prioritas yakni :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada layanan kesehatan, layanan pendidikan dan daya saing generasi muda.

Strategi yang akan dilakukan untuk fokus layanan kesehatan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,
- 2) Peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat.

Strategi untuk fokus layanan pendidikan adalah :

- 1) Peningkatan sarana dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan,
- 2) Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.



Sementara strategi untuk fokus daya saing generasi muda yaitu :

- 1) Mempersiapkan bonus demografi yang berdaya saing,
 - 2) Meningkatkan budaya literasi.
2. Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, *e-government* dan kemudahan investasi. Strategi untuk fokus reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan implementasi reformasi birokrasi. Strategi pelaksanaan *e-government* adalah :
- 1) Menyediakan regulasi keterbukaan informasi dan pelayanan,
 - 2) Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel,
 - 3) Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai. Strategi untuk kemudahan investasi adalah dengan mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Strategi untuk fokus optimalisasi sektor unggulan adalah dengan meningkatkan produk unggulan daerah. Strategi peningkatan nilai tambah komoditi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi unggulan. Untuk fokus perluasan kesempatan kerja akan dilakukan dengan :
- 1) Meningkatkan peluang kesempatan kerja,
 - 2) Mengembangkan wirausaha muda.
4. Dukungan infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana dengan fokus konektivitas, mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang akan dilakukan untuk fokus konektivitas adalah dengan mengembangkan layanan telekomunikasi. Fokus mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan strategi meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2022 antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan pada sisi Pendapatan

1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun 2022 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2022. Adapun kebijakan Pendapatan



Daerah pada perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 memperhatikan hal-hal berikut :

1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022.
2. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25 /Pmk.07 /2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.
3. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/Pmk.07 /2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
4. Penyesuaian atas dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-604-2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Penyesuaian hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp29.096.685.531,00 menjadi Rp1.658.368.465.398,00 yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp132.817.216,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp28.963.868.315,00.

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 132.817.216,00. Dari empat komponen pembentukan PAD yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp428.870.014,00, Retribusi Daerah sebesar Rp45.245.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar



Rp488.100.000,00. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp829.398.298,00.

Perkiraan kenaikan Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena :

1. Kenaikan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBB-P2, dan BPHTB-Pemindahan Hak.
2. Kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan.
3. Kenaikan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain, serta Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

2.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana Desa.

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp1.444.913.913.543,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.473.877.781.858,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp28.963.868.315,00 dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2022. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya dana lebih bayar dan dana kurang bayar bagi hasil pusat serta dana bagi hasil dari provinsi.

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Untuk estimasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada perubahan APBD 2022 tidak mengalami perubahan.

Untuk gambaran terhadap proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Proyeksi Pendapatan Daerah KUPA Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Estimasi Perubahan 2022
PENDAPATAN DAERAH	1,629,271,779,867.00	1,658,368,465,398.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139,438,682,516.00	139,571,499,732.00
Pajak Daerah	27,141,310,000.00	27,570,180,014.00
Retribusi Daerah	4,491,798,750.00	4,537,044,250.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,595,517,000.00	9,766,118,702.00
Lain-lain PAD yang Sah	97,210,056,766.00	97,698,156,766.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,444,913,913,543.00	1,473,877,781,858.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,384,235,134,000.00	1,377,268,237,554.00
Dana Perimbangan	1,223,213,569,000.00	1,216,246,672,554.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19,488,321,000.00	25,456,506,710.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	777,545,595,000.00	777,545,595,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	173,793,191,000.00	161,014,608,844.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	252,386,462,000.00	252,229,962,000.00
Dana Desa	161,021,565,000.00	161,021,565,000.00
Dana Desa	161,021,565,000.00	161,021,565,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60,678,779,543.00	96,609,544,304.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44,919,183,808.00	44,919,183,808.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	44,219,183,808.00	44,219,183,808.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	700,000,000.00	700,000,000.00

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022*

*Unaudited BPK



Sebagai bahan pembandingan terhadap estimasi perubahan yang dilakukan, terlampir data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan semester I (satu) pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Semester I (Januari – Juni 2022)

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan Daerah	1.629.271.779.867,-	679.087.052.155,91,-	41,68
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	139.438.682.516,-	73.058.568.190,91	52,39
	- Pajak Daerah	27.141.310.000,-	12.149.914.685,-	44,77
	- Retribusi Daerah	4.491.798.750,-	1.693.122.918,-	37,69
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.595.517.000,-	9.766.118.702,-	92,17
	- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	97.210.056.766,-	49.449.411.885,91	50,87
2	Pendapatan Transfer	1.444.913.913.543,-	595.951.480.914,-	41,24
	a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.235.134.000,-	587.412.776.393,-	42,44
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	19.488.321.000,-	4.917.632.950,-	25,23
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	777.545.595.000,-	388.071.484.000,-	49,91
	- DAK Fisik	173.793.191.000,-	21.069.995.750,-	12,12
	- DAK Non Fisik	252.386.462.000,-	88.721.017.253,-	35,15
	- Dana Desa	161.021.565.000,-	84.632.646.440,-	52,56
	b Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.678.779.543,-	8.538.704.521,-	14,07
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.919.183.808,-	10.077.003.051,-	22,43

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022*

*Unaudited BPK

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah sampai semester I (Januari-Agustus 2022) terealisasi sebesar 52,39%. Sedangkan pendapatan transfer terealisasi sebesar 41,24%, lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 22,43%. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, optimis



dalam mencapai target pendapatan daerah terutama dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dapat digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Perubahan pada Sisi Belanja, yaitu sebagai berikut :

Untuk tahun 2022, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.160.567.420.971,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp1.161.653.832.894,00.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2022. Jumlah belanja modal pada perubahan APBD 2022 ini bertambah menjadi Rp268.732.935.634,00 jika dibandingkan dengan APBD awal. Penambahan tersebut ditujukan untuk kegiatan pembangunan jalan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pada perubahan APBD 2022, jumlah belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp83.537.805.832,00 dari pagu awal APBD 2022



Rp5.345.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan adanya dana *earmark* SiLPA sebesar Rp78.192.805.832,00.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer pada perubahan APBD tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari awal APBD 2022.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah T.A 2022

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Estimasi Perubahan 2022
BELANJA DAERAH	1,659,976,410,410.00	1,759,255,628,165.06
BELANJA OPERASI	1,160,567,420,971.00	1,161.653.832.894.06
Belanja Pegawai	770,373,024,164.00	758,851,399,057.03
Belanja Barang dan Jasa	342,634,570,432.00	355,242,607,462.03
Belanja Hibah	47,559,826,375.00	47,559,826,375.00
BELANJA MODAL	248,732,935,634.00	268,732,935,634.00
Belanja Modal Tanah	2,645,120,943.00	2,645,120,943.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,082,240,982.00	74,082,240,982.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,246,491,037.00	36,246,491,037.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123,759,463,862.00	143,759,463,862.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,999,618,810.00	11,999,618,810.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,345,000,000.00	83,537,805,832.00
Belanja Tidak Terduga	5,345,000,000.00	83,537,805,832.00
BELANJA TRANSFER	245,331,053,805.00	245,331,053,805.00
Belanja Bagi Hasil	4,536,097,205.00	4,536,097,205.00
Belanja Bantuan Keuangan	240,794,956,600.00	240,794,956,600.00

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022*

*Unaudited BPK



BAB III
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan pendidikan pada tahun 2022 untuk Kegiatan Urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 605.505.552.009** dengan realisasi **Rp. 525.476.517.839,50** dengan tingkat realisasi mencapai angka 87,88% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	PENDIDIKAN		605.505.552.009	525.476.517.839,50
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	460.251.919.530	427.876.389.893
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.595.830	119.008.250
		2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah	457.221.459.380	424.942.259.908.50
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	106.746.480	106.612.450
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	551.664.381	522.792.700
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	961.664.909	931.558.727
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.402.180	830.394.581
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.386.370	423.763.276
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	143.902.362.033	96.254.102.107



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.950.130.443	63.517.699.199
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.284.783.786	20.475.393.770
		3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	9.762.032.524	8.835.447.708
		4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3.272.686.596	3.207.717.790
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	99.149.870	97.423.500
		1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar	99.149.870	97.423.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	501.200.666	498.177.465
		1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah	188.999.830	188.790.450
		2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	312.200.836	309.387.015
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	564.999.940	564.640.000
		1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/Kota	564.999.940	564.640.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	185.919.970	185.784.875



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	185.919.970	185.784.875

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	62,92	63,48	138,75
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	110,52	101,63	81,88
			APK SMP	86,48	102,28	96,70
			APM SD	99,53	91,27	99,00
			APM SMP	80,43	82,6	91,04
Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata lama sekolah	8,27 Tahun	8,27 Tahun	29,16		
2	Meningkatkan Daya saing Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A	65	11,13	11,13
			Inovasi Pendidikan	1	1	100
3	Revitalisasi Kekayaan budaya, Kearifan local dan sejarah		Jumlah seni budaya yang dilestariakn	3	10	91,9
4	Meningkatnya Benda Cagar Yang Dilestarikan		Jumlah Cagar budaya yang lestari	20	24	88,9



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Meningkatkan Akses Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

1. APK PAUD (Target Kinerja : 62,92%) (Realisasi Kinerja : 63,48 %) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2022), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Ruang Kelas PAUD . Jumlah Dana Rp.369.770.750 dan Terealisasikan Sebesar Rp.368.770.750 (99%)
 - Kegiatan pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD . Jumlah Dana Rp.235.175.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.235.175.000 (100%).
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD . Jumlah Dana RP.141.839.250 dan Terealisasikan sebesar Rp.135.043.000 (95%)
 - Kegiatan Pengadaan alat Parktik dan Peraga Siswa PAUD . Jumlah dana Rp.310.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.259.205.140 (83,61%)
 - Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi satuan PAUD. Jumlah Dana Rp.36.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.31.500.000 (87,50%)
 - Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Sebanyak 4 kali Kegiatan. Jumlah dana Rp.297.759.428 dan Terealisasikan Sebesar Rp.297.059.050(99,76%)
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sebanyak 1 kali.Jumlah Dana Sebesar Rp.75.087.300 dan Terealisasikan sebesar Rp.73.691.849 (100%)
 - Kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD dengan kegiatan ini Tersedianya Biaya Operasional non personalia bagi satuan PAUD Sebanyak 1 Paket. Jumlah dana Sebesar Rp.7.982.400.000 Tersealisasi Sebesar Rp.7.123.335.000 (89,24%)



- Kegiatan Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Dana Rp.314.000.796 dan terealisasikan Sebesar Rp.311.667.919 (99,26%)
- 2. APK SD (Target Kinerja : 110,52%) (Realisasi Kinerja : 101,63%)
- 3. APK SMP (Target Kinerja : 86,48%) (Realisasi Kinerja : 102,28%)
- 4. APM SD (Target Kinerja : 99,53%) (Realisasi Kinerja : 91,27%)
- 5. APM SMP (Target Kinerja : 80,43%) (Realisasi Kinerja : 82,6%) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Penambahan Ruang kelas baru dengan jumlah dana Sebesar Rp.1.092.843.020 dan Terealisasikan sebesar Rp.1.082.157.000 (99,02%)
 - Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah,dengan output terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar.Jumlah dana Rp.186.963.000 Dan Terealisasikan sebesar Rp.186.963.000 (100%)
 - Kegiatan pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. Jumlah Dana Rp.425.459.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.425.155.300 (99,93%)
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Dengan Dana Sebesar Rp.1.273.831.274 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.071.423.926 (84,11%)
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.635.000.000 dan Terealisasi Rp.566.153.550 (989,16%)
 - Kegiatan pengadaan Mebel Sekolah,Dengan Output Ini Terpenuhinya meja belajar Sekolah dasar. Jumlah Dana Rp.1.903.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.862.772.700 (97,89%)
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sekolah dasar Sebanyak 2 Paket. Jumlah dana Rp.538.200.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.538.200.000 (100%)
 - Kegiatan Penyediaan Biaya personil Peserta Didik Sekolah dasar dengan Output Sebanyak 18 sekolah . Jumlah Dana



Rp.3.316.905.640 dan Terealisasikan Sebesar Rp.3.272.795.752 (98,67%)

- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama
 - Kegiatan Penambahan Ruang Kelas baru dengan dana sebesar Rp.863.000.000 dan Terealisasikan sebesar Rp.863.000.000 (100%)
 - Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/kepala dengan dana sebesar Rp.450.000.000 dan terealisasikan Rp.450.000.000 (100%)
 - Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan dana sebesar Rp.315.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.315.000.000(100%)
 - Kegiatan Pembangunan laboratorium Sekolah dengan dana sebesar Rp1.640.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.1.640.000.000 (100%)
 - Kegiatan Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah dengan dana sebesar Rp.370.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.370.000.000 (100%)
 - Kegiatan Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 4 Sekolah. Jumlah Dana Rp.2.711.919.500 dan Terealisasikan Sebesar Rp.2.213.562.000 (81,62%)
 - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar dengan dana sebesar Rp.405.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.405.000.000(100%)
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan output 9 Sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.540.000.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.533.599.500 (98,81%)
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah,Dengan output ini Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah menengah Pertama Dengan Dana Sebesar Rp.22.734.760 dan terealisasi Rp.22.402.575 (98,54%)
 - Kegiatan Pengadaan perlengkapan siswa dengan dana sebanyak Rp.250.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.244.458.000 (97,78)
 - Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama dengan dana Rp.2.217.940.000 dan terealisasikan Rp.2.089.249.518 (94,20%)
 - Pengadaan alat Praktik dan Peraga siswa Sekolah Menengah Pertama. Jumlah Dana Rp.692.000.000 dan Terealisasikan sebesar Rp.688.568.000 (99,50%)

Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD



dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan dana Sebesar Rp.85.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.85.000.000 (100%)
 - Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dengan nonformal/kesetaraan.Jumlah Dana Rp.150.284.310 dan terealisasi Sebesar Rp.147.805.710 (98,35%)
 - Kegiatan Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 4 kegiatan dengan dana Rp.125.030.970 dan Terealisasi Sebesar Rp.115.955.720 (92,74%)
 - Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan Dana Sebesar Rp.2.545.100.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.3.076.800.000

Revitalisasi Kekayaan budaya, Kearifan local dan sejarah, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional, dengan indikator kinerja yaitu:
 - Program Pengembangan Kebudayaan , Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah
 - Kegiatan Pembinaan sumber daya manusia,Lembaga,dan Pranata Kebudayaan Dengan Output ini terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia,lembaga, dan pranata Kebudayaan dengan dana Rp.188.999.830 dan terealisasi sebesar Rp.188.790.450. (99,89%)
 - Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya, dengan output ini Terlaksananya event Kebudayaan dengan mengusung kebudayaan daerah demi penguatan budaya daerah Pesisir Selatan dengan Dana Sebesar Rp.312.200.836 dan Terealisasi Sebesar Rp.309.387.015 (99,10%)
 - Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan output kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelaku dalam daerah kabupaten/kota
 - Kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian Tradisional dengan dana sebesar Rp.564.999.940 dan terealisasi Rp.564.640.000 (99,94%).



- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya, Terlaksananya kegiatan Perawatan Cagar Budaya dengan Dana Sebesar Rp.185.919.970 dan Terealisasi sebesar Rp.185.784.875 (99,94%).

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Nb. Permasalahan :
1. Kelebihan tenaga pendidik untuk beberapa mata pelajaran serta kekurangan guru untuk mapel lainnya pada satuan pendidikan SMP serta kekurangan tenaga pendidik yang PNS pada satuan pendidikan SD;
 2. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 khususnya guru SD;
 3. Kondisi sarana Prasarana Sekolah masih ada yang kurang maupun dalam kondisi rusak;
 4. Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya;
 5. Keterbatasan sumber daya dalam mengelola kebudayaan; dan
 6. Keterbatasan akses internet di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan guna mendukung Pembelajaran Jarak jauh.

- Solusi :
1. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan pengusulan mutasi dan rotasi guru melalui BKPSDM kabupaten pesisir selatan;
 2. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah memfasilitasi guru yang belum memiliki ijazah S1 untuk kuliah melalui jalur Universitas terbuka (UT) Serta melakukan pengusulan tunjangan kualifikasi melalui kementerian pendidikan kebudayaan ,riset dan Teknologi;
 3. Dinas pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Maupun Dana APBD pada tahun 2022; dan



4. Salah satu upaya dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mempermudah akses pelayanan pendidikan dengan mengusulkan siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Serta menyediakan biaya Operasional berupa alat angkutan apung bermotor di kawasan kapo-kapo kecamatan koto XI tarusan untuk memfasilitasi siswa SD maupun SMP untuk bersekolah di sungai nyalo tarusan;

2. DINAS KESEHATAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan kesehatan pada tahun 2022 untuk Kegiatan Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **160.948.946.853,-** dengan realisasi keuangan **Rp. 146.272.307.095,-** atau **90,88 %** dan realisasi fisik **99.20 %** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Kesehatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	97.234.727.283,-	91.242.580.066,-
		2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.445.311.225,-	52.873.761.886
		3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2.570.190.985,-	1.765.344.543,-
		4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	315.416.360,-	143.793.300,-
		5. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan blud puskesmas	383.301.000,-	246.827.300,-

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	SASARAN	TARGET DAN SATUAN	REALISASI
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	A	
	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kematian pada kelompok rentan, : 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Anak (AKB)	145/100.000 KH 12/1.000KH	
	3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan indikator : Persentase Kepuasan Masyarakat	78 %	82,64 %
	4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman			
	5. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan blud puskesmas	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat : Persentase Kepuasan Masyarakat	75 %	81 %

- Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Menurunkan angka kematian usia rentan, dengan indicator kinerja yaitu

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan keselamatan Ibu dan anak, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak, dengan indicator Persentase K1 dan K4.

(2) Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasek dan Usek) dengan indicator Persentase Usia Pendidikan Dasar yang diberikan pelayanan Kesehatan.



- (3) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik dengan indicator Persentase Usia Pendidikan Dasar yang diberikan pelayanan Kesehatan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), dengan indicator Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan
 - (2) Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan, dengan indicator Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
 - (3) Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping), dengan indicator Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, dengan indicator Persentase keluarga Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan jaringannya termasuk pada daerah terpencil
 - (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan indicator Jumlah fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk posko-posko kesehatan dalam rangka hari raya dan even-even daerah.
 - (3) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (BOK DAK Non Fisik), dengan indicator Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat.
 - Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, dengan indicator Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina.
 - (2) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (DAK Non Fisik), dengan indicator Persentase Bahan Kesehatan yang diadakan.
 - Program Perbaikan Gizi masyarakat



Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Peningkatan Gizi Masyarakat, dengan indicator Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indicator Jumlah pengawasan, pembinaan, Sanitasi dasar, TTU dan TPM

(2) Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), dengan indicator Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina.

(3) Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat, dengan indicator Jumlah Depot yang diperiksa.

(4) Pelaksanaan forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat, dengan indicator Jumlah Forum Kabupaten Sehat dan Kelompok Kerja Nagari yang dibina.

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik / Epidemik, dengan indicator tercegah dan tertanggulangnya penyakit menular pada masyarakat.

(2) Peningkatan Imunisasi, dengan indicator Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap.

(3) Peningkatan Surveillence Epidemiologi dan Penanggulangan wabah, dengan indicator surveillans epidemiologi penyakit menular & penanggulangan wabah di masyarakat.

- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Pengadaan Perangkat Sistem Informasi,

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)

(3) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan)

(4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya



- (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)
 - (6) Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
 - (7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas
 - (8) Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)
 - (9) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok)
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak menular
 - (2) Pemantauan dan Penanggulangan masalah Kesehatan matra
 - (3) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 - Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Operasional Pelayanan RSUD Tapan
 - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD
- b. Meningkatkan Mutu pelayanan Kesehatan, dengan indicator kinerja yaitu :
- Persentase Kepuasan Masyarakat, Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (Pendamping)
 - (2) Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (DAK Non Fisik)
 - (3) Pengelolaan dan Pembinaan Pegawai
 - (4) Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan
 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - (1) Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
 - (2) Pelayanan Kesehatan (Kapitasi dan Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - (1) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan



c. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat, dengan indicator :

1. Persentase Nagari Ber PHBS

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan :

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Kegiatan :

(1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

(2) Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM)

d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, dengan indikator

1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

a) Perubahan Juknis DAK Fon Fisik, di bulan Juni dan dananya dimasukan di perubahan anggaran, karena perpindahan antar sub kegiatan, sehingga pencairan dananya baru bisa dilaksanakan diakhir Oktober 2022.

2. Solusi

a) Diharapkan kepada kemenkes agar mengeluarkan Juknis di awal tahun dan tidak ada lagi perubahan Juknis di pertengahan tahun.

3. RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Adapun Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah sebesar 89,04% dengan Pagu Perubahan Anggaran sebesar Rp. 112.733.971.571 (seratus dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi Rp. 109.796.465.559 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Capaian Pelaksanaan masing-masing Program dan Kegiatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kesehatan	RSUD Dr. Muhammad	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Zein Painan	PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,987,290,379	23,263,279,482
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	79,974,902,419	77,784,056,566
			PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,866,419,829	4,866,361,317
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota		
			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,905,358,944	3,882,768,194

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi
1	2	3	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	96,98 %
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	97,26 %



	Masyarakat	Sub Kegiatan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat	25	1405
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	99.42 %

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS (Target Kinerja : Paripurna) (Realisasi Kinerja : 80 %). Untuk tahun 2022 tidak dilakukan evaluasi akreditasi dan direncanakan tahun 2023 sehingga capaian target tetap memakai capaian tahun 2020. Dimana penilaian akreditasi tersebut meliputi penilaian yang terdiri dari 16 Program Kerja dengan hasil penilaian Akreditasi Bintang 4 atau akreditasi Utama dengan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan terhadap beberapa pokja.

Hasil Penilaian masing-masing Elemen Akreditasi Tahun 2020

No	Nama Program Kerja Akreditasi	Bobot nilai
1.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	86.49%
2.	Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)	81.31%
3.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	71.26%
4.	Asesmen Pasien (AP)	84,05%
5.	Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)	82.05%
6.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	92.03%
7.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	86,18%
8.	Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)	78,26%
9.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	91,25%
10.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	79,41%
11.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	84,52%



12. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	85,71%
13. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)	83,85%
14. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)	81,82%
15. Program Nasional	84,21%
16. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit	88,10%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80 .

Dengan adanya 3 (tiga) Program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80%, maka hasil penilaian akreditasi masuk ke kategori UTAMA dimana apabila dari 16 bab yang disurvei ada 13 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 95,97%)
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Target kinerja : 100%) (realisasi kinerja : 90,79%)
- 2) Program Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota
 - Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja Jumlah masyarakat / pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan (target kinerja : 25 orang) (realisasi kinerja : 615 orang)
 - Sub Kegiatan Operasional pelayanan Rumah Sakit dengan indikator kinerja Persentase operasional pelayanan RS (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 54,32%)

Realisasi kinerja tidak maksimal dikarenakan kondisi pandemi covid19 di akhir2 tahun terjadi penurunan sehingga kegiatan dan pembelian BHP yang terkait dengan covid19 dihentikan.
 - a. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota



- Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 77,33%). Untuk pengadaan Alat kesehatan yang anggarannya bersumber dari DAK 2021 Sudah sesuai. Akan tetapi untuk pengadaan alat kesehatan yang peruntukannya untuk penanganan covid19 yang anggarannya bersumber dari APBD tidak semua terealisasi, dikarenakan kasus covid19 terjadi penurunan.
- Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pnedukung fasilitas pelayanan kesehatan (target kinerja : 100%, realisasi kinerja 98,17%)
- Sub kegiatan Pengadaan obat dan vaksin (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 32,76%). Untuk kegiatan ini adalah kegiatan yang diperuntuukan untuk penanganan covid19. Kinerjanya tidak tercapai maksimal karena kondisi pandemi covid19 menurun di akhir-akhir tahun.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota
 Sub kegiatan Pemenuhan Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai standar (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 95,81%)

Dari Uraian program dan kegiatan di atas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sehingga akan tercapai sasaran strategis yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yaitu Meningkatkan Pelayanan yang Bermutu dan profesional kepada masyarakat.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,061,370,509	11,694,220,377
I			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132,161,391	130,415,090	
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,120,072,567	9,844,369,519	



			II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25,937,450	22,520,200
			IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342,424,033	323,988,674
			V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681,280,588	640,581,823
			VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759,494,480	732,345,071
			B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21,575,951,646	17,839,968,635
			I	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,496,993,405	8,396,547,048
			II	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,078,958,241	9,443,421,587
			C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,998,238,790	6,905,713,607
			I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6,998,238,790	6,905,713,607
			D	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1,316,142,749	1,279,871,670
			I	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1,316,142,749	1,279,871,670
			E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,237,006,756	4,164,994,903
			I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,237,006,756	4,164,994,903
			F	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6,123,351,645	5,998,382,395
			I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,123,351,645	5,998,382,395
			H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2,818,168,335	2,727,185,336



			I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2,818,168,335	2,727,185,336
			I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,305,526,889	2,209,920,760
			I	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2,305,526,889	2,209,920,760
			J	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	129,185,258,177	127,710,293,866
			I	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	129,185,258,177	127,710,293,866
			K	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	293,679,940	257,811,118
			L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	932,649,160	918,608,944
			I	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	578,440,990	573,374,403
			II	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	172,521,390	168,453,090
			II I	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	181,686,780	176,781,451
					187,847,344,596	181,706,971,611

- SASARAN STRATEGIS PK KEPALA OPD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut) x 100%	Persen	31,90	32,34
2.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	(Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih : Jumlah Seluruh Rumah Tangga) x 100%	Persen	97,16	89,37



3.	Persentase Akses Sanitasi Layak	(Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Seluruh Rumah Tangga) x 100%	Persen	76,74	76,52
4.	Rasio luas daerah irigasi yang dilalui jaringan irigasi	(luas daerah irigasi yg dibangun : luas irigasi seluruhnya) x 100% =	Persen	60,75	60,75
5.	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang dibangun / pertahun dipelihara selama 5 tahun	Unit	4	4
6.	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	A	A

- **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

1. **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan**

Dengan indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

(target kinerja 29.90 %) dan (Realisasi Kinerja 29.55 %)

b. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

(target kinerja 45.66 %) dan (Realisasi Kinerja 42 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
2. Pemeliharaan Rutin Jalan
3. Pemeliharaan Rutin Jembatan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19/ Dana Insentif Daerah)

- **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan/ Peningkatan Jalan
3. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Bayang



4. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Nagari Bayang Utara
 5. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Jurai
 6. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Batang Kapas
 7. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang
 8. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir
 9. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Pancung Soal
 10. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. BAB Tapan
 11. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. RAH Tapan
 12. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lunang
 13. Penunjang DAK Peningkatan Jalan
 14. Pembangunan Jembatan Rangka
 15. Pembangunan Jembatan Beton
 16. Pembangunan Jembatan Gantung
 17. Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah
 18. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)
 19. Pembangunan/ Peningkatan Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan** dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengadaan Alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
 2. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
 3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
 4. Operasional laboratorium
 - **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong** dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan/ peningkatan saluran drainase/ gorong-gorong jalan
 2. Pemeliharaan Rutin Drainase/ Gorong-gorong Jalan
 3. Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jalan
 - **Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan** dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)
 - **Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan** dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat



2. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

2. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Dengan indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih

b. Persentase Akses Sanitasi Layak

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
2. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)
3. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan)
4. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
5. Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG)
6. Penunjang Air Minum (DAK)
7. Penunjang Sanitasi DAK
8. Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
9. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi) Luncuran TA. 2021
10. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) Luncuran TA. 2021

- **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pamsimas Reguler
2. Penunjang Kegiatan Pamsimas
3. Pengembangan Program Hibah Air Minum

- **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional tempat pembuangan akhir
2. Operasional kebersihan dan persampahan
3. Pemeliharaan rutin dan Operasional kendaraan kebersihan
4. Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir

- **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional IPLT
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangunan Kantor Pemerintah



3. **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang**

Dengan indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan

b. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Perencanaan Tata Ruang**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

- **Program Pemanfaatan Ruang**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
2. Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang
3. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

- **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan RTH
2. Operasional Pertamanan

4. **Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

Dengan indikator kinerja yaitu :

c. Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik

(target kinerja 20 unit) dan (Realisasi Kinerja 10 unit)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah
2. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
3. Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM- CIPTA KARYA
4. Penyusunan Dokumen HSBGN
5. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
7. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ibadah

- **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

5. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



Dengan indikator kinerja yaitu :

a. Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat

(Target kinerja : nilai A)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan makanan dan minuman
 8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 10. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sinkronisasi Program DAK dan APBN
- **Program Pengaturan Jasa Konstruksi**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
 2. Pengawasan dan Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi
- **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
dengan kegiatan sebagai berikut :

Pemeliharaan pentas dan Tenda pariwisata



5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.560.858.803,00** dengan realisasi **Rp. 20.301.378.543,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **80,79%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	1	Perumahan Kawasan Permukiman	8,082,238,705	7,533,833,896
		Program Pengembangan Perumahan, Program kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
1	2	Urusan Lingkungan Hidup	12.388.023.352	12.113.866.822
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
		Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		
		Program keanekaragaman hayati (KEHATI)		
		Program Pengendalian B3 dan Limbah B3		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
		Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		
		Program Pengelolaan Persampahan		
		Program Perencanaan Lingkungan hidup		
	3	Urusan Pertanahan	349.993.154	325.339.954
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		
		Program Redistribusi Tanah serta ganti kerugian		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Program tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee		
		Program Penetapan Tanah Ulayat		
		Program Pengelolaan Tanah kosong		
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		
		Program Penatagunaan Tanah		

- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni	Program Perumahan Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	96,8363	96,9187	100,085 %
2	Terwujudnya Kepastian Hukum pemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan	Penyelesaian Izin Lokasi	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	68.554	66.452	96.480%
		Penyelesaian Sengketa tanah Garapan				
		Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				
		Program Distribusi Tanah serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				
		Penetapan tanah Ulayat				
		Pengelolaan Tanah Kosong				
		Penatagunaan Tanah				
3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.45	77.94	107.578 %
		Pengelolaan keanekaragaman hayati				
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3				
		Pengelolaan persampahan				



		Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pembangunan Lingkungan Hidup			
--	--	---	------------------------------	--	--	--

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah layak Huni, dengan indikator kinerja yaitu:

a. Rasio Rumah Layak Huni

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengembangan perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Urusan Penyelenggaraan Urusan perumahan

2. Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan

Program yang mendukung meningkatnya kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan adalah Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
- c. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

3. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah dikabupaten Pesisir Selatan

Program yang mendukung Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah dikabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- a. **Pengelolaan izin lokasi, dengan kegiatan :**
 - Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
- b. **Penyelesaian Sengketa tanah Garapan, dengan kegiatan :**



- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, dengan kegiatan :**
 - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dengan kegiatan :**
 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Penetapan tanah Ulayat, dengan kegiatan :**
 - Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Pengelolaan Tanah Kosong, dengan kegiatan :**
 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
- g. Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dengan kegiatan :**
 - Penerbitan Izin Membuka Tanah
- h. Penatagunaan Tanah.**
 - Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

Belum jelasnya regulasi yang mengatur beberapa urusan pertanahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota serta belum ada sinergisitas lintas sektoral yang mengelola urusan pertanahan

4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

Saat ini upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Pesisir Selatan, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing



indikator pada setiap Lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 IKLH dapat didapatkan sebagai berikut:

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,291 \times IKL)$

a. Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2021.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,291 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 61,82) + (0,405 \times 91,86) + (0,291 \times 70,12) \\ &= 23,24 + 37,20 + 20,40 \\ &= 80,84 \end{aligned}$$

IKLH = 75.80 (baik)

Keterangan

1. IKU = Indek Kualitas Udara
2. IKL = Indek Kualitas Lahan
3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kab. Pesisir Selatan pada angka 75.72 menunjukkan Lingkungan yang baik.

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup juga didukung dengan Indikator (2) Indeks Kualitas Udara dan (3) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) adalah:

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan
 - (1) Pencegahan pencemaran data atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan
 - (1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sebanyak 4 (Empaa) Program dan 4 (Empat) Kegiatan dengan anggaran dana



sebanyak Rp. 6.876.612.050.' Pada Program ini pada tahun 2021 untuk meningkatkan Indek Kualitas Lingkungan Hidup disamping menggalakkan pengurangan pemakaian sampah Plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di lingkungan sekitar dilakukan inovasi GELAR SAJADAH (Gerak Langkah Warga Sedekah Sampah Jadi Berkah), dimana inovasi ini adalah dengan menyediakan keranjang sebanyak 4 keranjang sampah pada tempat strategis dengan memilah jenis sampahnya sehingga masyarakat waktu melakukan sedekah sampah ke Keranjang/tong sampah telah terpilah, sampah-sampah yang telah terpilah (kertas,botol Plastik,dan sampah Ekonomis lainnya) setelah terkumpul lalu diantarkan ke Bank sampah yang ada di Nagari ,Masjid dan Sekolah dan akan di catat dalam tabungan sampahnya , hasil ekonomi dari sampah ini dipergunakan untuk biaya pembangunan masjid, kegiatan di Sekolah dan Nagari, makanya di namakan sedekah sampah.

5. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup

Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasan ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CS

Indikator ini didukung dengan

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan
 - (1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - (1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. SATPOL PP DAN DAMKAR

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.764.944.662,00 dengan realisasi Rp. 9.421.397.828,00 dengan tingkat realisasi mencapai angka 96,48 % dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
SATPOL PP DAN DAMKAR		9.764.944.662,00	9.421.397.828,00	96.48
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.817.627.584,00	6.546.253.720,00	94.25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.948.980,00	35.921.720,00	99.92
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.686.118.244,00	4.491.242.223,00	95.84
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.262.700,00	30.102.000,00	99.47
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.939.386,00	185.043.586,00	99.52
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.606.166.774,00	1.580.785.968,00	98.42
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.191.500,00	223.158.223,00	81,69
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	369.068.218,00	349.172.968,00	94.61



7	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	318.757.208,00	308.516.008,00	96.79
8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	50.311.010,00	40.656.960,00	80.81
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.578.248.860,00	2.525.971.140,00	97.97
9	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.578.248.860,00	2.525.971.140,00	97.97

- Sasaran Strategis PK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penegakan Perda/Perkada	1. Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Persentase penurunan Gangguan Trantibum	85%	93,34%	93,34%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0.85%	99,40%	99,40%

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Penegakan perda dan Perkada dengan indikator adalah sebagai berikut :

- 1). Presentase Penurunan gangguan trantibum yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPd dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - a). Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut :



- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 2). Presentase Pencegahan dan penyelamatan kebakaran yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- a). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

- a) Kurangnya personil Satpolpp dalam pengamanan Perda dan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak layak
- b) Keterbatasan SDM Personil Pemadam Kebakaran dan Mobil pemadam kebakaran yang tidak dapat mencukupi mengakibatkan lambatnya penanganan bahaya Kebakaran

2. Solusi

- a) Perlunya penambahan personil / anggota satpolpp



- b) Penambahan Sarana dan Prasarana untuk patroli
- c) Perlunya penambahan personil pemadam kebakaran serta mobil pemadam kebakaran disetiap kecamatan

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	9	10
	URUSAN Trantibum Linmas		4.758.567.833,00	4.603.046.296,00
1	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.066.294.250	1.037.562.937
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	107.952.250	85.644.250
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	36.919.850	36.346.500
		PROGRAM KESIAPSIAGAAN	1.738.300	1.738.300
		PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT	1.470.260.263	1.440.823.250
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA	39.101.350	31.598.750
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	63.664.050	63.633.300

8. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	223,738,790	221,252,534
2	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	87,889,110	87,552,225
3	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	3,494,773,716	2,867,111,625
4	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan korban bencana	74,548,870	74,235,950
5	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	109,482,900	109,285,250
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	636,221,230	627,132,466
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	67,300,976	32,489,150
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen profil gender	44,582,330	44,121,330

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	53%	53%	100
2	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	0.3%	0.3%	100
3.	Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	55.31	56.93	103
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	Inisiator	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yaitu:

Indikator : Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

(Target Kinerja : 53%) (Realisasi Kinerja : 53 %)

Merupakan jumlah pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), terdiri dari bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, PBI APBD, Program Keluarga Harapan, pemberian alat bantu kursi roda, pemberian bantuan korban bencana alam dan bencana sosial serta pelayanan orang terlantar. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Penanganan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan

Indikator: Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (target = 3%, realisasi 3 %)

Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dilihat dari jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang keluar (graduasi) dari penerima manfaat, baik karena indikatornya sudah tidak terpenuhi maupun karena keinginan sendiri. Adapun jumlah peserta penerima manfaat PKH yang mengalami graduasi adalah berjumlah 95 orang, jumlah keluarga penerima manfaat PKH adalah 20.950 dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.



- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan (target 55, 31; realisasi 56, 93)

Merupakan komposit keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan, pekerja perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender ini di rilis oleh BPS dalam Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender.

Adapun program yang menunjang pencapaian sasaran strategis ini adalah:

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.

d. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator : Prediket Kabupaten Layak Anak

(Target Kinerja : Inisiator) (Realisasi Kinerja : Inisiator)

Prediket Kabupaten Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah melalui penilaian dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPPA diantaranya Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Layak anak melalui lembaga-lembaga swasta, unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Adapun Program yang kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini diantaranya:

- a) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan :



- (1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota:
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota.
 - b) Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan:
 - (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c) Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan :
 - (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
 - (2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
- Permasalahan dan Solusi
- a. Permasalahan
 - 1) Masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran
 - 2) Adanya kelompok KUBE yang beralih usaha
 - 3) Masih adanya data penerima yang tidak valid
 - 4) Keterbatasan logistik bantuan untuk korban bencana
 - 5) Banyaknya penyandang cacat yang membutuhkan bantuan
 - b. Solusi
 - 1) Meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial secara berkala
 - 2) Pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok KUBE
 - 3) Verifikasi dan validasi data penerima



- 4) Menambah penyediaan logistik bantuan untuk korban bencana
- 5) Menambah cakupan pemberian bantuan bagi penyandang cacat

9. DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

Jumlah Belanja langsung pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2022 untuk kegiatan urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan transmigrasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.864.208.697 dengan realisasi Rp. 24.315.821.369 atau tingkat realisasi mencapai angka 97,79 %. Rincian capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Sekretariat Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	4.862.403.932	4.718.639.554
				Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase capaian realisasi keuangan Prog dan keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	3.981.563.845	3.877.055.864
			Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	316.439.705	315.043.852
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	31.006.000	31.006.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.521.672	269.430.580
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	227.872.710	226.103.258
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	1.569.781.891	1.556.861.750
			Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	954.961.271	949.276.100

			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	614.820.620	607.585.650
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	103.621.790	98.193.750
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	40.567.440	40.459.000
			Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Data perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya	26.147.900	22.173.000
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	36.906.450	35.561.750
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan omset Perdagangan	243.505.340	241.056.115
			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	243.505.340	241.056.115
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset perdagangan	47.128.270	46.269.450
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan volume penjualan komoditi unggulan daerah dalam negeri	47.128.270	46.269.450
2	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan omset IKM (%)	17.119.295.961	16.738.730.758
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	17.119.295.961	16.738.730.758

			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan omset IKM (%)	25.000.000	24.643.500
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25.000.000	24.643.500
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan omset IKM (%)	63.299.880	63.237.900
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	63.299.880	63.237.900
2	Transmigrasi	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan Transmigrasi	830.171.633	828.188.592
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	830.171.633	828.188.592

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan	6,2%	6%	97
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9	8,89	101
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan omset perdagangan	6,2%	6%	97



		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset perdagangan	6,2%	6%	97
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peningkatan omset IKM	2%	8,23%	412
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Peningkatan omset IKM	2%	8,23%	412
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Peningkatan omset IKM	2%	8,23%	412
			Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi (Website pemasaran produk, Asosiasi IKM, Galeri dan Pusat Informasi IKM, Retribusi Perdagangan secara Non Tunai, Membangun kemitraan untuk meningkatkan SDM)	4 inovasi	4 inovasi	100
2.	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	10	48	480
			Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan Transmigrasi	18	43	239
			Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi (Pemberdayaan	1 inovasi	1 inovasi	100



			Masyarakat Transmigrasi melalui Bumrag)			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah/kabupaten	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Sekretariat Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	100	100
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	100	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Perdagangan dan Transmigrasi**

a. Meningkatkan Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

1. Persentase peningkatan omset perdagangan (Target kinerja : 6,2%) (Realisasi Kinerja : 6%)

Omset perdagangan merupakan jumlah nilai penjualan yang diperoleh pedagang secara keseluruhan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang pasar rakyat, pedagang komoditi unggulan daerah, pedagang pengumpul, pedagang produk unggulan daerah dan pedagang minimarket. Nilai omset pedagang pasar rakyat diukur melalui metode sampel terhadap lebih dari 80% pedagang di pasar rakyat yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Peningkatan sarana distribusi perdagangan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI.



- 2) Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI.

Terdapat 13 (tiga belas) kriteria pasar SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Hingga tahun 2021, belum satupun pasar di Kabupaten Pesisir Selatan yang memenuhi ke-13 kriteria tersebut, dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi menetapkan kriteria pasar yang berpotensi untuk menjadi Pasar SNI, yaitu *Pasar Rakyat menuju kriteria SNI*, pasar rakyat yang dapat memenuhi minimal 6 (enam) kriteria dari 13 (tiga belas) kriteria tersebut, dapat dikategorikan sebagai *Pasar Rakyat menuju Kriteria SNI*. Hingga saat ini terdapat 1 (satu) pasar yang memenuhi 6 kriteria SNI yaitu Pasar Kambang.

- Prog. Standarisasi dan perlindungan konsumen sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan output kegiatan ini adalah Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku
Pada tahun 2022, pelaksanaan tera tera ulang berlangsung di beberapa pasar dan puskesmas, dengan target UTTP yang ditera adalah sebesar 140 UTTP dan realisasi sebesar 387 UTTP, sehingga capaian jumlah UTTP yang terdata mencapai 276%
- Prog. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Output dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan volume penjualan komoditi unggulan daerah dalam negeri dengan target sebesar 2% dan capaian sebesar 2%.
- 2. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Target kinerja : <9 %) (Realisasi Kinerja : 8,89%)
Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting diperoleh dengan menghitung Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok. Dalam hal ini, terdapat 11 (sebelas) varian data komoditas bahan pokok yang



digunakan dalam perhitungan ini. Data komoditas bahan pokok diperoleh melalui survey langsung ke pasar rakyat.

Untuk mencapai target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten / Kota. Output dari kegiatan ini adalah persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 82,48%.
- 2) Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen data perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 4 dokumen
- 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten / Kota. Output dari kegiatan ini adalah Persentase kinerja realisasi pupuk dengan realisasi kinerja adalah sebesar 18,97%, hal ini melebihi target kinerja sebesar 16,2%

3. Persentase peningkatan omset IKM (Target kinerja : 2%) (Realisasi Kinerja : 8,23%)

- Prog. Perencanaan dan pembangunan industri sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dengan output kegiatan ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Di Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada penerapan RPIK yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2019. Pada tahun 2021, penerapan RPIK dilaksanakan dengan pembangunan Sentra IKM Minyak Atsiri di Kecamatan Lunang dan Kegiatan penguatan kelembagaan Sentra IKM yang dilaksanakan pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan



menggunakan DAK-APBN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

- Prog. Pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota sebagai berikut :

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan output kegiatan ini adalah Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Prog. Pengelolaan sistem informasi industri nasional sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini

b. Meningkatkan kemandirian Kawasan Transmigrasi yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya di kawasan transmigrasi (Target Kinerja : 10 lembaga) (Realisasi Kinerja : 48 lembaga)

2. Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi (Target Kinerja : 18 unit) (Realisasi Kinerja : 43 unit)

Untuk mencapai target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai berikut :

(1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan.

Pada tahun 2022, pengembangan satuan permukiman hanya diarahkan dengan melakukan penguatan infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan, yaitu kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana berupa jembatan penghubung jalan poros desa di kawasan Transmigrasi dan persiapan DED pembangunan 4 (empat) jalan poros desa di Kawasan Transmigrasi, yang rencana pembangunannya akan dilaksanakan dengan anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2023. Kemudian dalam hal penguatan SDM



transmigran dilaksanakan pelatihan manajemen kelembagaan terhadap 20 Kepala Keluarga transmigran.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yaitu:

1. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (Target kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mencakup 2 (dua) hal yaitu (1) kualitas pelayanan internal Dinas, dalam hal ini merupakan tanggung jawab bagian umum dan kepegawaian, serta (2) kualitas perencanaan, dalam hal ini tanggung jawab sub substansi perencanaan, keuangan dan pelaporan. Pada tahun 2022, penunjang urusan dinas hanya diarahkan dalam pelayanan internal yang meliputi :

- Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase capaian realisasi keuangan Prog dan keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
 - (2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
 - (3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
 - (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022 dengan beberapa Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga



Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.984.810.776,00- terealisasi sebesar Rp. 11. 854.399.863,00- atau 84,20% Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
	a.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	4.990.018.034	4.879.869.740
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.108.995.902	4.026.586.375
	b.			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.148.262	333.241.547
	c.			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.326.770	202.559.470
	d.			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.547.100	317.482.348
A . 1.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kerjasama Desa	36.793.600	36.549.200
	a.			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	36.793.600	36.549.200
2.				Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.344.076.058	2.255.919.016
	a.			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.344.076.058	2.255.919.016

3.				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	608.572.534	605.174.050
	a.			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	608.572.534	605.174.050
B.	1.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	134.745.000	109.430.830
	a.			Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	134.745.000	109.430.830
	2.			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.429.917.600	2.399.428.700
	a.			Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.027.547.950	701.603.200
	b.			Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	873.600.000	620.800.000
	c.			Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	608.592.150	528.597.750
	d.			Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	920.177.500	548.427.750
3.				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.194.160.000	1.250.440.000



	a.			Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.194.160.000	1.250.440.000
--	----	--	--	--	---------------	---------------

- Sasaran Kepala OPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI
1.	Meningkatnya Nagari Mandiri	Persentase Nagari Mandiri	6,04% (11 Nagari)	9,89% (18 Nagari)
		Persentase Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari diatas Rp. 10.000.000	2,75% (5 Nagari)	4,39% (8 Nagari)
		Inovasi Bidang Pemerintahan Nagari : Pengawasan dan penanganan permasalahan nagari	1 Inovasi	0
2.	Menurunkan Laju Pertumbuhan penduduk	Menurunnya Persentase Anak yang dilahirkan oleh PUS	2,82%	2,88%
		Inovasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Pengawasan dan Pencegahan Stunting di Nagari melalui Elsimil Catin	1 Inovasi	0

- Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Meningkatkan Nagari Mandiri

Dinas PMDPPKB sebagai OPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai indikator kinerja kunci/IKK outcomenya adalah :

1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, yang terdapat pada program :

A. Program Peningkatan Kerjasama Desa, Dengan indikator kinerja terlaksananya kerjasama desa dengan target kinerja 12 bulan dan realisasi 12 bulan. Anggaran Program Rp. 36.793.600,- Realisasi Rp.36.549.200,- (99,34 %)

Kegiatan :



Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan indikator jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa, target 15 dan terealisasi 15; dan

Sub kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 36.793.600,- dan terealisasi Rp.36.549.200,- (99,34 %)

- B. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran program Rp. 2.344.076.058,- Realisasi Rp. 2.255.919.016,- (96,24 %)

Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Dengan indikator kinerja Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, target 861 kali dilakukan pembinaan dan pengawasan selama tahun anggaran 2022 dan realisasi 880 kali.

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa, pagu anggaran Rp. 2.058.436.000,- realisasi Rp. 1.976.312.001,- (96,01 %)
 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, pagu anggaran Rp. 35.499.854,- realisasi Rp. 35.313.950,- (99,48 %)
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pagu anggaran Rp. 67.032.700,- realisasi Rp. 64.231.520,- (95,82 %)
 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa pagu anggaran Rp. 41.125.000,- realisasi Rp. 40.413.895,- (98,27 %)
 5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Rp. 56.482.600,- realiasasi Rp. 56.114.600,- (99,35 %)
 6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Rp. 15.499.902,- realisasi Rp. 15.219.500,- (98,19 %)
 7. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa pagu anggaran Rp. 31.845.000 ,- realisasi Rp. 31.019.250,- (97,41 %)
 8. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pagu anggaran Rp. 18.155.000,- realisasi Rp. 17.478.800,- (96,28 %)
 9. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, pagu anggaran Rp. 20.000.002,- realisasi Rp. 19.815.500,- (99,08 %)
- C. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator kinerja jumlah dasawisma maju target 270 realisasi 270. Anggaran Program Rp. 608.572.534,- Realisasi Rp. 605.174.050,- (99,44 %).



Kegiatan :

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota,

Indikator Kinerja Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif target 270 realisasi 270 pagu anggaran Rp. 608.572.534,- realisasi Rp. 605.174.050,-

Sub Kegiatan :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat indikator kinerja Jumlah dokumen hasil identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat target 25 dokumen realisasi 25 dokumen pagu anggaran Rp. 20.899.954 ,- realisasi Rp. 20.766.600,- (99,36 %).
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya, target 68 realisasi 65 pagu anggaran Rp. 49.232.710,- realisasi Rp. 48.472.950,- (98,46 %).
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa indikator kinerja Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
4. Target 161 realisasi 160 pagu anggaran Rp. 40.563.250,- realisasi Rp. 40.317.950,- (99,40 %).
5. Sub kegiatan Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat indikator kinerja Jumlah laporan hasil Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat target 1 laporan realisasi 1 laporan pagu anggaran Rp. 101.930.000,- realisasi Rp. 101.091.750,- (99,18 %).
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga indikator kinerja Jumlah dokumen



hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga target 15 realisasi 15 pagu anggaran Rp. 395.946.620,- realisasi Rp. 394.524.800,- (99,64%).

b. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran strategis yang kedua adalah Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator menurunnya persentase anak yang dilahirkan oleh Pasangan Usia Subur, target 2,82% capaian 2,88% Terdapat pada program :

A. Program Pengendalian Penduduk dengan pagu anggaran program Rp. 134.745.000,- Realisasi Rp. 109.430.830,- (81,21 %)

Kegiatan :

Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota, indikator kinerja Jumlah pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah, target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen.

Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi keluarga, indikator kinerja Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia. Target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen pagu anggaran Rp. 2.745.000,- realisasi Rp. 2.745.000,- (100%).
2. Sub Kegiatan Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB, Indikator kinerja Persentase angka kelahiran total (TFR) target 12 realisasi 12 pagu anggaran Rp. 132.000.000,- realisasi Rp. 106.685.830,- (80,82%).

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp.3.429.917.600,- Realisasi Rp. 2.399.428.700,- (69,96%)

Kegiatan :

Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah jenis media KIE yang diadakan target 600 media KIE capaian 492 Pagu anggaran Rp. 1.027.547.950,- realisasi Rp. 701.603.200,- (68,28%)

Sub kegiatan :

1. Advokasi kepada Stakeholders dan mitra kerja indikator kinerja Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan KB) kepada Stakeholders dan mitra kerja target 1 organisasi capaian 1



organisasi pagu anggaran Rp. 4.375.000,-realisasi Rp. 4.375.000,- (100%).

2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal indikator kinerja Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal target 1 dokumen capaian 1 dokumen pagu anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 25.000.000,- (100%).
3. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pagu anggaran Rp. 70.640.000,- realisasi Rp. 62.600.000,- (88,62%).
4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok) pagu anggaran Rp. 234.000.000,- realisasi Rp. 70.252.000 (30,02%).
5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pagu anggaran Rp. 607.500.000 ,- realisasi Rp. 454.211.500,- (74,77%).
6. Pengendalian Program KKBPK pagu anggaran Rp. 86.032.950 realisasi Rp. 85.164.700,- (98,99%).

Kegiatan :

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan anggaran Rp. 873.600.000,- realisasi Rp. 620.800.000 (71,06%).

Sub Kegiatan :

1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pagu anggaran Rp. 873.600.000,- realisasi Rp. 620.800.000,- (71,06%)

Kegiatan :

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan anggaran Rp. 608.592.150,- realisasi Rp. 528.597.750,- (86,86%).

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya anggaran Rp. 11.700.000,- realisasi Rp. 11.699.000,- (99,99%).



2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pagu anggaran Rp. 596.892.150 realisasi Rp. 516.898.750,- (86,60%).

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pagu anggaran Rp. 920.177.500,- realisasi Rp. 476.913.750,- (59,60%).

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pagu anggaran Rp. 879.750.000,- realisasi Rp. 508.026.000,- (57,75%).
2. Pembinaan Terpadu Kampung KB pagu anggaran Rp. 40.427.500,- realisasi Rp. 40.401.750,- (99,94%).

C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dengan anggaran program Rp. 2.423.187.950,- realisasi 1.471.923.225,- (60,74%).

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pagu anggaran Rp. 229.027.950,- realisasi Rp. 221.483.225,- (96,71%)
2. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksanan (Kader) ketahan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) pagu anggaran Rp. 2.194.160.000,- realisasi Rp. 1.250.440.000,- (56,99 %).

11. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada Tahun 2022 Urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.374.538.582., dengan realisasi Rp. 4.132.206.330 (94,46%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pemerintah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Promosi dilihat pada tabel berikut:



NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
					(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	5		6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.754.670	32.360.700	98,80%
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.823.094.870	2.733.972.220	96,84%
			III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.736.497	361.868.792	98,13%
			IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.351.430	13.267.180	98,05%
			V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.990.459	203.766.348	95,22
			VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.467.690	201.197.684	92,09%
			B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	62.971.590	59.688.400	94,74%
			C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	144.953.398	142.280.848	98,57
			D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	80.663.042	73.233.112	89,13%
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	415.374.936	312.047.846	75,12%

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan 	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat			
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi			



		- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan				
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM			

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. **Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan Indikator Kinerja Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat dengan target Kinerja 82 % terealisasi 81,41 %**

Rata-Rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat "B"

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - (2) Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.
 - Program Promosi penanama modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - Program Pelayanan penanaman modal , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pelayanan perizinan dan no perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
- b. **Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif dengan Indikator Peningkatan jumlah Izin yang di terbitkan di Kabupaten Pesisir Selatan.**

Target investasi pada tahun 2022 Rp. 310.000.000.000. terealisasi sebanyak Rp. 656.375.109.238., dengan persentasi peningkatan mencapai 212 %

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.



- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - (2) Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.
- Program Promosi penanaman modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
- Program Pelayanan penanaman modal , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
- Program Pengendalian penanaman modal, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota.
- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**
 - a. **PERMASALAHAN :**

Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta kekurangan sumber daya manusia/ Tenaga Informasi Teknologi (IT) untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. **SOLUSI**



Diperlukan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan sumber daya aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi.

Adapun jumlah Belanja langsung untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2022 untuk mengakomodir Urusan Komunikasi Dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.246.371.751 dengan realisasi Rp. 8.059.740.471 dengan tingkat realisasi mencapai angka 98 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan	4.455.100.751	4.323.327.811
	1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	3.638.181.704	3.536.856.732
	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	313.308.937	307.092.028
	3		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Kab. Pesisir Selatan	240.615.070	219.966.431
	4		Kegiatan pemeliharaan Barang Milik	Terlaksananya pemeliharaan Barang milik	262.995.040	262.412.620



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan		
2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	798.278.800	772.248.432
	5		Kegiatan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	798.278.800	772.248.432
3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.992.992.200	2.964.164.228
	6		Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan e Government atau sistem pemerintah berbasis elektronik di pemerintah Kab. Pesisir Selatan	2.992.992.200	2.964.164.228

Adapun jumlah Belanja langsung untuk Urusan Persandian pada tahun 2022 untuk mengakomodir Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.650.900 dengan realisasi Rp. 128.845.190 dengan tingkat realisasi mencapai angka 83 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persandian	Dinas Komunikasi dan	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Persentase tingkat keamanan	154.650.900	128.845.190



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Informatika	Pengamanan Informasi	informasi pemerintah		
1			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah	154.650.900	128.845.190

Adapun jumlah Belanja langsung untuk Urusan Statistik pada tahun 2022 untuk mengakomodir Statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.166.500 dengan realisasi Rp. 156.333.450 dengan tingkat realisasi mencapai angka 77% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan data statistik yang valid dan handal	203.166.500	156.333.450
1			Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan	203.166.500	156.333.450

- SASARAN STRATEGIS PK KEPALA OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,35	3.48	104
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi	93	99,92	107



		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Publik			
--	--	---	--------	--	--	--

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi, dengan indikator kinerja yaitu:

Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi pemerintah yang berbasis elektronik. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pencapaian indeks layanan pemerintah berbasis elektronik pada tahun 2022 sebesar 3.35. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 3.48 . Hal ini disebabkan oleh penerapan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan program dan kegiatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tahun 2022 indikator penilaian SPBE sebanyak 47 Indikator. Pencapaian indeks layanan pemerintahan berbasis elektronik didasari oleh pencapaian layanan di bidang teknologi informasi. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik

b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis diatas adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Pencapaian atas Nilai Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan pencapaian indikator nilai keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi. Untuk tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan nilai sebesar 93 (informatif) dan realisasinya sebanyak 99,92 (Informatif) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 05/KEP/KI-PSB/XII/2022 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022.

Untuk Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan nilai KIP sebesar 93 (Informatif) dengan hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut :



1. Membangun sistem informasi yang terintegrasi seluruh OPD dan Nagari yang memudahkan dalam penyediaan dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan total DIP yang tersusun adalah sebanyak 6.312 DIP.
2. Mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat terutama generasi muda melalui Program Inovasi “PPID goes to school” ke SMKN 1 Painan.
3. Melakukan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis secara berkala dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Kunci keberhasilan penyelenggaraan keterbukaan informasi Kabupaten Pesisir Selatan :

1. PPID Utama, PPID Pembantu dan PPID Nagari BerKOMITMEN untuk menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang TerKOORDINASI dan berKOLABORASI dalam sebuah alur kerja sistematis yang ditunjang dengan KOMUNIKASI yang baik antar unit kerja untuk menjaga KONSISTENSI pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang Cepat, Tepat dan Akurat (CeTAR).
2. Inovasi tiada henti untuk mewujudkan Keterbukaan informasi publik yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi
3. Pengembangan Website (20%)
Pada indikator ini, penilaian pada bagaimana website yang dikembangkan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4. Pengumuman Informasi Publik (25)
Tersedianya informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat yang terdiri dari informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.
5. Pelayanan Informasi Publik (25%)



Tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan, tersedianya sarana dan prasarana layanan informasi publik dan terlaksananya tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

6. Penyediaan Informasi Publik (30%).
7. Penilaian untuk Indikator Penyediaan Informasi Publik, Bagaimana Badan Publik menyediakan informasi publik yang mudah dijangkau, menyediakan peraturan/kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :
 - a. Masih adanya blankspot area di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Belum tersusunnya Arsitektur SPBE Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi;
2. Solusi
 - a. Bimbingan teknis pada operator OPD dalam pengelolaan komunikasi dan informatika;
 - b. Mengajukan permohonan fasilitasi jaringan telekomunikasi untuk blankspot area di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo;
 - c. Direncanakan penyusunan Arsitektur SPBE pada Tahun 2023 bekerja sama dengan Tenaga ahli yang berkompeten pada bidangnya.
 - d. Bekerjasama dengan Pemerintah Nagari mengadakan pelatihan pengelolaan Sinar;

13. DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Pada Tahun 2022 Urusan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.483.982.324 dengan realisasi Rp. 20.878.412.408 (97%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7



1	Urusan Perikanan dan Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas Pangan oleh Inspektorat	5.591.892.228	5.312.888.912
				Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	4.484.315.226	4.242.330.653
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.272.249.338	4.040.694.546
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.065.888	201.636.107
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	418.461.580	405.251.774
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.986.880	7927000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96.747.600	90.947.100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47.014.090	46.359.600
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18.358.010	18.355.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.400.000	3.240.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.080.000	2.765.400
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.875.000	235.657.674
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Dinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerahPangan	224.833.072	221.697.585
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80.252.732	77.126.985
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144.580.340	144.570.600
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	464.282.350	443.608.900
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	366.648.350	349.568.700
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22.950.000	19.635.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	74.684.000	74.405.200
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	7.466.988.200	7.330.913.895
			Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat	7.466.988.200	7.330.913.895
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1.022.750.820	1.022.750.820
			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	184.308.432	184.308.432



			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5.407.940.748	5.407.940.748
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	285.000.000	215.372.780
			Penyusunan Rencana dan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	566.988.200	500.541.115
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi Konsumsi protein	187.189.750	182.479.200
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	77.189.750	72.637.800
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.897.750	12.572.900
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	44.190.000	42.765.150
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7.286.100	6.437.250
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	12.815.900	10.862.500
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	skor pola pangan harapan	110.000.000	109.841.400
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110.000.000	109.841.400
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya nagari rawan pangan		
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan	241.053.440	240.276.875
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	15.050.380	14.505.250
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	15.050.380	14.505.250
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	226.003.060	225.771.625
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.951.920	210.897.125
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi PSAT (beras)	15.051.140	14.874.500
				Rekomendasi sertifikat prima	28.999.960	27.000.650
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (Beras) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan		
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	28.999.960	27.000.650



		Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota		
		URUSAN PILIHAN		28.999.960	27.000.650
		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	7.967.858.746	7.784.852.876
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	5.057.742.728	4.997.393.180
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	5.057.742.728	4.997.393.180
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5.012.167.728	4.959.722.780
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	45.575.000	37.670.400
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	1.734.957.860	1.713.535.401
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.734.957.860	1.713.535.401
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.043.000	29.890.286
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	1.704.914.860	1.683.645.115
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	1.175.158.158	1.039.927.160
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	36.274.912	27.540.112
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	36.274.912	27.540.112
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	844.170.746	726.311.134
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan	844.170.746	726.311.134
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	294.712.500	286.075.914

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	85%	30%	35%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.977	50.185	102,5%

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Meningkatkan produksi perikanan, dengan indikator kinerja yaitu:

Jumlah Produksi Perikanan (Ton) (**Target Kinerja : 48.977 ton**) (**Realisasi Kinerja : 50.185 ton**) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil



- (2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - (3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator kinerja yaitu: Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (**Target Kinerja : 85%**) (**Realisasi Kinerja : 30 %**) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - (1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - (1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - (2) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - (1) Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - (2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - **Permasalahan dan Solusi**
 - 1. Permasalahan
 - a. Banyaknya BMD yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan untuk dipelihara/dirawat, seperti :
 - a. Pemeliharaan Gedung/Kantor Kabupaten, Dinas Perikanan dan Pangan;
 - b. Dinas Perikanan dan Pangan memiliki kendaraan dinas operasional (6 unit roda 4 dan 33 unit roda 2); dan



b. Capaian persentase ketersediaan pangan rendah diakibatkan adanya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikeluarkan, namun tidak ada penambahan

2. Solusi

a. Perawatan gedung kantor dan kendaraan dinas secara berkala;

b. Penambahan CPP Kabupaten Pesisir Selatan

14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	5	6	10	11	
1.	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.799.599.578	3.750.652.768	
1.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra 2021-2026	0	0	
2.			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0
3.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarlah Gaji dan Tunjangan ASN	3.176.604.507	3.133.930.488	
4.			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.070.233.619	3.030.700.304	
5.			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.370.888	103.230.184	
9.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	193.440.056	192.904.993	
10.			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.491.110	7.486.000	
1.			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.047.820	25.026.000	
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.654.126	11.654.000	
			4	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.900.000	9.882.000	
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.347.000	138.856.993
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		205.359.200	204.960.845
				1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	10.930.000



			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan	153.315.200	152.990.845	
			3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.044.000	41.040.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.195.815	218.856.442	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	120.767.685	115.431.442	
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.428.130	103.425.000	
3.				Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan umum daerah puskel, OPD, Nagari, TBM dll	827.789.550	820.509.670
	1			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		114.803.340	112.772.350
	2		1		Pengembangan Literasi Berbasis Inkluisi Sosial	39.217.500	39.190.550
	3		2		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	75.585.840	73.581.800
	4			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		673.986.310	668.791.070
	5		1		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	485.174.100	484.695.100
			2		Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	76.998.430	75.768.950
			3		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	74.136.860	73.932.820
			4		Pengembangan bahan Pustaka	37.676.920	34.394.200
4.				Program Pengelolaan Arsip	Persentase sarpras arsip kondisi baik	264.048.396	259.545.900



5.	1			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Depo Arsip	87.471.564	85.836.650
				1	<i>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota</i>	67.154.080	66.924.350
				2	<i>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</i>	20.317.484	18.912.300
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase OPD, Nagari yang mengelola arsip secara baku</i>	49.876.004	48.164.100
				1	<i>Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI</i>	49.876.004	48.164.100
1	2			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		20.252.890	19.327.800
				1	<i>Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN</i>	20.252.890	19.327.800

- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Arsip sebagai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	25	19	76
		2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	rasio	25,8	20,2	78,29
2.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1. Indek Budaya Baca Masyarakat	%	74,897	74,897	100



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**
 - a. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat yaitu Perangkat Daerah (PD) yang menyerahkan arsip permanen (Target Kinerja : 25) (Realisasi capaian Kinerja : 76,00 %)
 - b. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional yaitu: Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional dengan target 25,8 % dengan realisasi 78,29% yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Penyedia Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 4. Penyedia Bahan Logistik Kantor.
 5. Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan.
 6. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan.
 11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 12. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



2. Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
 3. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota
 4. Pengembangan bahan Pustaka
 5. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 6. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP.
1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
 3. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
 4. Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN
- b. Meningkatnya indek budaya baca masyarakat yaitu:
1. Indek Budaya Baca Masyarakat Bernilai kurang berhasil (50 - 76) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
 - (1) Kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (penunjang DAK perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah yang representatif.
 - (2) Kegiatan pelayanan rumah pintar perintis dengan output operasional layanan rumah pintar perintis painan.
 - (3) Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling dengan output operasional perpustakaan keliling.
 - (4) Kegiatan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (DAK Perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah.
 - (5) Kegiatan pembinaan dan fasilitas bengkel menulis dengan output jumlah masyarakat yang dibina.



Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Belum lengkapnya regulasi daerah mengenai kearsipan dan perpustakaan;
- b. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun PD dan unit kerja lainnya);
- c. Kemajuan informasi teknologi belum di manfaatkan secara proposional untuk hal-hal yang berguna/produktif;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan;
- e. Rendahnya apresiasi dan pemahaman tentang arsip dan pustaka oleh aparatur pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap kearsipan dan perpustakaan bukan menjadi hal yang prioritas; dan
- f. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan.

2. Solusi

- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan infrastruktur kearsipan dan perpustakaan;
- b. Mendorong terwujudnya SDM yang profesional dan terampil di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, akurat, mudah murah dan fleksibel serta mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan;
- d. Mendorong peningkatan jumlah arsip- arsip yang bernilai guna tinggi untuk disimpan dan dipelihara di Depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan meningkatkan koleksi bahan pustaka baik yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pessel maupun Perpustakaan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan; dan
Mengembangkan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesempatan membaca dan belajar melalui pelayanan prima, baik bidang kearsipan maupun perpustakaan.



15. DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		3.780.120	3.776.820
1			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan	3.780.120	3.776.820
1	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		71.838.480	69.085.495
1			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Terlaksananya pelayanan data ketenagakerjaan dan pelayanan Kartu Pencari Kerja	48.252.610	48.113.985
			Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya perlindungan dan kompetensi CPMI/PMI	23.585.870	20.971.510
1	Koperasi, UKM	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	312.807.000	112.778.200
			PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
1			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang Mengikuti Bimtek/ Diklat	390.303.960	354.639.420
2			Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Strukturisasi, dan Rekruturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang diaktifkan kembali	1.200.000	1.200.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Kegiatan Pembaerdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN	55.905.772	53.340.650
			PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah bantuan sarana UMKM	451.979.940	297.704.250

- SASARAN STRATEGIS KEPALA DINAS KOPNAKER

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat			A	A	<p>Target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah A (85,00%) dan terealisasi A (80,08%) dengan capaian indikator kinerja adalah 94,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong berhasil dengan predikat memuaskan.</p> <p>Dalam peningkatan nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, masih ditemukan hambatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyusunan Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) yang sangat terbatas, mengingat, adanya perubahan nomenklatur OPD pada akhir tahun 2021. 2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.



						<p>3. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.</p> <p>4. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome.</p>
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	%	6,93	5,97%	
3.	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	%	15	6,58%	<p>Koperasi berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).</p> <p>Dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas, Pemerintah mengubah paradigma reformasi pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas melalui reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan.</p> <p>Capaian persentase koperasi berkualitas masih dibawah target Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka kemacetan pada koperasi 2. Persaingan bisnis dengan BUMN/perbankan. 3. Terbatasnya permodalan koperasi 4. Terbatasnya personil yang kompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi. 5. Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, bahkan 2 (dua) tahun terakhir anggaran difocusing.
4.	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	$\frac{\text{jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	%	70	70,5%	<p>Capaian Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha sebesar 100,07%.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur</p>

					<p>dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.</p> <p>b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :</p> <p>1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,-</p> <p>2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp.2.000.000.000,- s/d 15.000.000.000,-</p> <p>3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,- s/d 50.000.000.000,-</p>
--	--	--	--	--	---

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
- a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**
Meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan.
- b. **Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka**
Meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 3. Program Program Hubungan Industrial
 - 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- c. **Meningkatnya Koperasi Berkualitas**
Meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.



- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 3. Program Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Struktirisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Faktor penyebab tidak tercapainya target Persentase Koperasi Berkualitas :

4. Tingginya angka kemacetan pada koperasi

Penyebab tingginya angka kemacetan pada koperasi, yaitu :

 - a. Dampak pandemic covid-19 dimana pendapatan masyarakat/anggota berkurang secara signifikan, sehingga kemampuan bayar anggota koperasi semakin menurun.
 - b. Rendahnya kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya.
 - c. Lemahnya aturan internal yang mengikat pada koperasi.
 - d. Kurang profesionalnya Pengurus/Pengawas/Pengelola dalam mengelola usaha koperasi.
5. Persaingan dengan BUMN/perbankan, dimana tingkat suku bunga bank lebih rendah dari tingkat suku bunga yang ada dikoperasi, sehingga anggota yang tergabung pada KPRI pada umumnya meminjam ke bank, bahkan dikoperasi mengalami kemacetan.
6. Terbatasnya permodalan koperasi
7. Terbatasnya personil yang kompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi.
8. Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, bahkan 2 (dua) tahun terakhir difocusing.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, yaitu :

- a. Melakukan efektivitas pengawasan koperasi.
- b. Memberdayakan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM.
- c. Memberikan penyuluhan baik formal maupun informal



- d. Mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan bagi Pengurus Koperasi yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahun 2021
- e. Memberikan kemudahan pemberian rekomendasi pinjaman ke Koperasi Sekunder.

d. Berkembangnya UMK

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 1) Kegiatan Pembaerdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Struktirisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

16. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan 3 Program, diantaranya 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 2 Program Urusan Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.909.146.641,- dengan realisasi Rp. 15.452.261.049,- (97,13%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	6.024.678.724,-	5.894.412.853,-
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	47.623.040,-	44.638.400,-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.623.040,-	44.638.400,-
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.245.411.452,-	4.146.686.386,-



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.086,789.209,-	3.994.260.282,-
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.622.243,-	152.426.104,-
			Kegiatan Administtrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	471.776.670,-	471.639.170,-
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	471.776.670,-	471.639.170,-
			Kegiatan Administtrasi Umum Perangkat Daerah	351.458.266,-	346.554.871,-
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	31.643.320,-	31.643.320,-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.270.000,-	45.356.294,-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.376.146,-	29.376.146,-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.618.800,-	24.618.800,-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.400.000,-	4.320.000,-
			Fasilitas Kunjungan Tamu	1.600.000,-	1.538.100,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.550.000,-	209.702.211,-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	210.704.676,-	206.149766,-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.378.676,-	111.878.766,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.326.000,-	94.271.000,-
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.704.620,-	678.744.260,-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	289.730.000,-	274.050.140,-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.997.120,-	7.969.120,-
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.977.500,-	396.725.000,-
			Program Penyelenggaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.817.503.067,-	9.491.303.446,-
			Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	177.808.080,-	173.254.536,-
			Penetapan Kebijakan dan Sialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	64.029.700,-	60.340.706,-
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	113.778.380,-	112.913.830,-
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota	7.921.331.594,-	7.664.799.364,-
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.046.399.992,-	1.830.634.880,-
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.724.931.958,-	5.688.697.624,-
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ kota	99.999.804,-	96.920.910,-
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan	49.999.840,-	48.545.950,-



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Perlengkapan Jalan		
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	94.368.004,-	92.147.103,-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	120.199.930,-	98.732.679,-
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	471.446.834,-	453.318.100,-
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	296.357.403,-	292.399.700,-
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.371.040,-	45.000.000,-
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	129.718.400,-	115.918.400,-
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	635.999.738,-	615.795.078,-
			Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	635.999.738,-	615.795.078,-
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	516.548.808,-	491.989.265,-
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	516.548.808,-	491.989.265,-
			Program Pengelolaan Pelayaran	66.964.850,-	66.544750,-
			Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.964.850,-	66.544750,-
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	66.964.850,-	66.544750,-

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Pelayaran	90	95	105,5
2	Meningkatnya kesadaran tertib berlalu lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5%	Peningkatan Pelanggaran 2.35%	- 7,7



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BB	Belum dinilai	-

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

a. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi (Target Kinerja :90) (Realisasi Kinerja : 0)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota, dengan output Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ
 - (2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan output Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum, Terlaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.
 - (3) Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, dengan output Terlaksananya Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.
 - (4) Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan output Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka menjamin keselamatan secara teknis.
 - (5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan



output Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan dan Jalan.

- (6) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output Tersedianya Kendaraan Operasional untuk Badan Usaha Milik Nagari.
- (7) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output Terlaksananya Pelayanan Pengoperasian Bus Sekolah.

- Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut.

b. Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas (Target Kinerja : Penurunan Pelanggaran 5%) (Realisasi Kinerja : Meningkatnya Pelanggaran 2,35%)

Tidak Tercapainya target yang diharapkan karena dalam tahun 2021 tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPd dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
- (3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan output terlaksananya pemungutan retribusi daerah
- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output tersedianya kebutuhan kantor seperti komponen instalasi listrik, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitas tamu serta terlaksananya rapat-rapat koordinasi
- (5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output barang milik daerah dalam kondisi baik.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**

Meningkatnya pelanggaran berlalu lintas karena kurangnya disiplin dan kesadaran dari pengendara kendaraan akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

b. **SOLUSI**

Diharapkan untuk tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan kegiatan yang dapat memberikan arahan dan pengetahuan akan pentingnya disiplin dan keselamatan dalam berlalu lintas. Adapun kegiatannya antara lain :

- Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat jalan dan pelajar
- Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
- Pemilihan Sopir Teladan (Abdiyasa)

17. DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada tahun Pada Tahun 2021 Urusan Pilihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.733.209.477,00 dengan realisasi Rp. 6.388.145.955,00 (94,88%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Ket.
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					93,00%	74.681.400	71.229.409	95,38	
				1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database					86%	22.403.400	18.955.100	84,61	
				1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	60	30	50%	22.403.400	18.955.100	84,61	
					Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna	PK	5	6	120%				
					Jumlah Akses Portal Yang	Akses Portal	5	3	60%				
					Jenis Layanan pada Pes Layanan	Jenis	3	3	100%				
					Jumlah Registrasi Online	Registrasi	6	6	100%				
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					100,00%	52.278.000	52.274.309	99,99	
				1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana Pengolah Data Yang	Unit	30	30	100%	37.804.000	37.804.000	100,00	
					Jumlah Titik Struktur Jaringan Komunikasi Yang	Titik	18	18	100%				
				2) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media penyebarluasan informasi	Media	3	3	100%	14.474.000	14.470.309	99,97	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan					78,49%	4.500.000	4.500.000	100,00	
				1 Penyusunan Profil Kependudukan					78,49%	4.500.000	4.500.000	100,00	
				1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	Jumlah data anomali yang	Jiwa	1500	658	44%	4.500.000	4.500.000	100,00	
					Jumlah data ganda yang dihapus	Jiwa	500	89	18%				
					Jumlah Data Kependudukan Yang	Jiwa	15000	5.678	38%				
					Jumlah Jenis Data Yang Diolah	Jenis	7	13	186%				
					Jumlah Jenis Data Yang Disajikan	Jenis	7	13	186%				
					Jumlah Buku Profil Yang Diterbitkan	Buku	0	0	0%				
JUMLAH TOTAL									98,92	6.336.087.863	6.228.215.975	98,30	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja %	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	61,4	82,11	133,73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.722.307.873	4.631.024.111	98,07
		Jumlah Inovasi Adminduk	2	6	300	Program Pendaftaran Penduduk	1.488.798.590	1.475.893.745	99,13
						Program Pencatatan Sipil	45.800.000	45.568.710	99,50
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.681.400	71.229.409	95,38
						Program Pengelolaan Profil kependudukan	4.500.000	4.500.000	100,00
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	28	37,14	132,64				
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	11	24,00	218,18				
Jumlah							6.336.087.863	6.228.215.975	98,30



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja:

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatkan Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 61,40% dengan realisasi sebesar 82,79%.

Sasaran Strategis ini sesuai dengan sasaran dan Indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara RPJMD dengan KUAPPAS. Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja Perangkat Daerah seperti Renstra 2021-2026, Renja, RKA, Laporan RKPD, LKPJ, LKJ, dll
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan penunjang urusan pemerintah daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- 6) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah

b. Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan output terbitnya dokumen pendaftaran penduduk seperti kartu keluarga, surat pindah datang, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dll.
- 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan output terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk seperti survei indeks kepuasan masyarakat, pendataan penduduk rentan

c. Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan sebagai berikut:



- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan output terbitnya dokumen pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dll.
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan output tersajinya data kependudukan kepada lembaga pengguna berdasarkan perjanjian kerja sama dll.
 - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan output tersedianya sarana dan prasarana penyediaan pelayanan administrasi kependudukan, seperti peralatan dalam kondisi baik, tersedianya media penyebarluasan informasi kependudukan seperti spanduk, baliho, dll

2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan adalah Persentase jenis data agregat kependudukan yang dimanfaatkan OPD dengan target kinerja 28 % dan Persentase OPD yang menggunakan akses pemanfaatan data sebesar 11%. masing-masing Indikator tersebut di atas memperoleh realisasi sebesar 37,14% dan 24%.

Sasaran strategis kedua tersebut memiliki kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara RKPd dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan output tersajinya data kependudukan kepada lembaga pengguna berdasarkan perjanjian kerja sama dll.
 - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan output tersedianya sarana dan prasarana penyediaan pelayanan administrasi kependudukan, seperti peralatan dalam kondisi baik, tersedianya media penyebarluasan informasi kependudukan seperti spanduk, baliho, dll
- b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:



- 1) Penyusunan Profil Kependudukan, dengan out tersedianya data profil kependudukan yang disajikan dengan menerbitkan buku profil kependudukan dan melalui aplikasi digital.

Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan masih terdapat adanya kendala dan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Seringnya terjadi kekurangan Blangko KTP el, sehingga menyebabkan sering terganggunya layanan dokumen kependudukan.
- 2) Banyaknya penduduk yang meninggal, tapi data nya masih ada/hidup di database kependudukan.
- 3) Masih ada data kependudukan ganda yang belum dimutakhirkan.
- 4) Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan.
- 5) Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan.
- 6) Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga perlu penyediaan bangunan yang lebih representatif.
- 7) Bangunan gedung belum standar pelayanan administrasi administrasi kependudukan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 8) Arsip digital yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.

b. Upaya Penyelesaian

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Dukcapil Provinsi tentang ketersediaan blangko KTP el.
- 2) Memprioritaskan pencetakan KTP el bagi yang sangat membutuhkan
- 3) Mensosialisasikan penggunaan aplikasi digital Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada semua masyarakat.
- 4) Melakukan kerja sama dengan perangkat desa, nagari dan kecamatan tentang pelaporan peristiwa kematian, agar data penduduk yang sudah meninggal dapat diterbitkan akta kematiannya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak ada lagi di database kependudukan, sehingga data yang disajikan akurat.



- 5) Dengan adanya sistem SIAK terpusat yang telah dilakukan sejak bulan Mei tahun 2022 maka semua data kependudukan sudah dimutakhirkan.
- 6) Memberikan fasilitasi kepada petugas pelayanan untuk mengikuti bimbingan teknis yang diadakan baik yang diadakan oleh perangkat daerah maupun yang diadakan oleh Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
- 7) Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan dokumen kependudukan dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip di dalamnya agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Salin itu melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis perluasan ruang arsip sesuai dengan standar menurut undang-undang kearsipan pada Renstra 2021-2026 Menugaskan petugas arsip digital agar melakukan rekam dokumen kependudukan secara digital setiap harinya.

18. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pada Tahun 2022 Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.504.818.803,00 dengan realisasi Rp. 12.877.698.292,00 (95,36%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
					(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.554.592.248	4.401.600.472	
			I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.003.085	46.826.700	
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.629.128.463	3.497.810.480	
			IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.056.210	278.731.600	
			VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.640.050	193.539.306	



NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
				(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
			VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.774.440	291.479.880	
			B PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	979.999.920	978.418.880	
			I Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	699.999.920	691.018.880	
			II Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000	280.000.000	
			C PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.160.126.115	4.135.417.379	
			I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.472.172.855	2.448.390.834	
			II Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.687.953.260	1.687.026.545	
			D PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPAMUKRAAN	284.987.300	249.987.300	
2	Urusan Kepariwisataan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	E PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	696.433.750	6.331.896.561	
			I Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	696.433.750	632.729.950	
			II Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.451.586.002	7.381.156.610	
			G	1.062.074.358	952.115.310	
			I Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.062.074.358	952.115.310	
				19.189.799.693	18.731.425.901	97.61%

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.200.000	944.540	78.71 %



No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama tinggal Wisatawan (Hari)	1.25	1,25	100%
		Prog. Pemasaran Pariwisata				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
		Prog. Pemasaran Pariwisata				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Orang)	10	17	170%
		Prog. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
		Prog. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. **Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia**

Jumlah Kunjungan Wisatawan (Target Kinerja :1.200.000 Orang) (Realisasi Kinerja : 944.540 Orang)

Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Target Kinerja :1,25 Hari) (Realisasi Kinerja : 1,25 Hari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan outputtersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan objek wisata.
 - (2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan output terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

**b. Meningkatkan SDM kreatif dan berdaya saing
Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Target Kinerja :10 Orang) (Realisasi Kinerja : 17 Orang)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya keg. pemuda pelopor dan pembentukan paskibra Kab. Pessel.
 - (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota dengan Output tersedianya organisasi Kepemudaan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan outputterlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga.
 - (2) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan outputtelaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan
output terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kepramukaan.



- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**

1. Terhadap Pemeliharaan Aset Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang bertambah cukup signifikan karena adanya mutasi Aset dari Dinas PU tidak di dukung dengan biaya Pemeliharaan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pemeliharaan terhadap Aset Disparpora.
2. SDM ASN yang masih kurang sehingga masih ada tugas-tugas yang dirangkap oleh satu pegawai yang bukan keahliannya.
3. Belum maksimalnya pencapaian target PAD disebabkan kurangnya biaya operasional dan belum maksimalnya pengelola wisata berbayar.
4. Kurangnya kegiatan event Pemerintah dan Promosi Pariwisata melalui media sosial sehingga kurangnya kunjungan wisata.
5. Belum terdatanya secara baik objek wisata dan ekonomi kreatif.

b. **SOLUSI**

1. Dikembalikan ke PU atau diserahkan ke Pemerintah setempat.
2. Kiranya ada penambahan ASN sehingga jika seseorang berhalangan ada ASN yang lain yang bisa menggantikannya sehingga tidak tergantung pada satu orang.
3. Perlu penetapan target PAD yang realistis yang seiring dengan dana operasional yang memadai.
4. Perlunya event Pariwisata baik yang bersinergi dengan pihak lain maupun Disparpora mulai dari skala Nagari hingga Nasional.
5. Dengan Aplikasi SIPPORA maka akan terdata semua objek wisata dan ekonomi kreatif.

19. DINAS PERTANIAN

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian** Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran **Rp. 50.203.107.303,00 (lima puluh milyar dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 48.037.288.412,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan empat ratus dua belas rupiah)** dengan tingkat realisasi mencapai **95,69%** dengan rincian sebagai berikut :



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Non Urusan 2. Pertanian	Dinas Pertanian	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022						50.203.107.303,00	48.037.288.412,00
A.	Non Urusan								19.398.205.068	18.961.788.828
I				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	Persentase	100,00	100,00	19.398.205.068	18.961.788.828
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persentase	100,00	100,00	219.542.090	209.443.000,00
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4,00	4,00	43.529.540	41.692.800,00
2				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan yang disusun	Laporan	60,00	60,00	176.012.550	167.750.200,00



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persentase	100,00	100,00	17.625.772.913	17.249.622.176,00
3				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangannya	Orang/Bulan	201,00	201,00	17.272.905.044	16.975.604.672,00
4				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	352.867.869	274.017.504,00
3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100,00	100,00	307.207.540	302.091.536,00
5				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	7,00	13.468.290	13.443.680,00
6				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	45.428.110	45.409.610,00
7				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	33.756.140	32.238.800,00
8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3,00	3,00	5.400.000	5.040.000,00
9				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	12,00	7.470.000	7.276.000,00
10				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	250,00	250,00	201.685.000	198.683.446,00
4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Persentase	100,00	100,00	43.500.000	42.000.000,00
11				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	1,00	1,00	43.500.000	42.000.000,00
5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	100,00	399.553.205	379.306.464,00
12				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	138.463.775	132.543.354,00
13				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	261.089.430	246.763.110,00
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Persentase	100,00	100,00	802.629.320	779.325.652,00
14				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	192,00	192,00	190.619.860	171.267.307,00
15				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54,00	54,00	24.269.460	23.087.000,00
16				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4,00	4,00	587.740.000	584.971.345,00
B. Pertanian									30.804.902.235	29.075.499.584
II				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN	Persentase	48,88	52,88	9.330.245.491	8.812.146.925,00
7				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan	15,00	15,00	6.841.534.031	6.571.999.700,00
17				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	15,00	15,00	6.841.534.031	6.571.999.700,00
8				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan Yang Dimurnikan dan dilestarikan	Jenis	6,00	6,00	1.690.665.130	1.610.688.285,00
					Tersedianya Benih Tanaman Pangan	Kg	50.000,00	-		
					Tersedianya bibit Tanaman Hortikultura	Batang	12.880,00	4.110,00		
					Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia	Kg	5.001,00	3.001,37		
					Tersedianya bibit Perkebunan	Batang	82.010,00	4.960,00		
					Jumlah Frozen Semen yang disediakan	Straw	5.000,00	2.000,00		
18				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6,00	6,00	207.734.000	188.573.050,00
19				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3,00	3,00	230.336.980	216.358.750,00
20				Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3,00	3,00	1.252.594.150	1.205.756.485,00



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
9				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Laporan	15,00	15,00	798.046.330	629.458.940,00
21				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ekor	150,00	150,00	609.999.680	445.497.870,00
22				Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	5,00	5,00	188.046.650	183.961.070,00
III				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (Kali	2,33	1,62	16.166.154.220	15.344.676.072,00
					PERSENTASE TERNAK UNGGUL	Persentase	4,50	4,14		
10				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanian per Tahun	Kali	2,33	1,62	15.775.909.160	14.964.159.602,00
					Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan Puskeswan yang representatif	Unit	6,00	6,00		
					Persentase Ternak Unggul	Persentase	4,50	4,14		
24				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	20,00	20,00	4.273.207.960	4.054.190.687,00
25				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Unit	35,00	35,00	6.571.689.810	6.186.899.950,00
26				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3,00	3,00	410.000.000	406.042.500,00
27				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3,00	3,00	1.252.919.600	1.179.172.150,00
28				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5,00	5,00	3.288.091.790	3.137.854.315,00
11				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Kabupaten/Kota	Laporan	15,00	15,00	390.245.060	380.516.470,00
29				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarkan dan Dimanfaatkan	Laporan	15,00	15,00	390.245.060	380.516.470,00
IV				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS	Kasus	150,00	150,00	536.212.600	412.095.091,00
12				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan	Bulan	12,00	12,00	114.709.770	81.301.300,00
30				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	15,00	15,00	33.550.160	22.389.800,00
31				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	15,00	15,00	81.159.610	58.911.500,00
13				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak di Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan	15,00	15,00	82.251.110	81.516.850,00
32				Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	12,00	82.251.110	81.516.850,00
14				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Laporan	12,00	12,00	339.251.720	249.276.941,00
33				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1,00	1,00	22.066.200	20.937.010,00
34				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12,00	12,00	317.185.520	228.339.931,00



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
V				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP BENCANA PERTANIAN	Persentase	100,00	100,00	430.097.760	419.216.770,00
15				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan luas serangan Hama Penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase	5,48	5,48	430.097.760,00	419.216.770,00
35				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	8.619,00	8.340,00	300.097.760	290.393.970,00
				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	15,00	15,00	130.000.000	128.822.800,00
VI				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA	Unit	10,00	10,00	72.289.200	62.945.550,00
16				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Dokumen	5,00	5,00	72.289.200	62.945.550,00
36				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	10,00	10,00	37.539.200	35.442.600,00
37				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	184,00	184,00	34.750.000	27.502.950,00
VII				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS	KELOMPOK	50,00	219,00	4.269.902.964	4.024.419.176,00
17				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Yang Dapat Memenuhi Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Seluruhnya	Persentase	100,00	100,00	4.269.902.964	4.024.419.176,00
					Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran	Persentase	48,88	52,88		
38				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	15,00	15,00	630.846.260	570.559.464,00
39				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	997,00	1.091,00	166.151.690	159.083.146,00
40				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11,00	11,00	227.572.300	218.421.200,00
41				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	41,00	30,00	3.245.332.514	3.076.355.366,00



- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian**

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022*)	Capaian (%)
1	2	7	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKjIP	88,64 (A)	91,89 (AA)**)	103,67
2.	Meningkatnya produksi pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Jumlah Produksi Pertanian	719.816	752.895,21	104,60
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	- Padi	187.314	156.430,30	83,51
			- Jagung	140.849	208.010,52	147,68
		Perizinan Usaha Pertanian	- Cabe Merah	4.599	5.099,30	110,88
			- Bawang Merah	205	146,30	71,37
			- Jengkol	2.385	5.746,60	240,95
			- Jeruk	17.204	4.465,10	25,95
			- Manggis	2.468	4.695,10	190,24
			- Durian	8.446	18.482,00	218,83
			- Kelapa Sawit	344.558	338.348,86	98,20
			- Kopi	2.366	2.372,90	100,29
			- Gambir	5.861	5.944,49	101,42
		- Kelapa Dalam	3.561	3.153,76	88,56	
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha)	50,47	54,36	107,71		
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3. Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	1,20	2,18	181,67		
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Sapi Potong	1	0,74	74,00		
	- Itik	1,8	4,48	248,89		
Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Ayam Buras	0,8	1,32	165,00		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	4. Inovasi Dinas Pertanian	2	2	100,00		
Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Layanan Online Organisme Pengganggu Tumbuhan (LOOPUT)	1	1	100,00		
	- Door To Door Vaksin Action (DOVAC)	1	1	100,00		
3.	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan	Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas (Kelompok)	50	219	438,00
Jumlah						172,61

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu

1.1. Nilai LKjIP (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 103,67%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian



sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Output dari program ini adalah tercapainya persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, output sub kegiatan ini adalah terlaksana penyusunan dokumen evaluasi kinerja (rapat-rapat evaluasi internal perangkat daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, laporan evaluasi hasil renja, penyediaan data statistik.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium aparatur. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.



Kegiatan ini terdiri atas 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis logistik kantor;
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan bahan cetak dan penggandaan;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, output sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan yaitu surat kabar/koran harian;
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan terhadap tamu dinas;
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, output kegiatan ini adalah persentase ketersediaan barang milik daerah. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebel, output sub kegiatan ini adalah tersedianya mebel.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, output kegiatan ini adalah persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, output sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon ;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, output sub kegiatan ini adalah terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, output kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang berkondisi baik. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :



1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, output sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang terpelihara;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang pelaksanaan kegiatan dinas;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.

2. Meningkatnya Produksi Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

2.1. Jumlah Produksi Pertanian (Ton) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 104,60%).

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Output program ini adalah peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, output yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Output sub kegiatanyang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan dan Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :



1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, output sub kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. output sub kegiatan adalah tersedianya bibit durian dan bibit kelapa sawit.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Output program ini adalah pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, output kegiatan ini adalah menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 1. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Output yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya penanggulangan pasca bencana bidang pertanian.
 - Program Perizinan Usaha Pertanian
Output Program ini adalah terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Output kegiatan adalah jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) unit sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian.
 2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan kios pertanian.

2.2. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 107,71%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator



sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Output Program ini terlaksananya indeks pertanaman. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian. Output kegiatan ini adalah meningkatkan indeks pertanaman. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jaringan irigasi usaha Tani;
 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
 3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan dam parit saluran.
 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian lainnya.

2.3. Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)

Sapi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 74,00%)

Itik (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 248,49%)

Ayam Buras (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 165,00%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



Output program ini adalah peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah tersedianya Ternak yang akan diserahkan ke Kelompok Tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Output sub kegiatan ini adalah tersedia ternak untuk diserahkan ke Kelompok Tani.
 2. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Output program ini adalah meningkatkan persentase ternak unggul. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya prasarana pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.
 - b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah ketersediaan bantuan ternak itik kepada kelompok tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak, Output sub kegiatan adalah tersedianya ternak itik untuk diserahkan ke kelompok tani.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Output program ini Jumlah Kasus



Hewan Menular Strategis. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah pengendalian hewan dari penyakit rabies dan SE (Septicaemia Epizootica). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian penyakit rabies pada hewan.
 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian penyakit SE (Septicaemia Epizootica) pada hewan ternak.
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengujian sampel produk pangan asal hewan.
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Laboratorium. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan laboratorium untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan.

2.4 Inovasi Dinas Pertanian (Jenis)

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100,00%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan



indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Output program ini adalah pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, output kegiatan ini adalah menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan pengadaan sarana pengendalian (Pengadaan Pestisida).
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Output program ini Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan medik veteriner.

3. Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

3.1 Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas (Kelompok)

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 438,00%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian



sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyuluhan Pertanian, output Program ini meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik kelas. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Output kegiatan ini adalah adalah jumlah kelembagaan tani yang meningkat SDM nya dan jumlah petani yang meningkat SDM nya. Kegiatan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan program penyuluhan, fasilitasi kegiatan konstratani, pelaksanaan traning di Balai Penyuluhan Pertanian se Kabupaten Pesisir Selatan, serta pelatihan produk pasca panen komoditi peternakan.
 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, LKMA dan UPJA yang dibina dan Fasilitasi kegiatan AOTP.
 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Output sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
 4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah dari sub kegiatan ini adalah jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.



Penggunaan benih bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pemakaian benih bersertifikat di Pesisir Selatan masih sangat rendah, saat ini baru sekitar 10% s.d 12% (Data dari Pengawas Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tahun 2023) dari kebutuhan petani. Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

a) Prasarana

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat, Masih adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain seperti perumahan, pabrik, jalan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya. Masih diperlukannya penambahan luas lahan sawah bagi usaha budidaya tanaman padi guna mendukung swasembada padi, Optimasi lahan - lahan terlantar sehingga lebih produktif bagi budidaya pertanian seperti optimasi lahan rawa dan lahan kering.

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman



berjalan tidak optimal. Dilain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

b) Sarana

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan melalui kegiatan Brigade Alsintan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah ini perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDKK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dengan produsen, distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas



dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani/peternak.

4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola. Selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya.

Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi melalui penggunaan benih/bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pakan, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi.

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani/peternak. Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani/peternak mengambil keputusan dalam melakukan usaha tani. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.

Perlu pengelolaan input dan output dari pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak dampak positif, baik kepada para petani/peternak untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan dan air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau



rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah embung, dam parit, jalan usahatani, jalan dan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas

SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/peternak dan kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas.

Pendidikan dan usia petani/peternak menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani/peternak yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan.



Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani. Dari sisi usia petani, petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Terbatasnya jumlah Petugas dengan rincian sebagai berikut :

- Pesisir Selatan masih kekurangan sekitar 70 orang penyuluh, idealnya 1 orang penyuluh 1 nagari. Jumlah penyuluh yang ada di Pesisir Selatan saat ini baru mencapai 112 orang termasuk yang merangkap menjadi Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Supervisor (PP Supervisor), sedangkan jumlah nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182.
- Tenaga Medis sebanyak 8 (delapan) orang 2 (dua) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat fungsional medik veteriner. Secara teknis, kebutuhan tenaga medis untuk mengelola 7 (tujuh) unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 16 orang diluar yang menduduki jabatan struktural.
- Inseminator, ada 23 orang petugas sudah memiliki Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIMI), 17 orang diantaranya inseminator aktif dan 5 orang tidak aktif. Dari 5 orang inseminator yang tidak aktif, 3 orang sebagai pejabat struktural, 2 orang di kecamatan, idealnya dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan inseminator sebanyak 35 orang atau masih kurang 18 orang.
- Pemeriksa Kebuntingan (PKB), ada 11 orang (2 orang merangkap struktural). Idealnya satu Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang PKB.
- Asisten Teknis Reproduksi (ATR), ada 3 orang. Idealnya Idealnya dua Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang ATR. 1 orang ATR mengawasi kinerja 2 orang PKB.
- Sterility Control (SC), ada 5 orang. Idealnya setiap Puskesmas harus dilengkapi oleh 1 orang petugas SC.



- Belum adanya Tenaga Labor Kesehatan Hewan, Tenaga Labor Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Juru Kesehatan Hewan.
8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani
Salah satu strategi dalam menggerakkan petani/peternak dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani/peternak. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani/peternak. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani/peternak.
 9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan
Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang terjadi secara massif. Pembangunan sektor non pertanian serta kebutuhan masyarakat atas ruang dan pemukiman serta sarana prasarana lainnya menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian. Disisi lain upaya perlindungan lahan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum efektif dalam pengendalian terhadap alih fungsi lahan.
Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak.
Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani/peternak. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani/peternak dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan yaitu perlu tersedianya vaksin dan obat-obatan hewan sesuai kebutuhan serta pengetahuan masyarakat tentang higienis dan sanitasi kandang.

11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani/peternak. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Hubungan



keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani/peternak dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kehilangan hasil ini mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (*not marketable*) atau tidak layak dikonsumsi. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan (*losses*), baik dalam kualitas maupun kuantitas.

13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan

Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan berupa Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4).

15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul

Sebagian besar benih ternak unggul berupa frozen semen untuk Inseminasi Buatan (IB) didatangkan dari luar daerah, yaitu di BIB Limbukan Tuah Sakato Payakumbuh, BIB Lembang Bandung, BIB Singo Sari Jawa Tengah. Jumlah asektor IB 9.000 ekor per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah tersebut dibutuhkan 12.000 dosis frozen semen. sedangkan rata-rata pengadaan frozen semen sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 2.000 dosis setiap tahun dan Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat rata-rata 8.000 dosis setiap tahun, dengan



demikian terdapat kekurangan frozen semen sekitar 2.000 dosis per tahun.

16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan
Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

b. Solusi

1. Perlu optimalisasi prasarana dan sarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.
2. Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
Sarana Pertanian
Pengadaan Sarana Pertanian
3. Perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan agroinput dalam budidaya pertanian.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
6. Meningkatkan SDM petugas dan petani/peternak melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Pengelolaan kelembagaan petani secara optimal.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Perda LP2B.
9. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian.
10. Peningkatan pemanfaatan akselerasi inovasi teknologi hilirisasi.
11. Menurunkan tingkat kehilangan hasil produksi pertanian.
12. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
13. Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan dan Tanaman.
14. Penyediaan Bibit unggul pertanian.



20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2022 Urusan Pemerintahan dengan unsur penunjang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.810.890.365,- dengan realisasi Rp.7.234.453.713,- (92,62%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan dengan unsur penunjang kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2	3	4		5	6	7
1	Urusan Pemerintahan dengan Unsur Penunjang Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,330,359,015	5,242,084,752	
			I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,344,460	38,015,990	
			II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	630,672,319	620,809,532	
			III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215,415,724	211,558,659	
			IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,294,016,479	4,226,429,058	
			V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151,910,033	145,271,513	
			B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,062,808,810	652,776,910	
			I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	500,875,250	140,940,805	
			II	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	122,177,730	114,541,222	
			III	Pengembangan Kompetensi ASN	94,704,210	68,048,133	
			IV	Mutasi dan Promosi	345,051,620	329,246,750	
			C		1,417,722,540	1,339,592,051	
			I	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,417,722,540	1,339,592,051	
					7,810,890,365	7,234,453,713	92.62

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks IP ASN	57	51.89	91.03
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				
2	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Inovasi BKPSDM	65%	80.07%	123.18
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia		1	1	100
3	Meningkatnya manajemen system karir ASN berdasarkan Merit System	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jabatan yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan anjab	30%	85.15%	283.83
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian AKIP BKPSDM oleh Inspektorat	A	A	100
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir selatan telah dilakukan analisis kesesuaian antara Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.



- (3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan output terlaksananya pengadaan CPNS, pemberhentian PNS dan Sistem Informasi Kepegawaian, pada sub kegiatan ini tidak tercapai realisasi dikarenakan kegiatan pengadaan formasi tahun 2022 hanya dilakukan untuk JF guru yang telah dilakukan ujian pada tahun 2021, sehingga sewa laptop serta perjalanan dinas biasa tidak dapat direalisasikan/direalisasikan.
 - (2) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output terlaksananya pengelolaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - (3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan output terlaksananya pengembangan kompetensi ASN.
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan output terlaksananya pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan output terlaksananya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.
- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**
 - PERMASALAHAN**
 - a. Pada tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. IP ASN Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2021 adalah 48.78 sedangkan pada tahun 2022 adalah 51.89, ini masih dalam kategori rendah dikarenakan ASN masih kurang dalam kompetensinya, dan pembiayaan untuk meningkatkan kompetensi masih kurang dan belum terarah sepenuhnya untuk semua ASN di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Selain itu Pada Program Kepegawaian Daerah , Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pada sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK secara kinerja sudah melakukan validasi pada tenaga non asn pada aplikasi pusat. Sedangkan pada anggaran yang tidak dapat direalisasikan adalah belanja jasa penyelenggaraan acara (sewa laptop) dan belanja perjalanan dinas biasa yang direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan seleksi CASN formasi



kesehatan dan teknis di Padang, namun kegiatan pengadaan formasi tahun 2022 hanya dilakukan untuk JF guru yang telah dilakukan ujian pada tahun 2021, sehingga sewa laptop serta perjalanan dinas biasa tidak dapat direalisasikan/direalisasikan sepenuhnya.

SOLUSI

Disarankan kedepannya untuk memfokuskan kegiatan yang menunjang untuk peningkatan aspek kualifikasi yaitu Kompetensi, kinerja Aparatur Sipil Negara perlu pendanaan yang berlebih dan prioritas yang tinggi karena sebagai indikator utama baik di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra BKPSDM.

21. BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	8	9
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		25.193.771.230	12.165.072.431
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		84.449.780	80.114.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.112.705.068	6.598.898.545
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		408.982.429	392.603.779
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		786.729.940	599.937.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		201.980.693	184.885.084
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		632.752.256	578.701.629
2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		286.120.627.492	249.053.295.418
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.295.311.740	1.278.404.886
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		710.082.840	695.088.859
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		443.602.460	357.779.005
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		283.543.841.122	246.596.692.738
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		127.789.330	125.329.930
3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		819.124.224	611.402.813
4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.951.799.678	1.892.188.694
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.951.799.678	1.892.188.694
		TOTAL		315.119.151.560	259.992.027.462



- Sasaran Strategis PK Kepala BPKPAD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	10%	8,7%	87,06%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi	Nilai Hasil Survey kepuasan masyarakat	2	2	100%
3	Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	11%	0,01	8,81%

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Penyusunan APBD Tepat Waktu (Target Kinerja: 31 Desember) (Realisasi Kinerja: APBD ditetapkan tanggal 31 Desember)

Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Target Kinerja: 100%) (Realisasi Kinerja: 100%)

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas meliputi Kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- I. Program Pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu
 - (2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan output Persentase perangkat daerah yang tertib dalam pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - (3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan output Persentase jumlah



rekomendasi yang ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

- (4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan output Persentase tertibnya pengelolaan penyaluran belanja bantuan keuangan, darurat mendesak dan dana bagi hasil pajak.
- (5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan output Cakupan implementasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berbasis IT.

II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan output terlaksananya Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD

b. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD terhadap Pendapatan)

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

I. Program pengelolaan pendapatan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, dengan output Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD

Hasil Penilaian AKIP BPKPAD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD meliputi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja BPKPAD adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan



pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja lingkup BPKPAD.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya administrasi keuangan lingkup BPKPAD.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pengadaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan lingkup BPKPAD.
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.

Adapun permasalahan dan solusi yang terdapat pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

a. **PERMASALAHAN**

Pada tahun 2022 terdapat satu sub kegiatan yang capaian kinerjanya sangat rendah yaitu pada sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini terjadi karena draft regulasi terkait BMD yang akan di sosialisasikan masih belum final dan masih berada di biro hukum Provinsi Sumatera Barat, sehingga menyebabkan sub kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga akhir triwulan IV.

b. **SOLUSI**

Disarankan kedepannya akan dilakukan percepatan dalam penyampaian draft perbaikan ranperda agar proses asistensi di biro hukum provinsi juga dapat diproses cepat.



22. BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
BAPEDALITBANG KAB. PESISIR SELATAN				6.650.191.099	6.362.231.284
1	Urusan Perencanaan			6.201.685.961	5.944.356.484
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	5.385.321.667	5.217.599.120
		Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	351.466.990	285.065.530
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	464.897.304	441.691.834
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah			448.505.138	417.874.800
		Penelitian dan Pengembangan Daerah		448.505.138	417.874.800

- Sasaran Strategis PK Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	25	*belum penilaian	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
2	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD	89.5%	100%	112
			Indeks Inovasi Daerah	60,02 (sangat inovatif)	*belum penilaian	-
			Inovasi Bapedalitbang	1	1	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A	A*	-



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1) Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

a. Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja

Target Kinerja : **25** / Realisasi Kinerja : ***belum penilaian**

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD, serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

➤ Pagu Anggaran : Rp. 351.466.990,-

➤ Realisasi : **Rp. 285.065.530,- (81,11 %)**

▪ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

✓ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

▪ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

✓ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

✓ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

▪ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

✓ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

✓ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

➤ Pagu Anggaran : Rp. 464.897.304,-

➤ Realisasi : **Rp. 441.691.834,- (95,01 %)**

▪ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.



- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- 2) **Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan**

b. **Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD**

(Target Kinerja : **89,5%** / Realisasi Kinerja : **100%**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD dengan sumber data diperoleh dari RPJMD.

c. **Indeks Inovasi Daerah**

(Target Kinerja : **60,02 (sangat inovatif)** / Realisasi Kinerja : ***belum penilaian**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang diberikan oleh Kemendagri.

d. **Inovasi Bapedalitbang**

(Target Kinerja : **1** / Realisasi Kinerja : **1**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Bapedalitbang.



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

➤ Pagu Anggaran : Rp. 448.505.138,-

➤ Realisasi : **Rp. 427.874.800,- (93,17%)**

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - ✓ Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - ✓ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - ✓ Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

e. Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

(Target Kinerja : **A** / Realisasi Kinerja : **A***)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ Pagu Anggaran : Rp. 5.385.321.667,-

➤ Realisasi : **Rp. 5.217.599.120,- (96,89%)**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.



- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari uraian program dan kegiatan diatas, seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator dari 3 sasaran Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

23. INSPEKTORAT DAERAH

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Penunjang Urusan	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Program Penyelenggaraan Pengawasan Sub Kegiatan :	Terlaksananya Pelayanan Adminsitirasi Perkantoran	7.259.541.900 1.536.725.630	7.088.056.154 1.522.337.636
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		62.799.750	60.248.750
23.			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	62.799.750	60.249.750
					8.859.067.280	8.670.643.540



Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Opini BPK - Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten - Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	WTP CC (56)	WTP CC (56,18)	100% 100,32 %
		Program Penyelenggaraan Pengawasan		BB	A	101,06%
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3	3	100%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Opini BPK

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.1 :

Tabel 2.2.1
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%



Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 2.2.1 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2020-2021 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100%.

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKPAD.
- b. Reviu RKPD Awal dan Reviu RKPD Perubahan yang disampaikan ke Bapedalitbang.
- c. Reviu LPPD yang disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- d. Reviu PBJ yang disampaikan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- e. Reviu Manajemen ASN yang disampaikan ke BPKSDM.
- f. Reviu Tata Kelola Perizinan yang disampaikan ke DPMPTSP
- g. Reviu Tata Kelola Pajak yang disampaikan ke BPKPAD.
- h. Reviu Tata Kelola Aset yang disampaikan ke BPKPAD.
- i. Reviu KUA dan KUPA PPAS yang disampaikan ke BPKPAD.
- j. Reviu SSH yang disampaikan ke BPKPAD.
- k. Reviu ASB yang disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- l. Reviu RKA Tahun 2023 atas 41 Perangkat Daerah.
- m. Reviu PMRB atas 10 Perangkat Daerah.
- n. Reviu DAK atas 11 Perangkat Daerah.
- o. Evaluasi LKj atas 41 Perangkat Daerah.

Pelaksanaan indikator ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.1.550.422.670,- dengan realisasi sebesar Rp.1.504.313.140,- atau 97,03%.



Beberapa Aksi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Opini WTP dapat dilihat pada tabel 2.2.2 :

Tabel 2.2.2
Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KEGIATAN	OBRIK/TAHUN					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	160	167	104	104	167	167
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan	99	99	19	19	2	2
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	329	329	300	300	611	611
4	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	45	45	45	45	41	41
5	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	45	45	45	45	41	41

Berdasarkan Tabel 2.2.2. diatas aksi Inspektorat Daerah telah melaksanakan tugas pokoknya dengan melakukan Audit terhadap Perangkat Daerah, Nagari dan Sekolah sebagai penunjang dalam pencapaian Opini BPK. Selain kegiatan tersebut diatas untuk mencapai Opini BPK, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini,.

Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan didukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Artinya laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten merupakan indikator kedua dari sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, hasil penilaiannya belum ada. Sebagai laporan kinerja Inspektorat Daerah untuk indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten masih berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dari Kemenpan-RB Nomor B/167/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten 56,18 atau dengan Kategori "CC" dengan target "CC". Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 :

Tabel 2.2.3
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	CC (55,06)	CC (56,18)	98,32 %	100,32%



Pada tabel 2.2.3. dapat dilihat capaian indikator nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten atas hasil evaluasi penilaian oleh Menpan RB-RI adalah “CC” atau 56,18 dengan Target “CC” atau 56 dengan persentase realisasi 100,32%.

Pada tahun 2022 penilaian atas Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan belum ada nilai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pada tahun 2022 dilaksanakan penilaian atas 11 Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan rata-rata bernilai 67,28 atau “B”. 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang dievaluasi antara lain :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informasi
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Dinas Kesehatan

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan akuntabel.
2. Pemerintah yang kapabel.
3. Pelayanan publik yang prima.



3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2021 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan.

24. SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ASISTEN I		Meningkatnya Peran Serta Pemerintah dalam Kegiatan Keagamaan dan sosial kemasyarakatan	7.197.686.744	6.899.225.934
			Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	220.319.044	219.089.070
			Jumlah Fasilitasi Rakor Gubernur dengan Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian permasalahan di Kecamatan Terfasilitasinya serah terima jabatan camat	44.619.118	44.296.730
			Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari	66.035.288	65.785.840
2	ASISTEN II		Meningkatnya Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1.086.041.772	1.020.167.615
			Terlaksananya Peningkatan Perekonomian di Pesisir Selatan	298.542.490	262.173.181
			Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida Terlaksananya pengendalian inflasi daerah	142.240.470	121.210.601



3	ASISTEN III	Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	25.641.989.361	24.261.844.915
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	189.211.390	187.914.846
			Ketersediaan pembinaan pengelolaan perencanaan lingkup sekretariat daerah	189.211.390	187.914.846
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	252.783.977	217.455.069
				33.925.717.877	32.181.238.464

25. SEKRETARIAT DPRD

Pada Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.997.098.711,00 dengan realisasi Rp.51.106.424.139,00 (98,29%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
				(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pendukung	Sekretariat DPRD		26.083.475.953	25.379.153.409	
			Persentase Sinkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	103.591.940	103.330.550	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan	3.717.942.712	3.488.494.592	
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.325.728	495.636.999	
			Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	0	0	
			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.010.515.158	951.147.001	
			Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	806.749.400	756.031.673	
			Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	19.236.383.090	18.897.452.810	
			Jumlah dan jenis peraturan yang dibahas DPRD	5.016.116.688	4.944.283.542	



NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
				(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
			Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah	76.390.000	76.250.000	
			Meningkatnya kemampuan dan pemahaman anggota DPRD	2.128.551.830	2.093.848.301	
			Terlaksananya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	7.498.678.200	7.421.003.698	
			Terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	11.193.886.040	11.191.885.189	
				51.997.098.711	51.106.424.139	98,29 %

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, dan Fungsi Pengawasan	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	80	77	96
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	90	81	90
3	Membuat inovasi tata kelola administrasi Sekretariat DPRD	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengarsipan secara digital	1 tahun	0	0

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, dan Fungsi Pengawasan. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD (Target Kinerja : 80 %) (Realisasi Kinerja : 77%).
Capaian menjadi 96% yang termasuk kategori sangat baik



yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
 - (7) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan output tersedianya gaji dan tunjangan anggota DPRD
 - (8) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan output tersedianya layanan administrasi DPRD

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan output jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang dihasilkan;
 - (2) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan output jumlah dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Dengar Pendapat DPRD dengan mitra kerja;
 - (3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan output jumlah dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD;



- (4) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan output jumlah usulan masyarakat dari hasil reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD;
- (5) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan output jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh anggota DPRD.

b. Meningkatkan Tata Risalah Persidangan

**Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu (Target Kinerja : 90%)
(Realisasi Kinerja : 81%)**

Capaian menjadi 90%

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.

c. Membuat Inovasi Tata Kelolaan Administrasi DPRD

**Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu (Target Kinerja : 90%)
(Realisasi Kinerja : 81%)**

Capaian menjadi 90



- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN

Permasalahan pelaksanaan program terkait fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- Masih belum sepenuhnya ketersediaan prasarana penunjang untuk peningkatan pelayanan
- Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap fungsi pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Masih ada anggota DPRD yang rendah pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan
- Masih kurangnya konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan Tata Tertib DPRD.

b. SOLUSI

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diperlukan beberapa solusi seperti :

- Kedepannya untuk melengkapi, mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi berbagai hambatan dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh
- Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Meningkatkan SDM anggota DPRD dalam pendalaman tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD serta menjalankan kegiatan berdasarkan Tata Tertib DPRD tersebut.

26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.542.575.387,00 dengan realisasi Rp.6.011.801.859,00 dengan tingkat realisasi mencapai angka 91.89 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PEMERINTAHAN	BADAN		6.542.575.387,-	6.011.801.859,-



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	UMUM	KESBANGPOL			
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	2.818.619.790,-	3.452.914.377,-
			Kegiatan Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.174.300,-	38.124.300,-
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.549.627.160,-	2.479.582.529,-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.339.374,-	284.301.110,-
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.317.000,-	104.314.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.420.500,-	168.378.188,-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.945.980,-	364.214.150,-
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Ekonomi dan Budaya	73.462.004	72.448.202
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.428.585.936,-	1.124.296.257,-

- Sasaran Strategis PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Inovasi SIMANTAP PESSEL (Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan) Jumlah Konflik Yang Terfasilitasi	1 10 Rekomendasi	0 13 Rekomendasi	0 130
2	Meningkat Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	80 %	95 %	118.75 %



		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	BB (72)	BB (77.14) (Nilai LKj 2021)	100 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memuaskan	Memuaskan	100 %

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator :

- Jumlah konflik yang terfasilitasi dengan target kinerja 10 rekomendasi dan terealisasi sebanyak 13 kasus yang dikeluarkan rekomendasinya oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Bertambahnya kasus yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol dikarenakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sudah lebih besar dan cakupan sudah luas. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menindak lanjuti surat pengaduan yang berasal dari masyarakat/lembaga masyarakat/isu-isu yang beredar dimasyarakat. Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan memfasilitasi pihak yang berkonflik. Pada tahapan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengundang OPD terkait dalam pengambilan keputusan untuk rekomendasi kasus yang ditangani. Hal ini di dukung oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan 2 Sub Kegiatan yaitu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini , Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah pada sub kegiatan ini dilaksanakan pemberian hibah uang kepada Polres Pesisir Selatan dalam rangka pembangunan gedung barang bukti dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang



Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan monev. Dalam pelaksanaan Program ini ada 2 (dua) hibah yang tidak dapat di salurkan yaitu :

- Hibah untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga Kapolres Pesisir Selatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 2022 Polres Pessel sudah menerima Hibah Pembangunan Gedung Penyimpanan Barang Bukti. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah, dimana dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diperbolehkan menerima hibah dua kali berturut-turut dalam satu tahun anggaran.
- Hibah untuk Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan, yang mana dalam hibah ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyerahkan hibah dalam bentuk uang berdasarkan peraturan dari Kejaksaan Negeri hanya boleh menerima hibah dalam barang.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 500 orang dengan capaian 100 %, di dapat dari jumlah penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan yaitu dengan 21 kali pelaksanaan upacara hari besar nasional dengan realisasi 19 upacara sedangkan 3 kali upacara secara zoom meeting.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 2 sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan



Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan indicator :

- a. Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 64 orang dan terealisasi 530 orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di dapat dari jumlah penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan PEKAT dengan target 6 kali pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan pengawasan PEKAT antara lain Sosialisasi P4GN yang telah dilaksanakan pada 6 kecamatan yaitu Kecamatan IV Jurai 2 kali pertemuan, Pancung Soal, Ranah IV Hulu dan Silaut yang merupakan dari anggota dewan Propinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Bakri Bakar dan Kecamatan Lengayang untuk pembinaan kampung Narkoba.
- b. Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, Budaya, dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Daerah dengan target 2 dokumen laporan.

2. Meningkatkan kualitas demokrasi di Pesisir Selatan dengan indicator :

- Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil

Pada indikator ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah melaksanakan Bimbingan Teknis Keuangan bagi Pengurus Partai kemudian juga telah menyalurkan hibah keuangan pada 13 Partai Politik. Pencapaian target dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,



Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- a. Jumlah ormas yang melaksanakan aktifitas sesuai dengan Regulasi dengan target 45 ormas dan terealisasi 17 ormas, dari 45 ormas yang terdata dari tahun sebelumnya 17 diantaranya merupakan ormas yang telah melakukan registrasi ulang. Fungsi Organisasi masyarakat diharapkan mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial.

27. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Kecamatan Koto XI Tarusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Belanja (RP)			Hasil Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	Capaian	Rencana	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.417.981.854	2.278.604.740	94,25			
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.413.000	6.665.500	99,56	12 Bulan	12 Bulan	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.191.754.354	2.051.805.415	94,82	12 Bulan	12 Bulan	100%
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.182.466	123.796.818	97,09	12 Bulan	12 Bulan	100%
d	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	48.247.450	46.693.144	95,20	12 Bulan	12 Bulan	100%
e	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	58.384.584	49.643.863	98,98	12 Bulan	12 Bulan	100%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.300.000	42.828.865	59,24	100 persen	100 persen	100%
a	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat.	72.300.000	42.828.865	59,24	100 persen	100 persen	100%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	49.177.000	46.704.133	99,80	100 Persen	100 Persen	100%
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	49.177.000	46.704.133	99,80	100 persen	100 persen	100%



IV	PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.779.000	17.704.850	94,28	20 Kasus	20 Kasus	100%
a	KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.	16.779.000	17.704.850	94,28	20 Kasus	20 Kasus	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.001.500	21.014.900	96,61	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	21.001.500	21.014.900	96,61	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA	34.625.000	36.589.080	99,72	100 Persen	100 Persen	100%
a	FasilitasiRekomendasi dan koord.Pimpinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	34.625.000	36.589.080	99,72	Persen	Persen	100%
JUMLAH		2.611.864.354	2.443.446.568				

**28. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYANG**

Kecamatan Bayang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIA N
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Nilai LAKIP	I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.684.174.401	2.577.549.403	96,03
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58.665.000	58.665.000	100,00
		III Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.630.830	46.623.500	99,98
		IV Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.162.500	11.162.500	100,00
		V Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	23.940.000	23.940.000	100,00



			Umum			
3	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari	VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.690.000	18.690.000	100,00
JUMLAH				2.843.262.731	2.736.630.403	96,25

- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Camat Bayang**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Nilai LAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	B	B	100
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	100%	100	100
3	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi, monev dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan Nagari	17 nagari	17 nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. **Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:**

1. **Meningkatkan Nilai LAKIP (Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : 100 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan



indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya tugas ASN sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk ASN kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga dapat menunjang pelaksanaan kantor.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat kegiatannya berupa :
 - a) Peningkatan PHBI Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya PHBI ASN dan terlaksananya peringatan Hari Besar Islam.



- b) Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan MTQ yang diikuti.
 - c) Pembinaan Didikan Subuh Tergiat dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan didikan subuh tergiat.
 - d) Pembinaan UKS dengan output kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan Kecamatan Bayang yang sehat dan asri, hal ini dapat dilihat peringkat hasil penilaian Lingkungan Kecamatan Sehat.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berupa :
 - a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD yang baik dan tersedianya hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2021.
 - b) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK yang dibina dan difasilitasi produk unggulan yang dibina di kecamatan bayang.
 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan hal ini dapat dilihat dari jumlah permasalahan di bidang trantibum yang dapat difasilitasi dan diselesaikan.
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah berupa :
 - a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan output kegiatan ini adalah Pelaksanaan PHBN, terlaksananya PHBN yang di ikuti.



b) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan output kegiatan ini adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam kecamatan bayang.

3. Meningkatkan kualitas Pemerintahan Nagari (Target Kinerja : 17 Nagari) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

**29. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	KEWILAYAHAN	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA		1.866.501.221	1.796.518.130
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1.724.928.271	1.657.186.630
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.422.101.443	1.363.959.125
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		168.737.126	162.447.300



			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		65.469.782	63.824.105	
2			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		68.619.920	66.956.100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur		64.930.250	63.712.500
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			64.930.250	63.712.500
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		46.478.200	45.454.500	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			46.478.200	45.454.500
4			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13.265.000	13.265.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.265.000	13.265.000
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		16.899.500	16.899.500	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.899.500	16.899.500
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya HUT RI		16.899.500	16.899.500

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

- a) Dalam hal pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, permasalahan yang timbul adalah Alokasi anggaran yang tersedia dirasakan sangat kurang dalam mengakomodir seluruh kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga hal ini berakibat pada minimnya tingkat pencapaian kinerja pegawai yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
- b) Minimnya ketersediaan anggaran untuk kecamatan khususnya anggaran pembinaan pemerintahan nagari, jika dikaitkan dengan rendahnya SDM Aparatur Pemerintah Nagari.



- c) Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi.
- d) Pelayanan dasar kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan belum optimal.
- e) Masih minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penunjang program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- f) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.

2. SOLUSI

- a) Mengajukan Penambahan Anggaran pada Anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.
- b) Menambahkan Anggaran pada Program yang di rasa perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan dalam rencana kerja kecamatan tahun 2023.
- c) Mengajukan Usulan Penambahan Personil Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam rangka memaksimalkan kualitas Pelayanan dan Meningkatkan kinerja personil sehingga dapat melaksanakan tupoksi dengan lebih optimal dan mengadakan pelatihan bagi aparatur untuk mendukung kinerja yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- d) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan ditingkat kecamatan baik perizinan maupun non perizinan.
- e) Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di Kantor Camat telah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

30. URUSAN : KEWILAYAHAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN IV JURAI

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	7	11	12
1	Kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	2.441.748.159	2.351.508.720
		Program Penyelenggaraan	Persentase ketercapaian penyelenggaraan	66.724.970	66.706.760



	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemerintahan dan pelayanan publik		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	45.989.970	45.956.270
	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	13.525.910	13.525.910
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ketercapaian penyeenggaraan urusan pemerintahan umum	24.051.770	23.982.570
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15.486.180	15.486.180

1. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BATANG KAPAS

Kecamatan Batang Kapas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Umum	Kecamatan Batang Kapas	I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor.	2.009.824.983	1.947.344.864
			1.Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.	Terpenuhinya perenc.dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.930.500	4.680.500
			2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.662.848.163	1.608.906.677



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			3.Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Terpenuhinya Administrasi Umum ktr.(Bln).	139.842.109	138.558.605
			4.Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah.		81.614.500	75.211.557
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.748.111	7.700.000
			6.Pemeliharaan brg Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.		112.841.600	112.287.525
			II.PROGAM PENYELENGGARAAN PEM.DAN PELAYANAN PUBLIK		100.172.500	93.876.000
			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		29.975.000	29.096.000
			2.Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat		70.197.500	64.820.000
			III. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASY. DESA /KEL.		9.493.000	9.420.000
			1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		5.370.000	5.313.000
			IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.097.500	22.047.500
			1.Koordinasi Upaya			22.047.500



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		22.097.500	
			V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.		19.650.000	19.570.000
			1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah.		19.650.000	19.570.000
			6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord.Pimp.dan Pengawasan Pem-Desa.			

**32. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUTERA**

Kecamatan Sutera dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kewilayahan	Kec. Sutera		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.901.074.482	1.853.135.280
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.455.400	9.372.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.617.549.483	1.575.370.342
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.413.417	129.137.800
				Pengadaan Barang milik	28.265.162	27.810.000



					daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
					Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	56.685.020	56.318.688
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	55.706.000	55.126.450
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	74.950.000	74.830.000
					Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	74.950.000	74.830.000
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				43.790.000	43.526.000
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Nagari	43.790.000	43.526.000
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				25.760.000	25.720.000
	22 23				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	25.760.000	25.720.000
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16.975.000	16.955.000
	24				Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.975.000	16.955.000
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.975.000	16.955.000
						2.062.549.482	2.014.166.280

**33. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LENGAYANG**

Kecamatan Lengayang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:



NO	SASARAN	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.844.763.249	1.842.785.009		
		-	Perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.879.350	4.879.350	99,98
		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.601.792.846	1.572.787.106	95,53
		-	Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	5.430.903	5.430.903	66,62
		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.472.020	126.619.520	66,62
		-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.149.164	66.149.164	98,12
		-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.038.966	66.918.966	99,98
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	166.967.000	154.589.500		
		-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	104.952.000	92.574.500	88,20
		-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.015.000	62.015.000	99,35
		IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.500.000	7.500.000	98,67
		-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.500.000	7.500.000	98,67
		V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.353.500	23.353.500	99,95
		-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.353.500	23.353.500	99,95
	Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	62.015.000	62.015.000	99,35
		-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.015.000	62.015.000	99,35
3	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.200.000	8.200.000	100,00
		-	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa	8.200.000	8.200.000	100,00



- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Camat Lengayang

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	85 %	85 %	100
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Pablik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pablik	A	BB	85
3.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Junlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelolah Keuanagn dan Pemerintahan yang baik.	9 Nagari	9 Nagari	100
4	Menigkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif dan Subuh Berjemaah	9 Nagari	9 Nagari	85

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Peningkatan Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:

- a. Meningkatkan Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja dengan indikator kinerja yaitu:

Persentase Nilai Lakip Kecamatan (Target Kinerja (A) Realisasi Kinerja (BB)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output Laporan Laporan Perangkat Daerah yang di hasilkan di Lingkungan Kecamatan Lengayang.



2. Kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Keuangan Perangkat Daerah output fasilitasi Keuangan yang Menghasilkan Belanja Daerah.

b. Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja yaitu:

Indek Kepuasan terhadap- Pelayanan publik (Target Kinerja : 85 % (Realisasi Kinerja 85%))

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan pada Camat dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap Pelayanan publik dan laporan Ketertiban dan Ketentraman Umum.

c. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman aparatur Pemerintahan Nagari dalam adminisrasi dalam Pengelolaan Keuangan , dengan indikator kinerja yaitu:

Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja : 9 Nagari (Realisasi Kinerja : 9 Nagari))

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa dengan output memfasilitasi, monev terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

d. Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat , dengan indikator kinerja yaitu:



Dengan Jumlah Masjid yang aktif dan Jumlah Masjid yang mengadakan Didikan Subuh (Target Kinerja : 9 Nagari (Realisasi Kinerja : 9 Nagari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.n Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.dengan output memfasilitasi, Kegiatan tentang Keagamaanv terhadap kegiatan dan pemerintahan Nagari.

**34. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANAH PESISIR**

Kecamatan Ranah Pesisir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp) sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.326.402.159	2.145.288.241	2.077.365.546	96,83
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.120.000	13.120.000	13.101.136	99,86
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.862.450	57.862.450	57.776.314	99,85
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.897.600	37.897.600	36.145.463	95,38
4	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.777.500	46.777.500	46.756.447	99,95
			2.482.059.709	2.300.945.791	2.231.144.906	96,96



- Sasaran Strategis PK Camat Ranah Pesisir

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Tersusunnya Dukumen anggaran Keuangan untuk 1 tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelaporan yang tertib	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu ecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100%
3	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan Nagari	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina	10 Nagari	10 Nagari	100 %
4	Terwujudnya Fasilitas dan pembinaan lembaga sosial dan Ekonomi Masyarakat		Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan pkk	1 Nagari	1 Nagari	100 %

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Pesisir, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2022. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat
 - b) Belanja Modal Pengadaan Komputer
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Pesisir.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:



a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.**

(Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 80%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan
 - c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - b) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Jumlah Nagari berkinerja baik.**

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

35. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.663.747.359	1.751.679.369
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	77.017.080	77.017.080
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.443.640	50.943.640
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.510.000	46.510.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.540.000	15.290.000
	J U M L A H	1.852.258.079	1.941.440.089



- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2022.

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN.							
Tujuan 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.							
1.1.1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.	1.	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Skala	BB (70)		-
		2.	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	2	2	100
1.1.3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	80	79	98.75
MISI 3 : MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH							
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan.							
3.1.2	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1.	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	%	45	45	100
MISI 6 : MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS.							
Tujuan 6.1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis.							
6.1.1	Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	%	90	90	100
Rata-rata Capaian Indikator 4 Sasaran Strategis : 5 Indikator Kinerja							99,75

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2020.
 1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti (Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)
Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan output Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
 - (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.



Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan. (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 92%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik. (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

**36. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AIRPURA**

Kecamatan Airpura dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kewilayahan	Kec. Airpura	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,93	1.149.421.493	1.044.622.525
2			Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	156.916.904	156.865.117
3	Kewilayahan	Kec. Airpura	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,73	42.167.000	42.050.638
4	Kewilayahan	Kec. Airpura	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,98	104.518.176	104.300.300
5	Kesehatan	Kec. Airpura	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	100	58.416.920	58.110.500
6	Perencanaan	Kec. Airpura	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	40.646.000	40.575.000
7	Kewilayahan	Kec. Airpura	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	30.185.000	30.134.000

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan PATEN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitasi Pelayan Administrasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan	100	100	100



2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai LAKIP Kantor Camat	BB	BB+	90
3	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10 Nagari	10 Nagari	90

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. **Meningkatnya Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya ketersediaan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (bln).
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln)
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output terkelolanya Ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln).
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan alat tulis (bln)
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln)
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (bln)
- (7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln).



- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln)
- (9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (bln)
- (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln)
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang tersedia.
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari dengan output Persentase tata kelola keuangan dan Pemerintahan nagari yang baik, Jumlah nagari yang dibina dan dfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

**37. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANCUNG SOAL**

Kecamatan Pancung Soal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/SUB KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4		5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Kualifikasi Nilai LKj Kecamatan	I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.815.638.978	1.726.035.008	95,06
			-	Perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.545.050	13.205.050	97,49
			-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.327.938.618	1.244.251.723	93,70



			-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.332.178	112.094.476	97,19
			-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.136.130	116.328.469	99,31
			-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.687.002	240.155.290	99,37
		Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	II	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.000.000	2.869.950	95,67
			-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.000.000	2.869.950	95,67
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) ditingkat Kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai dengan standar pelayanan	III	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67.766.000	65.184.294	96,19
			-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	67.766.000	65.184.294	96,19
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.826.500	26.634.786	95,72
			-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.826.500	26.634.786	95,72
			V	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.200.000	3.029.100	94,66
			-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.200.000	3.029.100	94,66
			VI	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.867.140	20.012.321	91,52
			-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.867.140	20.012.321	91,52
					1.939.298.618	1.843.765.459	95,07



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2022.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Kualifikasi Nilai LKj Kecamatan 2. Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	A 10 Nagari	7 Nagari	70 %
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) ditingkat Kecamatan	3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5. Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai dengan standar pelayanan	86 %	96,19 %	111,63 %
3.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Pablik	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 8. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4. Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu 5. Jumlah Dokumentasi / Berita PPID Pembantu 6. Inovasi Kecamatan	75 Dokumen 20 Berita 1 Inovasi	255 Dokumen 308 Berita 1 Inovasi	340 % 1.540 % 100 %

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Pancung Soal Tahun 2022.**

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja. yaitu:

➤ **Kualifikasi Nilai LKj Kecamatan (Target Kinerja : A, Realisasi Kinerja dalam proses penilaian)**

Meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik (Target Kinerja : 10 Nagari, Realisasi Kinerja 7 Nagari)**
- Meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) ditingkat Kecamatan yaitu:
- **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai dengan standar pelayanan (Target Kinerja : 86%, Realisasi Kinerja 96,19%)**
- Meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Pablik yaitu:
- **Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu (Target Kinerja : 75 Dokumen, Realisasi Kinerja : 255 Dokumen)**
- **Jumlah Dokumentasi / Berita PPID Pembantu (Target Kinerja : 20 Berita, Realisasi Kinerja : 308 Berita)**
- **Inovasi Kecamatan (Target Kinerja : 1 Inovasi, Realisasi Kinerja : 1 Inovasi)**



Meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

**38. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan	Nilai LKj Kecamatan	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.527.507.225	1.521.479.070	99,61
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat	- Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu	- Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	61.010.150	60.163.150	98,61
		- Jumlah berita PPID pembantu	- Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum	5.135.000	5.135.000	100



			- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	22.380.000	22.351.500	99,87
3	Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dan Dibina	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.123.800	46.786.500	99,28
			- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.862.500	15.862,500	100
	Jumlah			1.679.018.675	1.671.777.720	99,57

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKj Kecamatan	BB	BB	100
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat	- Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	- Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu - Jumlah berita PPID pembantu	75 36	311 255	414,66 708,33
3.	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Dibina	10 Nagari	10 Nagari	100



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
 - a. **Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan, dengan indikator kinerja yaitu: Nilai LKj Kecamatan (Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)**
yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan perencanaan dan keuangan yang dihasilkan.
 - b. **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu dan Jumlah berita PPID pembantu (Target Kinerja : 75 Dokumen dan 36 Berita (Realisasi Kinerja : 311 dokumen dan 255 berita)**
yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan output jumlah rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dilimpahkan kepada Camat.
 - c. **Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja : 10 Nagari (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)**
yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara

RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa dengan output memfasilitasi, monev terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

38. URUSAN : KEWILAYAHAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URUSAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	165.641.071
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	73.200.000
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0 Kali	0
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	0 Kali	0
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0 Kali	0
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat	12 bulan	24.745.000
		Program Peningkatan IMTAQ	12 bulan	6.745.000
		Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan	0 bulan	0
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Kali	8.714.350
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	12 bulan	3.100.000

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100 %
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya Baik	10 Nagari	10 Nagari	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang	BB	BB	100 %

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Lunang Tahun 2022.**

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan**

(Target Kinerja : 85 %) (Realisasi Kinerja : 85%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di Kantor Camat Lunang.

2. **Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Jumlah Nagari yang Pengelolaan keuangannya Baik.**

(Target Kinerja : 10 Nagari) (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : :

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari di Kantor Camat Lunang.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai Evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

(Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
- (3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (4) Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (6) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- (7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (8) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (9) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (10) Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
- (11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (12) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- (13) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (16) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (17) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- (18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (19) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- (20) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- (1) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
- (2) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- (3) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- (2) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai Evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN

- 1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.
- 2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
- 3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
- 4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.

b. SOLUSI

- 1. Menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2022
- 2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
- 3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksinya
- 3. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat



40. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUNANG

Kecamatan Lunang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.511.102.325,-	Rp. 1.598.981.246,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 57.920.000,-	Rp. 53.220.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 35.520.000,-	Rp. 35.520.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.205.000,-	Rp. 28.205.000,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.850.000,-	Rp. 7.850.000,-
J U M L A H		Rp 1.640.597.325,-	Rp 1.723.776.246,-

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Lunang Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	80%	80%
2.	Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya Baik	10	10
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang	B	B

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Lunang Tahun 2022.

4. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang (Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)



Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (9) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (11) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah.
 - (12) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedakam daerah.
 - (13) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.



- (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.**

(Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : -%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Pemantapan Otonomi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (2) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan dengan output Jumlah Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (3) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (4) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (5) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan output Jumlah usulan/Program yang tertampung dalam RPJMD.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (6) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari Yang Baik dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Jumlah Nagari berkinerja baik.**



(Target Kinerja : 10 Nagari) (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (21) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

c. PERMASALAHAN

1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.
2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.

d. SOLUSI

1. Menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2021
2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksinya
4. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat

**41. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SILAUT**

Kecamatan Silaut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kewilayahan	Kantor Kecamatan Silaut	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.694.619.309	1.664.787.877
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.662.880,-	3.662.880,-
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	1.374.806.649,-	1.345.874.212,-



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Daerah		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.151.940,-	155.772.160,-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.017.000,-	64.945.000,-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.980.840,-	94.533.625,-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92.184.839,-	83.879.589,-
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	92.184.839,-	83.879.589,-
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.968.000,-	29.853.000,-
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.968.000,-	29.853.000,-
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.882.500,-	3.697.250,-
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.882.500,-	3.697.250,-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.842.000,-	3.219.500,-
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.842.000,-	3.219.500,-
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.720.000,-	86.344.000,-
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.720.000,-	86.344.000,-

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Silaut.

No.	SASARAN KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntebel dan berkinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Silaut	BB (70)		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	2 Nagari	2 Nagari	100.00
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	80%	79%	98.75
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	45%	45%	100.00
4	Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	90%	90%	100.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Silaut.

1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntebel dan berkinerja, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai evaluasi LKj Kantor Camat Silaut

(Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LKj Kantor Camat Silaut Tahun 2022. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - c) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target **indikator Nilai evaluasi LKj Kantor Camat Silaut.**

b) Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik.

(Target Kinerja : 2 Nagari) (Realisasi Kinerja : 2 Nagari)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:



- a) Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa
- b) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik

2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Persentase pelayanan yang tepat waktu.**
(Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 79%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan.
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator **Persentase pelayanan yang tepat waktu.**

3. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan.**
(Target Kinerja : 45%) (Realisasi Kinerja : 45%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - d) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator **Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan.**

4. Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan.**
(Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 90%)



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan.**

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pengawasan Teknis Pertambangan Mineral Non Logam di Kabupaten Pesisir Selatan	Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 660/105/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 20 Januari 2020.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pertambangan mineral non logam pada Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan.
2.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Landasan, arah dan prioritas kegiatan untuk percepatan penanganan perumahan dan permukiman pembangunan dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	1. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran
5.	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan



	masyarakat	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal. 	masyarakat
6.	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur rumah sakit	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);	Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya



7.	Meningkatkan kemandirian keuangan RS	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502; - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. 	Meningkatkan pendapatan RS dengan menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan
8.	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS
9.	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin		Rendahnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
10.	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Rendahnya pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan pada generasi muda
11.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan		Rendahnya pemahaman pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah



	dan proses pembangunan di semua bidang		Daerah
12.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.		Cenderung meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
13.	Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
14.	Meningkatkan status Nagari berdasarkan Profil Nagari	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Terlaksananya regulasi pengelolaan pemerintahan Nagari, pemberdayaan kelembagaan Nagari dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat Nagari
15.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang lestari	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Terlaksananya peningkatan pemakaian pasangan usia subur dalam menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek
16.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.	Kemudahan dan pelayanan prima dalam berinvestasi
17.	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Landasan, arah, pedoman dan prioritas pembangunan pertanian ditingkat Kecamatan baik itu SDM



			maupun SDA pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tani Kabupaten Pesisir Selatan.
18.	Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (e-government).
19.	Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung kedelai dan peningkatan produksi daging	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
20.	Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Melakukan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 186.683 kg
21.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
22.	Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Penguatan lembaga usaha pangan masyarakat melalui anggaran yang bersumber dari APBN melalui penguatan modal PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia melalui penyaluran beras kepada masyarakat di bawah harga pasar.



23.	Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Menunjuk petugas pemantau harga di setiap Kecamatan dan satu petugas Tingkat Kabupaten
24.	Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Dinas Pangan melakukan pembinaan terhadap 15 Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang mendapat bantuan sebesar Rp40.000.000,- per kelompok berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat. Anggaran tersebut diberikan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan.
25.	Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan dan pemantauan dilakukan selama 3 bulan, setelah itu dilakukan <i>refocusing</i> terhadap anggaran sehingga tidak mencapai target sampai ke nagari-nagari
26.	Peningkatan produk olahan pangan khas kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan tidak dapat dilakukan terhadap kelompok pengolahan pangan lokal karena anggaran tidak tersedia



27.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disnakertrans		1. meningkatnys layanan umum Disnakertrans
28.	Menurunnya tingkat pengangguran		2. Peningkatan jumlah pelatihan dengan dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja 3. Peningkatan skill instruktur yang bersertifikasi 4. Penyediaan jumlah alat-alat untuk pelatihan dalam kondisi baik 5. Renovasi ruang pelatihan menjadi ruang yang representatif
29.	Peningkatan kemandirian masyarakat transmigran		6. Pembangunan jumlah infrastruktur jalan dan jembatan 7. Perberdayaan jumlah infrastruktur yang difungsikan 8. Pelaksanaan pendampingan kepada lembaga ekonomi masyarakat 9. Peningkatan luas jangkauan akses IT di kawasan transmigrasi 10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada lembaga ekonomi. 11. Terlaksananya kemudahan akses perbankan kepada lembaga ekonomi masyarakat
30.	Penyusunan rencana pembangunan	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan



	tahunan daerah	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
31	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Prsisir Selatan.	Mengidentifikasi, menilai dan memantau secara efektif dan efisien dalam rangka pengendalian segala bentuk risiko
32.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dapat ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan akuntabel.
33.	Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/504/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2020	Pedoman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
34.	Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700:513/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten	Terkoordinirnya pengelolaan risiko Pemda.



		Pesisir Selatan Tahun 2020.	
35.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/024/Kpts/DKPS-PS /2020 Tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan dinas yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
36.	Memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Administrasi Kependudukan dengan membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 	Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) di seluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil dalam melayani masyarakat 2. Melaksanakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat (terjangkau, mudah, tepat, cepat dan akuntabel)
37.	Penyusunan rencana	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka



	pembangunan tahunan Kecamatan	Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2020	perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
38.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah	Perda nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kawasan KTM Lunang Silaut	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan kawasan KTM Lunang Silaut khususnya dikecamatan Silaut.
39.	Pengembangan kawasan perdesaan terintegrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sawit.	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dengan Ternak Sapi bali di Kecamatan Silaut Tahun 2017-2022	Untuk lebih memfokuskan pengembangan ternak dengan memanfaatkan potensi lahan perkebunan sawit sebagai produk unggulan Kecamatan.
40.	Pengembangan kawasan perhutanan sosial	Permen LHK Nomor P.49/MENLHK/2017 Tahun 2017 tentang Pola Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut dalam peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu membuat inovasi, kreasi, dan terobosan-terobosan yang mampu merubah serta meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik dari sebelumnya.	Pada tahun 2022 seluruh Kepala Perangkat Daerah telah membuat inovasi, dan telah diinput ke aplikasi Kemendagri untuk penilaian. Inovasi tersebut sebagian telah diimplementasikan.	Dengan telah dijadikannya inovasi sebagai perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, hal ini menjadi sejalan dengan visi, misi, dan program aksi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan adanya Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetiap kecamatan yang mempermudah masyarakat dalam mengurus KTP-el, Kartu Keluarga, Akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya untuk melayani masyarakat dengan optimal dan sepenuh hati. Hal tersebut diwujudkan dengan terus mengembangkan Grand Inovasi - Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan SALAM SAPA KE PINTU RUMAH (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat SAmPAi Ke PINTU RUMAH) pada	Terwujudnya Pelayanan yang prima kepada masyarakat.



	<p>Kelahiran dan Akta Kematian.</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Inovasi SALAM SIS KE CAMAT (Sistem Administrasi LAyanan Masyarakat BerbaSIS KECAMATan), membentuk kantor UKL (Unit Kerja Layanan)/Cabang Dinas di setiap Kecamatan (15 Kecamatan) pada tahun 2018. 2. Layanan inovasi SIPENAMPUNG (Sistem Inovasi PElayaNAn Masyarakat KamPUNG) kerjasama dengan 480 Kepala Kampung. 3. Layanan Inovasi BERPUTAR (BERkeliling KamPUNg JempuT AntAR), Masing-masing UKL Disdukcapil di Kecamatan disediakan kendaraan Roda 2 dan digunakan untuk berkeliling kampung setiap hari ke rumah-rumah penduduk menjemput permohonan dan mengantarkan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukannya. 4. Layanan Inovasi TURUD BERDUKA (TUrun Ke RUmah Duka BERikan 	
--	-------------------------------------	--	--

		<p>DokUmen KemAtian) kerjasama dengan 480 kampung</p> <p>5. Layanan Inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat PerNIKAHan)kerjasama dengan Kantor Kemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA).</p> <p>6. Layanan Inovasi SEHAT (Semoga Cepat seHAT).</p> <p>7. Layanan Inovasi THR (Terpadu Hari Raya) kerjasama dengan Dinas Pariwisata.</p> <p>8. Layanan Inovasi SELAMAT LAHIR (Setelah Lahir MendApat AkTa KeLAHIRan)kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).</p> <p>9. Layanan Inovasi JEBOL PER SISWA (JEmput BOLA PERekaman SISWA) kerjasamadengan Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah SLTA</p> <p>10. Layanan Inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) kerjasama dengan Dinas Pendidikan</p> <p>11. Layanan Inovasi MELISA (MElayani PeduLI lanjut USiA) kerjasama dengan seluruhpemerintah</p>	
--	--	---	--

		<p>Desa/Nagari</p> <p>12. Layanan Inovasi PEDULI DISABILITAS (PElayanan Dokumen KependUdukan PeduLIDISABILITAS) kerjasama dengan Dinas Sosial</p> <p>13. Layanan Inovasi MERDEKA (MEmbahagiakan MasyaRakat DENGAN KAmudahan) di hari besar Nasional, kerjasama dengan RSUD, Puskesmas dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) .</p> <p>14. Layanan Inovasi KADOKU KPEL (KTP ELEKTRONIK untuk SISWA berulang tahun 17 tahun) kerjasama dengan sekolah SLTA</p> <p>15. Layanan inovasi LADO KUTU (LAyanan DOkumen KependUdu TerpadU) kerjasama tiga instansi (Dinas Dukcapil - RSUD - BPJS Kesehatan), loket LADO KUTU di RSUD dan di Kantor BPJS</p> <p>16. Layanan Inovasi NOT WAITING AND DELIVERY TO HOME, Layanan Registrasi Mandiri Online 'ladokutu mobile' via Web dan aplikasi WathSapp. Dokumen diantarlangsung ke rumah penduduk</p>	
--	--	---	--

		(mendukung program pemerintah untuk penanganan penanggulangan Covid-19 pada masa Pandemi).	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, jujur, transparan dan akuntabel, terutama tentang penempatan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negeri (ASN). Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang	<p><u>Program :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN <p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Pembinaan Disiplin ASN 	BKPSDM selaku penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sepakat dengan legislator bahwa penting menerapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, jujur, transparan dan akuntabel, terutama tentang penempatan dan pembinaan manajemen ASN. Sehingga



<p>Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Diantara data dan laporan yang diterima oleh anggota DPRD, penempatan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan, baik itu di kantor, dinas dan badan, terutama yang</p>	<p>3. Pengelolaan Mutasi ASN 4. Pengelolaan Promosi ASN 5. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</p>	<p>pelanggaran-pelanggran terhadap pelaksanaan aturan hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan lain sebagainya akan kami benahi.</p> <p>Melalui Perangkat Daerah yang terkait yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan akan kami instruksikan agar segera melakukan evaluasi dan kajian terhadap penetapan dan rekrutmen serta asesmen terhadap ASN yang menempati atau menduduki jabatan. Tentunya hal ini juga perlu kami harapkan dukungan kita</p>
--	---	--



	<p>paling menjadi sorotan yaitu pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (2), pengangkatan kepala sekolah yang usianya sudah melewati 56 tahun, menonjobkan beberapa Kepala Puskesmas dan kepala sekolah tanpa ada pertimbangan yang jelas sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama PP tentang Disiplin Pegawai dan Manajemen ASN. Berdasarkan LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, Rendahnya target sasaran strategis yang hanya 0 (nol) persen untuk meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN dan 25 persen untuk meningkatnya manajemen</p>		<p>secara bersama agar harapan tata kelola atau manajemen ASN ini bisa berjalan dengan baik dengan sokongan Standar Operasional Prosedur (SOP), SDM dan sumberdaya-sumberdaya pendukung lainnya.</p> <p>Terkait rendahnya target IP ASN dan target 25 persen untuk meningkatnya manajemen sistem karir ASN, dapat kami sampaikan bahwa untuk mencapai nilai Indeks Profesional ASN diperlukan dukungan yang komprehensif, seperti harus terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan</p>
--	---	--	--

<p>sistem karier ASN di BKPSDM, telah membuat mutasi, rotasi, dan promosi ASN yang dilaksanakan Pemerintah Daerah beberapa waktu belakangan ini tidak mencerminkan lagi sistem pola karier PNS yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada standar analisis beban kerja dan jabatan yang menjadi dasar penetapan tersebut baik itu kompetensi dan kualifikasi, sehingga penempatan pejabat tersebut lebih terkesan dipaksakan. DPRD meminta Agar dilakukan evaluasi dan kajian ulang penetapan dan rekrutment serta assesmen terhadap calon ASN yang menempati atau menduduki jabatan, sesuai dengan aturan perundang-undangan</p>		<p>jabatan yang diemban oleh seorang PNS. Sehingga keterbatasan ketersediaan dana pengembangan sumber daya manusia sangat mempengaruhi peningkatan IP ASN tersebut.</p> <p>Selanjutnya rekomendasi tentang menerbitkan Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati tentang analisis jabatan dan beban kerja agar menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan penempatan ASN dalam menduduki sebuah jabatan akan kami dindaklanjuti melalui unit kerja terkait.</p>
---	--	---

	<p>baik itu kualifikasi dan kompetensinya, dengan segera menerbitkan Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan penempatan ASN dalam menduduki sebuah Jabatan.</p>		
--	--	--	--

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<p>Sesuai dengan arahan kebijakan dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan manusia beriman, kreatif dan berdaya saing, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baik</p>	<p>a. Pembangunan relokasi SDN 28 Pasar Surantih yang terkena bencana abrasi masih terkendala belum tersedianya anggaran pengadaan tanah tetapi kita upayakan pembangunan DAM penahan ombak yang permanen sehingga diharapkan sekolah aman dari terjangan abrasi. b. Memang ditemukan keretakan tanah miring disebelah perpustakaan sekolah dan apabila hujan lebat diduga akan longsor, kita akan upayakan parit miring penahan tebing di</p>	

	<p>yang belum tersentuh pembangunan maupun yang rusak akibat dari bencana seperti a. Pembangunan kembali sekolah dasar seperti SDN 28 Surantih di Kecamatan Sutera dan SDN 02 Teratak Teleng di Kecamatan Bayang Utara yang rusak akibat bencana. b. Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Ujung Air Kenagarian Ampiang Parak kecamatan Sutera, dan banyak lagi yang lainnya. c. Perbaikan Jembatan menuju SMP N 05 Satu Atap Sungai Bungin Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batangkapas. d. Perbaikan jalan menuju SMPN 4 Bayang Kenagarian Sawah Laweh yang telah rusak parah.</p>	<p>anggaran perubahan 2023. c. Bukan Wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. d. Bukan wewenang Dinas pendidikan dan Kebudayaan.</p>	
2	<p>Dibidang Pendidikan, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyarankan pada Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut : 1) Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>a. penggunaan dana bos regular diatur permendikbudristek setiap tahunnya dan sekolah dalam menggunakannya diikat dengan aplikasi arkas untuk sekolah dan markas untuk dinas dimana dalam transaksi dinas bisa memantau sekolah serta setiap tahun disdikbud melaksanakan pemeriksaan internal penggunaan bos dan</p>	

<p>Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS dan BOSDA SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar disekolah. 2) Agar tidak ada masalah dikemudian hari agar jajaran dinas pendidikan menertibkan terhadap Sumbangan disekolah yang tidak mengikat, yang telah disepakati oleh komite dan wali murid serta peserta didik. 3) Kedepan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pesisir Selatan sangat dituntut eksistensi pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan guru-guru serta komite sekolah, yang ada ditingkat SD dan SMP termasuk guru penggerak. Sehingga sekolah menghasilkan anak didik yang baik secara kualitas maupun kuantitas di jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. 4) Untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah SD dan SMP</p>	<p>pemeriksaan eksternal oleh inspektorat dan BPK juga penggunaan dana BOSDA dipantau secara ketat dengan cara membentuk tim verifikasi oleh dinas tentang belanja yang sesuai dan tidak sesuai dengan juknis bosda serta SPJ bosda yang kita periksa secara berkala.</p> <p>Dan untuk SMP juga sudah dilaksanakan Rekon BOs disekolah sekolah.</p> <p>b. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangannya maka dari itu dapat kami pastikan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan apapun dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah dan mengeluarkan Edaran tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun terhadap peserta didik.</p> <p>c. Eksistensi pengawas, kepek, dan guru terutama guru penggerak dan kepala sekolah penggerak terus kita tingkatkan dengan cara pemanfaatan PMM (Plafon Merdeka mengajar) dimana PTK kita diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya setiap saat demi mewujudkan Profil pelajar Pancasila</p> <p>d. Peningkatan mutu siswa tidak bisa dilepaskan dari mutu</p>	
--	--	--



	<p>agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan kegiatan ekstra kurikuler (menambah jam pelajaran) dan memotivasi lahirnya bimbingan-bimbingan belajar disetiap kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. 5) Kondisi hari ini SD dan SMP mobileur banyak tidak layak digunakan oleh SD dan SMP, untuk itu diminta pada Pemerinah Daerah melalui jajaran dinas pendidikan agar dapat melakukan pendataan mobileur yang tidak layak pakai dan agar segera dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 dan atau pada APBD Tahun 2023 sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah. 6) Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerapkan kembali setiap penerimaan murid baru dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004</p>	<p>proses PBM dan mutu proses kegiatan diluar PBM seperti kegiatan ekstrakurikuler untuk itu kita sudah punya aplikasi yang dinamakan Pronasa (Program Nagari bersekolah) dimana kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri siswa itu dipantau atau dikases langsung oleh semua pihak. Di SMP juga sudah dilakukan kegiatan tambahan diluar jam PBM seperti Pramuka,Pembinaan OSN dan O2SN , Tahfidz,FL2SN DLL</p> <p>e. Dinas pendidikan dan Kebudayaan juga sudah melakukan pendataan Mobiler yang tidak layak pakai ke sekolah-sekolah di kabupaten pesisir selatan.</p> <p>f. Setiap Penerimaan Siswa baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melakukan Tes baca Tulis Qur'an dan Praktek bacaan Shalat Wajib.</p>		
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN				
No	Rekomendasi DPRD	Tindakanjutt	Rekomendasi	Tujuan/ Masalah



		DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Mengingat tingginya resiko bagi tenaga kesehatan dalam menangani covid19, maka diminta kepala daerah untuk memberikan insentif yang memadai pada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung menangani kasus covid19.	-RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memberikan insentif covid19 terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (covid-19) - Untuk tenaga selain tenaga kesehatan yang juga ikut andil dalam penanganan covid19 seperti tenaga Brangkar, Gas Medis, Laundry, Gizi, Satpam maka insentifnya diberikan dan diberi penambahan waktu pembagian jasa pelayanan setelah claim pasien covid19 cair.	

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Rekomendasi DPRD	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung atau wisatawan ke Pesisir Selatan maka diminta pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda	Dalam rangka meningkatkan Kenyamanan Pengunjung atau wisatawan maka terdapat kegiatan DAK NON FISIK 2023 Program : Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Sumber daya Manusia yang berwawasan Sapta Pesona



	dan Olahraga agar dapat menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan) di kawasan wisata.	Kegiatan: Pemasaran Pariwisata dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota dan Pelaksanaanya Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar. Anggaran : Rp. 1.400.000.000,-	
2	Agar Pemerintah Daerah meningkatkan serana dan prasarana dilokasi wisata yang sudah ada dan pembenahan terhadap destinasi wisata baru yang ada di Pesisir Selatan.	Dalam rangka optimalisasi pengelolaan objek wisata semangki dilakukan pemeliharaan berupa kegiatan pengadaan rehabilitasi Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 270.000.000,-	Menambah Kepuasan dan meningkatkan daya tarik wisata semangki
3	Agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dapat melestarikan atau menampilkan kembali budaya tradisional melalui event-event kebudayaan dan wisata di Pesisir Selatan, dalam rangka memancing minat wisatawan yang datang ke Pesisir Selatan.	Untuk Melestarikan dan menampilkan kembali budaya tradisional melalui event-event kebudayaan maka diadakan kegiatan Pelaksanaan Event Desa Wisata 2023 Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 25.000.000,0	Dalam rangka meningkatkan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan maka Promosi pariwisata untuk menambah jumlah wisatawan sebagai bentuk usaha peningkatan perekonomian
4	Untuk meningkatkan PAD di lokasi wisata agar dinas pariwisata melakukan inovasi terhadap pintu masuk lokasi wisata satu pintu dengan	Untuk Lebih meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Selatan maka harus ada suatu inovasi untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meminimalisasi tingkat kebocoran penerimaan PAD di kawasan Pantai Carocok Painan



	elektronik serta menertibkan pajak rumah makan dan restoran dan hotel.	Kegiatan : DED Pembangunan Pagar Pantai Carocok Anggaran : 42.872.500,-	
5	Dengan keterbatasan APBD diminta pada jajaran Dinas Pariwisata. Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan proposal kepusat untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di lokasi wisata.	Dinas Pariwisata sudah mengajukan ke pusat dan sudah mendapatkan DAK Fisik 2023 Program : Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) Kegiatan : Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Anggaran : Rp. 3.358.776.000,-	Terbukanya Destinasi wisata baru dan meningkatkan PAD Kab. Pesisir Selatan

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Terkait banyaknya program Pemerintah terdahulu yang terbengkalai seperti pembangunan pasar surantih, diharapkan pemerintah saat ini harus juga memprioritaskan keberlanjutan Pembangunan tersebut agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat.	Pada tahun 2020, dilakukan pembangunan Pasar Surantih dengan menggunakan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dan direncanakan akan dibangun sebagai pasar semi modern. Karena adanya refocusing anggaran yang disebabkan Covid-19, hingga tahun 2021 belum dapat dilanjutkan. Pada tahun 2022, telah direncanakan pembangunan pasar surantih dan telah tertuang dalam Renja Dinas Koperindag tahun 2022 dan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2023. Pelaksanaan lanjutan	Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang Lanjutan Pembangunan Pasar Surantih



		<p>pembangunan Pasar Surantih pun telah diupayakan melalui dana APBN Kementerian Perdagangan, namun masih terkendala “Readiness Criteria”, yang mana mempersyaratkan bahwa tanah lokasi pasar surantih sudah dihibahkan pada Pemda Pessel. Kondisi saat ini, status tanah tersebut, masih milik KAN (Kerapatan Adat Nagari). Pada saat ini sedang dilakukan mediasi dengan pihak nagari Surantih dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk penyerahan asset tanah Pasar Surantih menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>Program : Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan sarana Distribusi perdagangan</p>	
DINAS PERHUBUNGAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>1. Dalam Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui: a. Retribusi Parkir,</p>	<p>1. Terkait fasilitas parkir elektronik di destinasi wisata, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan belum sanggup merelaisasikan rekomendasi</p>	



	<p>diharapkan pemerintah daerah memfasilitasi parkir elektronik di tempat destinasi wisata.</p> <p>b. Pendapatan melalui pengujian KIR Kendaraan, agar pemerintah daerah memberdayakan / menyekolahkan pegawai yang berasal dari putra daerah untuk peningkatan level pengujian KIR dan pengujian CPO pada KIR mobil lebih besar seperti Colt Diesel dan Kendaraan Tronton untuk Angkut CPO.</p> <p>2. Dalam upaya penertiban transportasi darat, diharapkan pemerintah daerah aktivitas transportasi umum yaitu:</p> <p>a. Legalitas Odong-Odong dengan aturan teknis lewat pengajuan perda,</p> <p>b. Penertiban transportasi aktivitas truk yang mengangkut CPO disepanjang jalan Kabupaten Pesisir Selatan demi mencegah dampak</p>	<p>tersebut dikarenakan:</p> <p>a. Keamanan di lokasi wisata belum menjamin untuk diwujudkan parkir elektronik, jika jika dipasang fasilitas parkir elektronik maka beresiko akan dirusak dan dicuri.</p> <p>b. Lokasi destinasi wisata belum seluruhnya dibangun pagar pembatas dan bersinggungan langsung dengan tanah dan bangunan milik warga setempat.</p> <p>c. Dinas perhubungan tidak memiliki anggaran untuk mewujudkan fasilitas parkir elektronik di tahun 2022.</p> <p>2. Terkait Ootimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan telah menugaskan 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan putra asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjalani pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor tingkat V (lima) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sudah dapat melaksanakan pengujian kendaraan angkutan berat.</p> <p>3. Terkait usulan legalitas kendaraan Odong-Odong melalui Perda, bahwa Dinas Perhubungan tidak dapat mewujudkan legalitas kendaraan Odong-Odong</p>	
--	---	---	--

	<p>kerusakan jalan yang semakin parah dan korban Jiwa.</p> <p>c. Mengupayakan Pengangkutan CPO melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan yang ada, ataupun membuat pelabuhan yang dekat dengan Pabrik CPO.</p>	<p>dikarenakan:</p> <p>a. Kendaraan Odong-Odong merupakan kendaraan yang dimodifikasi di fasilitas modifikasi kendaraan yang tidak memiliki lisensi dari menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 220 terkait pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor.</p> <p>b. Rancang bangun kendaraan Odong-Odong tidak sesuai dengan persyaratan Laik Jalan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sehingga pengoperasian Odong-Odong berpotensi membahayakan penumpang dan pengguna jalan lain. Sehingga usulan legalitas kendaraan Odong-Odong tidak dapat diwujudkan karena akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.</p>	
		4. Terkait penertiban	

		<p>kendaraan pengangkut barang curah CPO untuk mencegah kerusakan jalan. Jalan Nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Jalan Arteri Primer yang dapat dilewati kendaraan dengan berat kendaraan dan berat muatan maksimal maksimal 8 (delapan) ton hingga 10 (sepuluh) ton, sementara jalan tersebut kerap dilewati dengan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga menimbulkan kerusakan jalan. Dinas Perhubungan telah melaksanakan rapat dengan perwakilan DPC Organda dan didapat keterangan bahwa para pelaku operator kendaraan ODOL nekat karena alasan ekonomi. Untuk upaya penertiban kendaraan barang curah CPO maupun kendaraan ODOL maka perlu diadakan diskusi dengan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan.</p> <p>5. Terkait pembangunan pelabuhan untuk angkut CPO, bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mewujudkan dokumen pendukung dan pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Penasahan di Painan. Namun kewenangan pelaksanaan pembangunan fisik Pelabuhan Penasahan berada di Kementerian</p>	
--	--	---	--

		Perhibungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur Padang. Tahun 2023 KSOP Kelas II Teluk Bayur telah merencanakan untuk memulai pembangunan fisik Pelabuhan Penasahan Painan.	
DINAS PERTANIAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Penanganan persoalan irigasi sepanjang Kabupaten Pesisir Selatan seperti di Banda Tengah Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara, Taratak Sutera serta Ampalu Kecamatan Sutera	<p>Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kegiatan penyediaan air irigasi dan sumber-sumber air irigasi se Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBD, DAK Fisik Pertanian dan APBN sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang bersumber dari dana APBN sebanyak 19 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.245.000.000,00 b. Optimasi Lahan yang bersumber dari dana APBN sebanyak 200 Ha atau 6 unit senilai Rp. 1.137.000.000,00 c. Pembangunan Jaringan Irigasi Tanah Dangkal (JIAD) bersumber dari DAK Fisik Pertanian sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp. 712.500.000,00 	Memperbaiki jaringan irigasi tersier dalam rangka pemenuhan ketersediaan air yang cukup untuk usaha pertanian khususnya tanaman padi sawah sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) yang akhirnya meningkatkan produksi padi sawah di Kabupaten Pesisir Selatan



		<p>d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang bersumber dari dana APBD dan DAK Fisik Pertanian sebanyak 27 unit dengan nilai sebesar Rp. 2.849.703.500,00</p> <p>e. Pembangunan Dam Parit sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp. 388.980.000,00</p> <p>Khusus pembangunan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Bayang Utara dan Sutera adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Kecamatan Bayang Utara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Lubuk Pauh Kampung Taratak Teleng Kenagarian Puluik-Puluik sebanyak 1 unit dengan total anggaran sebesar Rp. 129.600.000,00</p> <p>2. Kecamatan Sutera Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Harapan Maju Kampung Koto Taratak Nagari Koto Taratak sebanyak 1 unit dengan total anggaran sebesar Rp. 130.460.000,00</p>	
--	--	---	--

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Dalam mengatasi masalah keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan adanya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan Pengelolaan dan	Adanya pekerjaan berupa Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis



	<p>Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang memuat skenario berapa tahun bisa melayani masyarakat, termasuk kajian sumber-sumbernya. Pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen RISPAM untuk bisa mendapatkan bantuan dalam penyelesaian masalah air.</p>	<p>Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana Rp. 6.277.758.000,- (<i>enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah</i>)</p>	<p>SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM), Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah) dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Perdesaan, dan Pemasangan SR Air Minum Perdesaan</p>
	<p>Pemerintah Daerah harus mengupayakan pendekatan formal dan informal kepada pihak kementerian agar mendapatkan bantuan terkait penyelesaian banjir di Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu perlu adanya regulasi daerah untuk</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana Rp. 8.496.993.405,- (<i>delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu</i>)</p>	<p>Adanya pekerjaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing untuk memperkecil daya rusak air dan banjir di kawasan pemukiman, Normalisasi/Rest</p>



	<p>pembangunan kembali rumah masyarakat termasuk rumah ibadah yang rusak akibat bencana alam. Besaran alokasinya minimal 50 juta rupiah mengingat kondisi harga saat ini.</p>	<p><i>empat ratus lima rupiah)</i></p>	<p>orasi Sungai untuk memperlancar aliran air dan mengurangi sedimen sungai/ anak sungai serta pekerjaan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai galian C yang dekat dengan sungai</p>
	<p>Perlu adanya langkah terukur dan tuntas dalam penyelesaian permasalahan bencana banjir lewat pembuatan perda, sistem kerjasama, proposal serta dokumen masterplan terkait drainase.</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota <i>dengan Pagu Dana</i> Rp. 6.123.351.645,- (<i>enam milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah</i>)</p>	<p>Adanya pekerjaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</p>
	<p>Perlunya penanganan</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN</p>	<p>Adanya</p>



	<p>husus lewat program pemulihan ekonomi dan pembangunan terhadap persoalan irigasi sepanjang kabupaten Pesisir Selatan seperti halnya di Banda tengah kenagarian Puluik-Puluik kecamatan Bayang Utara, Taratak Sutura serta Ampalu Kecamatan Surantih. Dan juga normalisasi anak sungai di kampung tanjung durian Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.</p>	<p>SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>dengan Pagu Dana</i> Rp. 13.078.958.241 (<i>Tiga belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat puluh satu rupiah</i>)</p>	<p>pekerjaan Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan kegiatan operasional unit pengelola irigasi</p>
	<p>Sesuai dengan arahan kebijakan dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan manusia beriman, kreatif dan berdaya saing, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baik yang belum tersentuh pembangunan</p>	<p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung <i>dengan pagu dana</i> Rp. 2.818.168.335 (<i>Dua Milyar Delapan Ratu Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah</i>) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota <i>dengan</i></p>	<p>Adanya pekerjaan kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan</p>



	<p>maupun yang rusak akibat dari bencana seperti</p> <p>a. Pembangunan kembali sekolah dasar seperti SDN 28 Surantih di di Kecamatan Bayang Utara yang rusak akibat bencana.</p> <p>b. Perbaiki jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Ujung Air Kenagarian Ampiang Parak kecamatan Sutera, dan banyak lagi yang lainnya.</p> <p>c. Perbaiki Jembatan menuju SMP N 05 Satu Atap Sungai Bungin Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batangkapas.</p> <p>d. Perbaiki jalan menuju SMPN 4 Bayang Kenagarian Sawah Laweh yang telah rusak parah.</p>	<p><i>pagu dana</i> Rp. 129.185.258.177 (<i>Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah</i>)</p>	<p>Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota, Penyusunan Regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan, Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan, Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan, Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo), Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan</p>
--	---	---	---



			Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan, Pemeliharaan berkalan jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, dan Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
No	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Pengelolaan sampah untuk pasar pasar wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung dengan tempat penampungan sementara dengan system container dan dengan secepatnya diangkut secara berkala ke tempat pembuangan akhir	Tahun 2022 sudah ada pengadaan Container dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 10 Unit dan Dari Dana DAK Dinas Perkimtan LH sebanyak 2 Unit. Sudah didistribusikan 3 unit ke Pasar Barung Barung Belantai, Pasar Surantih dan Pasar Batang Kapas. Sisa 9 unit lagi yang akan di distribusikan sesuai rekomendasi DPRD	Pendistribusian Container Sampah ke Pasar Wilayah Tengah Kabupaten Pesisir Selatan.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			



No	Rekomendasi DPRD	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>Pemanfaatan dan penggunaan bangunan milik pemerintah (pemakaian gedung Perwakilan Tapan)</p>	<p>Gedung perwakilan Tapan sampai saat sekarang ini dimanfaatkan oleh Pol PP Damkar, BPBD (TRC) dan UKL CAPIL sedangkan untuk pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP belum terwujud, hal ini terkendala dengan keterbatasan anggaran / operasional.</p> <p>Pada tahun 2021, DPMPTSP pernah melakukan pelayanan di kantor perwakilan Tapan dengan menempatkan personil dan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan. Kondisi ini hanya bertahan beberapa bulan di karenakan kekurangan biaya operasional. Tahun 2022 ini, anggaran yang tersedia di DPMPTSP untuk kantor perwakilan Tapan hanya membiayai untuk pembayaran rekening listrik.</p>	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di atasnya.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar **Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dan Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian sebesar **Rp. 2.776.155.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)** dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.896.155.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)** dan realisasi **Rp. 2.893.529.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta (99,90%))**.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2022

N O	SATUAN KERJA	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	DINAS PERKEBUNGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN	2.896.155.000,00	2.893.529.000,00	99,90
Total			2.896.155.000,00	2.893.529.000,00	99,90

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan



4.1.1 Permasalahan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;

4.1.2 Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Jika revisi DIPA dan POK telah di sahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota;

4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan dibawahnya.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2022 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Secara ringkas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan akhir tahun anggaran 2022, berupaya mendeskripsikan manajemen pembangunan kabupaten yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam satu tahun terakhir yakni tahun 2022.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan tahun 2022 ini disusun dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan tahun 2022 ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatulallah Wabarakatuh



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



tapem@pesisirselatankab.go.id